



TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

**RENSTRA
LPP TVRI
Tahun 2018-2019
(REVISI 2015-2019)**



TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PENETAPAN

RENCANA INDUK/RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018-2019 (Revisi 2015 - 2019)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Februari 2019
Oleh : DEWAN PENGAWAS



Arief Hidayat Thamrin

Ketua

Maryuni Kabul Budiono

Anggota

Supra Wimbarti

Anggota

Made Ayu Dwie Mahenny

Anggota

Pamungkas Trishadiatmoko

Anggota



RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) TVRI tahun 2018-2019 merupakan revisi terhadap Renstra TVRI tahun 2015-2019. Revisi Renstra dilakukan karena terjadi perubahan kepemimpinan TVRI baik Dewan Pengawas maupun Dewan Direksi LPP TVRI Periode 2017-2022. Dewan Pengawas LPP TVRI dikukuhkan pada tanggal 6 Juni 2017. Pada akhir November 2017 Dewan Pengawas berhasil memilih dan mengangkat Dewan Direksi periode 2017-2022, dan dilantik tanggal 29 November 2017. Dengan demikian perlu dilakukan revisi Renstra TVRI sesuai dengan arah kebijakan umum yang dikeluarkan Dewan Pengawas, dan berbagai kebijakan operasional oleh Direksi LPP TVRI. Revisi Renstra ini dilakukan dalam 2 tahun terakhir RPJMN tahun 2015-2019, maka periodisasi yang digunakan adalah tahun 2018-2019.

Dewan Pengawas TVRI periode 2017-2022 telah menerbitkan Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Keputusan tersebut menetapkan Kebijakan Umum LPP TVRI meliputi Visi dan Misi, Slogan, Prinsip-prinsip Lembaga Penyiaran Publik dan Nilai Dasar Lembaga Penyiaran Publik.

Visi

“Menjadi Lembaga Penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa”

Visi dijabarkan kedalam Misi TVRI selanjutnya diturunkan menjadi tujuan strategis dan sasaran strategis. Tujuan strategis digunakan untuk menyatakan rumusan yang luas dan tidak terbatas waktu tentang apa yang ingin dicapai TVRI. Sedangkan sasaran strategis digunakan untuk menyatakan rumusan hasil akhir yang lebih spesifik, pencapaian yang harus terwujud dalam batas waktu tertentu. Berdasarkan sasaran strategis dirumuskan indikator kinerja dan target kinerja yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Setiap Tahun.

Tabel 1.1 : Tujuan Strategis LPP TVRI

NO	MISI	Tujuan Startegis	PIC	KOORDINATOR PIC
1	Menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi dan memberdayakan, yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.	Terselenggaranya program siaran informasi pendidikan dan hiburan yang sehat secara lokal, nasional dan internasional berbasis hasil penelitian untuk mencerdaskan bangsa dan memperkuat persatuan dan keberagaman.	Direktur Program dan Berita. Kepala Stasiun Penyiaran Kepala Puslitbang	DIREKTUR UTAMA
2	Mengelola sumber daya unggulan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel, secara profesional, modern serta terukur kemanfaatannya	Terselenggaranya pengelolaan dan pengawasan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan kredibel secara profesional dan modern, berbasis teknologi informasi	Direktur Keuangan Kepala SPI	
3	Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam bentuk layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini yang dikelola secara modern dan tepat guna serta dapat diakses secara global	Terselenggaranya penyiaran berbasis digital dalam bentuk layanan multiplatform, dan multiplexing dengan menggunakan teknologi terkini yang dapat diakses secara global	Direktur Teknik	
4	Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi serta mencerminkan keberagaman	Terselenggaranya reformasi birokrasi, tata kelola dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif, profesional dan beretika berbasis meritokrasi serta memiliki budaya kerja yang mencerminkan keberagaman.	Direktur Umum Kepala Pusdiklat	
5	Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terselenggaranya tatakelola kelembagaan yang dinamis, efektif, efisien dan berkelanjutan serta pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	Direktur Umum	
6	Mengoptimalkan pemanfaatan asset, meningkatkan pendapatan siaran iklan dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya optimalisasi dan pemanfaatan aset serta usaha jasa siaran dan jasa non siaran untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan	Direktur Pengembangan Usaha	

II. Arah Kebijakan Pengembangan TVRI

Perkembangan TV publik di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan industri penyiaran. Perkembangan industri harus ditampilkan dalam renstra dimana televisi swasta pun saat ini tengah melakukan perampingan karena adanya penurunan penerimaan iklan yang cukup signifikan. Pihak pengiklan sebagian beralih ke digital dan sebagian lagi beralih dengan mengadakan *event off air* karena ini bisa langsung memperoleh *revenue* dari penjualan.

Gambaran masa depan yg diinginkan dalam pengembangan TVRI adalah sebuah lembaga Negara yang memiliki undang-undang sendiri, sehingga TVRI menjadi kuat secara penganggaran, pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan, sebagaimana Polri yang mendapatkan penugasan khusus untuk mengamankan Negara. Demikian pula dengan peran dan fungsi TVRI sebagai media dalam upaya menangkal disinformasi.

1. TVRI atau RTRI menjadi *Public Service Media*
2. Optimalisasi Aset
3. Pajak Iklan Media
4. Sosial, Pendidikan dan Budaya
 - a. Mitigasi Bencana
 - b. Pengembangan Pusdiklat sebagai Universitas
5. Media Baru (*Video on Demand*)
6. Menjaga Kepercayaan Publik
7. Media Kontrol Sosial
8. Siaran Internasional

III. Program TV Publik

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis TVRI, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi TVRI, implementasinya dilaksanakan melalui program teknis dan program

generik. Program teknis meliputi Program Pengelolaan dan Pengembangan Siaran TV Publik TVRI dan Perencanaan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran Daerah. Sedangkan program generik meliputi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya TVRI.

IV. Alokasi Anggaran Berdasarkan Tujuan dan sasaran Strategis

Alokasi anggaran berdasarkan tujuan dan sasaran strategis dimaksudkan agar ada kepastian anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Hal ini penting agar tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

a. Alokasi Anggaran Program teknis dan Generik Renstra TVR Tahun 2018-2019

Program TVRI terbagi dua yaitu program teknis dan program generik. Program teknis meliputi program pengelolaan dan penyelenggaraan siaran TV Publik serta perencanaan dan pengembangan stasiun penyiaran, sedangkan program generik meliputi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Tabel 4.1: Alokasi Anggaran Renstra TVRI Tahun 2018-2019 (dalam milyar rupiah)

NO	PROGRAM	URAIAN	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah (Rp)
			2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	PROGRAM TEKNIS (Pengelolaan dan Pengembangan Siaran TV Publik, dan Perencanaan Pengembangan Stasiun Penyiaran Daerah)	1. Program dan Berita	520.77	1,003.50	1,524.27
		2. Stasiun Penyiaran			
		3. Pengembangan Usaha	4.21	14.70	18.91
		4. Teknik	76.69	347.79	424.48
		Jumlah	601.67	1,365.99	1,967.66
2	PROGRAM GENERIK (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya)	1. Keuangan	186.99	318.30	505.29
		2. SPI			
		3. Umum	46.17	284.29	330.46
		4. Pusdiklat			
		6. Puslitbang	4.07	4.07	8.14
		Jumlah	237.23	606.66	843.89
		Total	838.90	1,972.65	2,811.55

Sementara itu alokasi anggaran untuk Opex dan Capex dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15: Alokasi anggaran Opex dan Capex Tahun 2018-2019

NO	TUJUAN	PIC	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah
			2018	2019	
1	Terselenggaranya program siaran informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat serta siaran bermuatan lokal berbasis hasil penelitian untuk mencerdaskan bangsa dan memperkuat persatuan dan keberagaman.	Direktur Program dan Berita, Kepala TVRI Stasiun Penyiaran dan Kepala Puslitbang (Opex)	524.84	1,007.57	1,532.41
2	Terselenggaranya pengelolaan dan Pengawasan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan kredibel secara profesional dan modern, berbasis teknologi informasi	Direktur Keuangan Kepala SPI (Opex)	186.99	318.30	505.29
3	Terselenggaranya penyiaran berbasis digital dalam bentuk layanan multiplatform, multikanal dan multiplexing dengan menggunakan teknologi terkini yang dapat diakses secara global	Direktur Teknik (Opex)	1.60	4.08	5.68
		Direktur Teknik (Capex)	75.09	343.71	418.80
4	Terselenggaranya reformasi birokrasi, tata kelola dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif, profesional dan beretika serta memiliki budaya kerja dan loyalitas berbasis meritokrasi.	Direktur Umum, Kepala Pusdiklat (Opex)	26.50	61.57	88.07
5	Terselenggaranya tatakelola kelembagaan yang dinamis, efektif, efisien dan berkelanjutan serta pengelolaan aset berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Direktur Umum (Opex)	2.87	165.81	168.68
		Direktur Umum (Capex)	16.80	56.91	73.71
6	Terselenggaranya optimalisasi pemanfaatan aset, usaha jasa siaran dan jasa non siaran untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan	Direktur Pengembangan Usaha (Opex)	4.21	14.70	18.91
	Jumlah	Opex	747.01	1,572.03	2,319.04
		Capex	91.89	400.62	492.51
		Total	838.90	1,972.650	2,811.55

Upaya untuk meningkatkan PNBPN dapat dilakukan dengan dua cara

1. Intensifikasi PNBPN

Intensifikasi PNBPN dapat dilakukan dengan mengubah struktur tarif yang ada dalam PP Nomor 33 tahun 2017 tanggal 11 September 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN pada LPP TVRI. Potensi kenaikan PNBPN melalui intensifikasi ini diperkirakan akan mencapai 70% s.d. 200%. Intensifikasi penerimaan PNBPN mengharuskan revisi PP 33 tahun 2017. Oleh karena itu perlu dipersiapkan kajian akademis revisi PP 33 tahun 2017 dan ijin prinsip dari kementerian keuangan untuk melakukan perubahan.

2. Ekstensifikasi PNBPN

Ekstensifikasi PNBPN dapat dilakukan dengan menambah jumlah jenis penerimaan PNBPN yang secara potensial dapat diterima oleh LPP TVRI, sebagai contoh kegiatan *Special Event*. Terdapat banyak jenis penerimaan ini (*special event*) dan turunannya (sebagai contoh *public viewing right* atau nonton bareng secara komersial) sekaligus.

Potensi intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.18: Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBPN tahun 2018-2019

NO	PNBPN	Tahun		Jumlah (Rp)
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	Intensifikasi	96.00	255.90	351.90
2	Ekstensifikasi		50.00	50.00
	Jumlah	96.00	305.90	401.90



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) TVRI tahun 2018-2019 merupakan hasil revisi terhadap Renstra TVRI tahun 2015-2019. Revisi Renstra dilakukan karena terjadi perubahan kepemimpinan TVRI baik Dewan Pengawas maupun Dewan Direksi LPP TVRI Periode 2017-2022. Dewan Pengawas LPP TVRI dikukuhkan pada tanggal 6 Juni 2017. Pada akhir November 2017 Dewan Pengawas berhasil memilih dan mengangkat Dewan Direksi periode 2017-2022, dan dilantik tanggal 29 November 2017 yaitu :

1. Helmy Yahya sebagai Direktur Utama
2. Apni Jaya Putra sebagai Direktur Program dan Berita
3. Supriyono sebagai Direktur Teknik
4. Isnan Rahmanto sebagai Direktur Keuangan
5. Tumpak Pasaribu sebagai Direktur Umum
6. Rini Padmirehatta sebagai Direktur Pengembangan dan Usaha

Langkah-langkah strategis dilakukan dalam rangka meletakkan fondasi yang kokoh agar TVRI menjadi *resources* pembangunan dan sebagai wadah yang menjamin partisipasi publik dalam merumuskan berbagai kebijakan nasional serta sebagai instrumen untuk menciptakan kesadaran terhadap prioritas nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Revisi Renstra didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi TVRI sesuai Visi TVRI yaitu mewujudkan TVRI sebagai lembaga penyiaran kelas dunia.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis TVRI, dilaksanakan melalui program teknis dan program generik. Program teknis meliputi Program Pengelolaan dan Pengembangan Siaran TV Publik TVRI dan Perencanaan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran Daerah. Sedangkan program generik meliputi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya TVRI. Dalam perumusan Renstra TVRI tahun 2018-2019 juga mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) manajemen TVRI periode 2018-2022.

Peta Jalan adalah *destination statement* apa yang akan dilakukan TVRI ke depan. Tema besar pada peta jalan ini adalah pengembangan konten dan penyiaran sebagai *core business*, SDM, bisnis, pengembangan sumber-sumber pembiayaan baru dan infrastruktur. Kebutuhan anggaran TVRI saat ini belum sebanding dengan kebutuhan TVRI terutama menghadapi migrasi penyiaran analog ke sistem penyiaran digital. Untuk melakukan migrasi teknologi dan memenuhi kebutuhan pendanaan TVRI memerlukan kerangka pendanaan yang jelas. Kerangka Pendanaan yang diperlukan agar TVRI dapat optimal menjalankan tugas dan fungsi TVRI sebagai TV Publik.

Jakarta, Feburari 2019



Helmy Yahya
Direktur Utama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENETAPAN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR GRAFIK	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM	1
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	3
B. Perluasan Jangkauan Siaran	4
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	6
A. Aturan Perundang-Undangan dan Kelembagaan.....	6
B. Misi Penyiaran TV Publik.....	13
C. Kerangka Pikir Pengembangan TVRI	16
D. Isu-Isu Strategis	35
BAB II RUMUSAN VISI, MISI	
DAN EVALUASI RENSTRA 2015-2019	52
2.1 RUMUSAN VISI	52
A. Visi Nasional	53
1. TVRI Sebagai Rujukan Informasi Yang Netral dan Mendidik.....	57
2. Kebijakan Nasional Terkait Lembaga Penyiaran Publik	59
3. VISI dan Misi LPP TVRI	61
4. Nilai Dasar Penyiaran Publik	62
5. Prinsip Prinsip Penyiaran Publik	63
6. Penjabaran Visi	63
2.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis	65
A. Tujuan Strategis	65
B. Sasaran Strategis	68
2.3 Evaluasi Renstra TVRI Tahun 2015-2019.....	77
A. Evaluasi Anggaran Bidang Program Dan Berita	79
B. Evaluasi Renstra Bidang Teknik.....	79
C. Evaluasi Renstra Pengembangan Usaha	81
D. Penurunan Realisasi Renstra TVRI 2015-2019	82

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	84
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional	84
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi TVRI	87
A. Arah Kebijakan Pengembangan TVRI	88
B. Disruption Technology	96
C. Perkembangan Broadband di Indonesia	107
D. Pemenuhan Jangkauan Siaran Nasional	111
E. Peningkatan Jumlah Penonton	112
F. Pengembangan Tipe Stasiun Penyiaran.....	118
3.3 Pentahapan Peta Jalan (Roadmap).....	133
A. Arah Dan Kebijakan Tahun 2018	134
B. Arah Dan Kebijakan Tahun 2019.....	142
3.4 Kerangka Kelembagaan	145
A. Susunan Direksi.....	146
1. Direktur Utama	146
2. Direktorat Program dan Berita	147
3. Direktorat Keuangan.....	148
4. Direktorat Teknik	149
5. Direktorat Umum	151
6. Direktorat Pengembangan dan Usaha	152
B. Susunan SPI dan Pusat-Pusat	153
1. Satuan Pengawas Intern	153
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan	154
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan	154
3.5 Kerangka Regulasi	155
A. Mandatori.....	157
B. Tujuan Lembaga.....	158
3.6 Pemetaan Strategi TVRI	159
BAB IV TARGET KINERJA	
DAN KERANGKA PENDANAAN.....	162
4.1 Target Kinerja	162
4.2 Program TV Publik	169
A. Program Teknis Pengelolaan TV Publik	170
B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	
Teknis Lainnya	170
4.3 Kerangka Pendanaan	171
A. Alokasi Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis.....	172
B. Alokasi Anggaran Program teknis dan Generik Renstra TVRI	
Tahun 2018-2019	179
4.4 Kerangka Pendanaan Mengurangi Beban APBN	181
A. Reinventasi Negara Dan Publik Sebagai Pemilik TVRI	182
B. Penyelenggara Multiplexing/Common Integrated Infrastructure	
Provider [CIIP]	192
C. Optimalisasi Pemanfaatan Aset	193

D. Public Service Obligation [PSO].....	193
4.5 Mengurangi Peran APBN	194
A. Pembiayaan (Financing)	195
BAB V PENUTUP.....	198
LAMPIRAN.....	201

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Peran TV Publik dan Swasta	14
Tabel 1.2 Perbandingan Politik Anggaran Antara TV Publik, Internasional, dan TVRI	15
Tabel 1.3 Perolehan Medali Indonesia dalam Asian Games 1998 s/d 2018	17
Tabel 1.4 Uji Coba Siaran Digital Menggunakan MUX TVRI Tahun 2016 dan 2017	29
Tabel 1.5 Perpanjangan Uji Coba Siaran Digital Tahun II Tahun 2017.....	30
Tabel 1.6 Lanjutan Uji Coba Siaran Digital Tahun II Tahun 2017	31
Tabel 1.7 Perbandingan Jumlah Pemancar TVRI Dengan TV Swasta	33
Tabel 1.8 Jumlah Stasiun Penyiaran TVRI.....	37
Tabel 1.9 Usia PNS/PBPNS TVRI Menurut Kelompok Usia	42
Tabel 1.10 Kegiatan Diklat Yang Dilaksanakan Tahun 2017	47
Tabel 1.11 Hasil <i>Training Need Analysis</i> Kebutuhan Diklat Tahun 2017	48
Tabel 1.12 Prioritas Diklat	51
Tabel 2.1 Isu Belum Optimalnya Peran Lembaga Penyiaran Publik	58
Tabel 2.2 Tujuan Strategis LPP TVRI	66
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LPP TVRI.....	70
Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran Strategi, dan Indikator Kinerja LPP TVRI	71
Tabel 2.5 Tujuan, Sasaran Strategi, dan Indikator Kinerja LPP TVRI	72
Tabel 2.6 Tujuan, Sasaran Strategi, dan Indikator Kinerja LPP TVRI	73
Tabel 2.7 Tujuan, Sasaran Strategi, dan Indikator Kinerja LPP TVRI.....	74
Tabel 2.8 Tujuan, Sasaran Strategi, dan Indikator Kinerja LPP TVRI	75
Tabel 2.9 Tujuan, Sasaran Strategi, dan Indikator Kinerja LPP TVRI	76
Tabel 2.10 Evaluasi Anggaran RENSTRA dengan RKAT / RKP 2015-2019 (dalam Milyar Rupiah)	77
Tabel 2.11 Rencana Kinerja Bidang Program dan Berita Dalam RENSTRA 2015-2019	78
Tabel 2.12 Anggaran Program dan Berita Dalam RENSTRA 2015-2019 Dengan RKP / RKAT 2015-2017 untuk Kegiatan Siaran Nasional dan Daerah (dalam Milyar Rupiah)	79
Tabel 2.13 RENSTRA Bidang Teknik 2015-2017	80
Tabel 2.14 Pengembangan <i>Unit Bussiness</i> RENSTRA Tahun 2015-2019	81
Tabel 3.1 Jumlah SDM dan Beban Kerja TVRI Kantor Pusat Tahun 2011.....	99
Tabel 3.2 Jumlah SDM dan Beban Kerja Stasiun Penyiaran Daerah 2011	100
Tabel 3.3 Jumlah Beban (Bobot) kerja jabatan (dalam menit).....	103
Tabel 3.4 Penambahan SDM TVRI Periode RENSTRA 2018-2019 Berdasarkan Analisis Beban Kerja.....	105
Tabel 3.5 Kebutuhan Profesi Transmisi Berdasarkan ABK.....	106
Tabel 3.6 Analisa Kebutuhan SDM Transmisi Public Private Partnership	107
Tabel 3.7 Rencana Pengembangan Tipe TVRI Penyiaran Daerah.....	119
Tabel 3.8 Jumlah Pemancar TVRI Tahun 2018	125

Tabel 3.9 Hasil Yang Diharapkan Dari 8 Areal Perubahan.....	138
Tabel 3.10 Lanjutan Hasil Yang Diharapkan Dari 8 Areal Perubahan.....	139
Tabel 4.1 Indikator Kinerja, Target Kinerja	165
Tabel 4.2 Indikator dan target Kinerja LPP TVRI	166
Tabel 4.3 Indikator dan Target Kinerja LPP TVRI.....	167
Tabel 4.4 Indikator dan Target Kinerja LPP TVRI.....	168
Tabel 4.5 Alokasi Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis (dalam Milyar Rupiah)	173
Tabel 4.6 Alokasi Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis (dalam Milyar Rupiah)	174
Tabel 4.7 Alokasi Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis (dalam Milyar Rupiah)	175
Tabel 4.8 Alokasi Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis (dalam Milyar Rupiah)	176
Tabel 4.9 Alokasi Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis (dalam Milyar Rupiah)	177
Tabel 4.10 Alokasi Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis (dalam Milyar Rupiah)	178
Tabel 4.11 Alokasi Anggaran RENSTRA TVRI Tahun 2018-2019 (Dalam Milyar Rupiah).....	179
Tabel 4.12 Investasi Negara Tahun 2015-2017	184
Tabel 4.13 Belanja LPP TVRI Tahun 2015-2017	185
Tabel 4.14 Neraca TVRI Tahun 2015-2017.....	186
Tabel 4.15 Alokasi Anggaran OPEX dan CAPEX Tahun 2018-2019	188
Tabel 4.16 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBPN Tahun 2018-2019	191
Tabel 4.17 Diversifikasi Penerimaan Tahun 2018-2019.....	194
Tabel 4.18 Pengurangan Peran APBN	194

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Agenda Pembangunan Nasional Terkait Penyiaran Publik	4
Gambar 1.2 Peta Kelembagaan Pemerintah Republik Indonesia	7
Gambar 1.3 Framework Televisi republik Indonesia.....	16
Gambar 1.4 Wilayah Penelitian Puslitbang Tahun 2017 di Jambi, Kupang Dan Ambon	22
Gambar 1.5 Perkembangan Siaran Digital TVRI Sampai Dengan Tahun 2017 ...	33
Gambar 3.1 Penetrasi Pengguna Internet.....	108
Gambar 3.2 Target Pengembangan Broadband di Indonesia.....	109
Gambar 3.3 Digital In Indonesia.....	110
Gambar 3.4 How Internet Users Watch Television	111
Gambar 3.5 Perkembangan Jaringan IT TVRI Tahap I	128
Gambar 3.6 Perkembangan Jaringan IT TVRI Tahap II.....	128
Gambar 3.7 Peta Jalan TVRI Tahun 2018-2022	133
Gambar 3.8 Struktur Organisasi TVRI	146
Gambar 3.9 Pemetaan Strategi TVRI	159
Gambar 4.1 Program TVRI Berdasarkan Program Generic dan Teknik	169

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Coverage dan Coverage Population TVRI 2013-2017	5
Grafik 1.2 Perkembangan Audience Share TVRI Agustus s/d September 2018..	18
Grafik 1.3 Performa TVRI Nasional dan TVRI Stasiun Penyiaran Daerah Berdasarkan TV Share Tahun 2017	19
Grafik 1.4 Audience Share TVRI Hasil Survei Puslitbang TVRI Tahun 2015	21
Grafik 1.5 Audience Share TVRI Nasional & TVRI Penyiaran Daerah Hasil Survei Puslitbang TVRI Tahun 2016.....	21
Grafik 1.6 Audience Share TVRI Jambi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.....	23
Grafik 1.7 Survei KPI Kategori Program.....	25
Grafik 1.8 Survei KPI Kategori Anak.....	25
Grafik 1.9 Survei KPI Program Berita	26
Grafik 1.10 Survei KPI Program Talkshow.....	26
Grafik 1.11 Frekuensi Mengakses Media	38
Grafik 1.12 Kondisi SDM TVRI	41
Grafik 1.13 Prosentase Training Need Analysis	49
Grafik 2.1 Presentase Realisasi Anggaran APBN TVRI 2015-2017 dalam DIPA Dibandingkan Dengan Alokasi Anggaran Dalam Renstra TVRI 2015-2019	83
Grafik 3.1 Studi Media Skala Nasional Menerima Kehadiran TVRI.....	114
Grafik 3.2 Hasil Riset Nielsen Pada 11 Kota di Indonesia	114
Grafik 3.3 Hasil Riset Provetic Persepsi Publik Tentang Preverensi Acara TVRI Tahun 2018	115
Grafik 3.4 Hasil Riset Provetic Persepsi Publik Tentang Pengalaman Menonton TVRI Tahun 2018	116
Grafik 3.5 Hasil Riset Provetic Persepsi Publik Tentang Pengalaman Menonton TVRI Tahun 2018.....	117
Grafik 3.6 Hasil Riset Provetic Persepsi Publik Tentang Responden Yang Tidak Menonton TVRI Tahun 2018	118
Grafik 4.1 Perkembangan Kebutuhan Anggaran TVRI Tahun 2018 s/d 2019	181

DAFTAR LAMPIRAN

I.	Alokasi Anggaran Berdasarkan Tujuan Strategis Tahun 2018-2019.....	201
II.	Ekstensifikasi dan Intensifikasi PNBPN Tahun 2018-2019.....	203
III.	Diversifikasi Penerimaan Tahun 2018-2019.....	204
IV.	Pengurangan Beban APBN Tahun 2018-2019.....	205
V.	Kebutuhan SDM Tahun 2018-2019.....	206
VI.	Logical Framework Renstra LPP TVRI (2018-2019).....	207
VII.	Matriks Program Dan Indikator Kegiatan Renstra Tahun 2018-2019.....	221

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pembangunan informasi sebagai bagian integral dari pembangunan Polhukamnas dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, TVRI melakukan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 dan berubah menjadi Renstra TVRI 2018-2019. Revisi Renstra ini dilakukan karena perubahan manajemen baru TVRI periode 2017-2022, sehingga harus disesuaikan dengan Visi dan Misi yang baru. Seiring dengan perkembangan dinamika sosial budaya dan pergantian manajemen baru maka Renstra 2015-2019 perlu dilakukan penyesuaian berkenaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN merupakan penjabaran dari Visi Misi, program aksi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta berpedoman pada RPJPN 2005-2025.

Dalam Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Lembaga Penyiaran Publik memiliki peran strategis yaitu meningkatkan jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing mencapai 90 % dan 88 %. Untuk mencapai target tersebut perlu identifikasi kondisi umum yang terjadi dalam dunia penyiaran di Indonesia antara lain :

1. Informasi dari media penyiaran (TV dan radio) belum dapat diakses oleh seluruh orang
2. Informasi yang disampaikan oleh media penyiaran belum semuanya mempunyai kualitas baik (akurat, terkini, mendidik, bermanfaat)
3. Penyampaian informasi melalui media penyiaran belum seluruhnya dilakukan secara santun

4. Intervensi politik dalam penyelenggaraan penyiaran dirasa tinggi
5. Media penyiaran sebagai wahana komunikasi dan penyampaian informasi publik belum optimal.

Kondisi ini menyebabkan dunia penyiaran belum dapat memenuhi arah penyiaran yang telah ditetapkan dalam UU 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran antara lain:

1. Banyak informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak mendukung pelaksanaan nilai moral/agama atau jati diri bangsa, tidak berimbang, bahkan tidak bertanggung jawab
2. Terjadi kepemilikan yang dapat menimbulkan perilaku monopoli yang dapat digunakan untuk kepentingan individu/golongan/politik.
3. Munculnya berita *hoax* dan *fakenews* melalui media sosial yang dapat dimanfaatkan oleh media penyiaran.

Untuk itu revisi renstra ini perlu memperhatikan kondisi yang terjadi dalam dunia penyiaran saat ini, sehingga peran strategis sebagai lembaga penyiaran publik dapat memberikan manfaat besar bagi kepentingan publik. Revisi renstra juga mengacu pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF). KPJM ini merupakan sebuah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi anggaran pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. KPJM adalah suatu proses bergulir yg berulang setiap tahunnya. Disamping itu juga berpedoman pada penganggaran berbasis kinerja (PBK) yaitu pendekatan penganggaran yang menetapkan alokasi anggaran yang keberlanjutannya diwadahi dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. Penganggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan, anggaran dengan kinerja (berupa *outcome* dan *output*), serta efisiensi dalam pencapaian *outcome* dan *output* organisasi meliputi:

- a. Proyeksi **ketersediaan sumber daya** anggaran (*resource envelope*) sebagai **batas atas** pagu belanja untuk mendanai berbagai rencana belanja pemerintah.
- b. Indikasi **rencana kebutuhan** pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat **kinerja** yang telah ditargetkan.
- c. Kerangka **rekonsiliasi** yang memadukan antara kedua hal tersebut, yaitu antara proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang tengah berjalan (*on-going policies*)

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Arah dan kebijakan pembangunan nasional adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, dengan sasaran tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informasi di pedesaan, perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial dengan sasaran peningkatan jangkauan siaran LPP RRI dan TVRI menjangkau 90% dan 88% penduduk Indonesia. Sedangkan sasaran strategis adalah pengoptimalisasian pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui migrasi sistem penyiaran televisi dari sistem analog ke sistem digital yang ditandai dengan selesainya *analog switch off* (ASO). Arah dan kebijakan pembangunan nasional terkait penyiaran publik digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1: Agenda Pembangunan Nasional Terkait Penyiaran Publik



Kebijakan nasional yang terkait dengan pengembangan Lembaga Penyiaran Publik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM 2015-2019) adalah merestrukturisasi sektor penyiaran dengan strategi yaitu

- Memperkuat Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebagai lembaga penyiaran yang independen, netral dan tidak komersial, dan memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat sehingga mampu menjadi rujukan dan penyeimbang informasi.
- Merevitalisasi prasarana lembaga penyiaran publik dengan memperhatikan perkembangan teknologi.
- Mempercepat perluasan jangkauan siaran lembaga penyiaran publik dengan mendorong pemanfaatan dan pengembangan media dan teknologi baru (non tradisional)

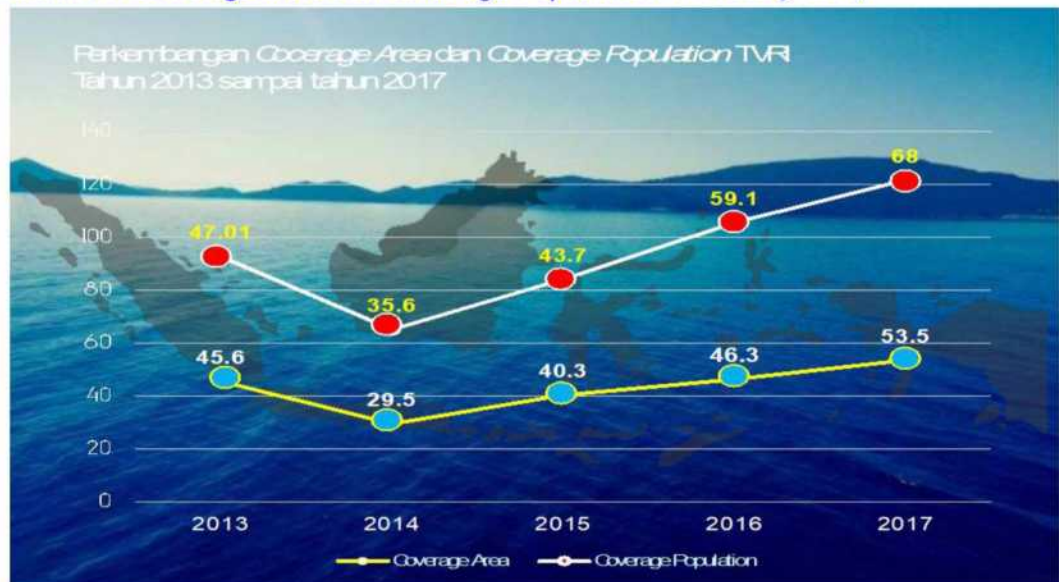
B. Perluasan Jangkauan Siaran

Mempercepat perluasan jangkauan siaran yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan program strategis yang harus diwujudkan sehingga perlu dirumuskan dalam Renstra. Perluasan jangkauan siaran diharapkan dapat menjangkau wilayah perbatasan, wilayah terluar dan wilayah tertinggal (3T) di Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah non komersial yang selama ini lebih banyak menerima siaran dari televisi Negara tetangga,

sehingga masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan pembangunan yang terjadi dalam Negaranya. Sementara itu siaran televisi swasta dilakukan hanya pada wilayah komersial, sedangkan wilayah non komersial seperti wilayah 3T menjadi tugas dari lembaga penyiaran publik. Masyarakat di daerah perbatasan sangat kurang mendapatkan akses terhadap informasi dan hiburan yang sehat melalui media televisi dan radio. Dengan demikian peranan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sangat strategis dan sangat dibutuhkan untuk penyebaran informasi sampai ke daerah 3T.

Distribusi konten penyiaran TVRI belum sampai ke seluruh wilayah di Indonesia, disebabkan karena jangkauan siaran LPP TVRI baru mencapai 68 % untuk coverage area dan 53.5% untuk coverage population. Sampai saat ini TVRI baru menjangkau 68 % dari seluruh luas wilayah Indonesia dan 53.5% dari jumlah penduduk Indonesia 250.000.000 jiwa yaitu 130.375.000 jiwa.

Grafik 1.1: Coverage Area dan Coverage Population TVRI 2013 -2017



1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Aturan Perundang-Undangan dan Kelembagaan

Sejalan dengan perkembangan zaman, TVRI mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukumnya dan organisasi yaitu mulai dari yayasan, unit pelaksana teknis (UPT) Departemen Penerangan RI, Perusahaan Jawatan (Perjan), perseroan terbatas (Persero) dan terakhir menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang selanjutnya disebut Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI).

TV Publik di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik. dan Peraturan pemerintah No 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI. Implementasi Undang-Undang 32 tahun 2002 dan PP No 13 tahun 2005 tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena menemui berbagai kendala, bahkan UU tersebut belum dapat memberikan kekuatan hukum yang kuat bagi pengembangan TVRI kedepan.

1. Badan Hukum

UU 32 tahun 2002 pada pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara bersifat independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat".Definisi badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban. Pasal 3 ayat (1) disebutkan TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

- c. Sumbangan masyarakat;
- d. Siaran iklan;
- e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Implementasi pasal 36 dalam sistem pengelolaan keuangan TVRI tidak sejalan dengan kondisi TVRI saat ini. LPP TVRI saat ini telah menggunakan pengelolaan keuangan dengan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada TVRI. Semua pendapatan yang diterima harus disetor ke Negara. Hal ini tidak selaras dengan pasal 36 PP Nomor 13 tahun 2005 bahwa TVRI penerimaan yang diperoleh digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan. Hal ini menyebabkan TVRI mengalami kesulitan dalam fleksibilitas penggunaan anggaran dan sumber-sumber lainnya. Penggunaan anggaran yang fleksibel diperlukan untuk mendukung model bisnis yang kreatif dan kecepatan pasar yang dinamis. Oleh karena itu perlu pertimbangan untuk melakukan perubahan sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel.

3. Pembiayaan Publik Melalui Iuran Penyiaran

Sebagaimana lazimnya sebuah lembaga penyiaran publik di negara-negara lain, seperti BBC-Inggris dan NHK-Jepang, maka partisipasi publik diwujudkan dalam bentuk iuran publik (*TV License*). UU No 32 Tahun 2002 dan PP 33 Tahun 2005 juga menjelaskan mengenai sumber pembiayaan antara lain didapat dari iuran publik berupa iuran penyiaran. Namun hingga saat ini iuran penyiaran belum dapat diimplementasikan. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan untuk menghidupkan kembali pembiayaan publik untuk mendukung pendanaan TVRI.

4. Optimalisasi Aset

Untuk mendukung kebutuhan anggaran TVRI dapat pula melakukan optimalisasi aset baik di pusat maupun di stasiun penyiaran di daerah. Optimalisasi aset dapat berupa kerjasama Bangun Serah Guna (BSG) atau Bangun Guna Serah (BGS) dan Kerjasama Pemanfaatan (KSP). Pilihan bentuk kerjasamanya disesuaikan dengan kebutuhan TVRI kedepan. TVRI Pusat dan sebagian besar stasiun penyiaran terletak pada lokasi premium di seluruh Indonesia sehingga memiliki prospek bisnis. Namun pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi aset ini penting dalam rangka mempersiapkan TVRI sebagai lembaga penyiaran kelas dunia dari sisi sarana dan prasarana perkantoran dengan standar internasional.

5. Pengelolaan SDM

Pasal 42 PP 33 Tahun 2005 menyatakan pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan TVRI dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SDM TVRI terdiri dari PNS dan PBPNS. Saat ini untuk PNS adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipekerjakan/ diperbantukan di TVRI sehingga TVRI tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian PNS.

Pejabat Pembina Kepegawaian berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selama 5 tahun terakhir tidak memperoleh tambahan tenaga PNS, padahal sebagian besar akan pensiun dalam beberapa tahun kedepan. TVRI sangat membutuhkan Pegawai baru baik PNS maupun PBPNS.

Oleh karena itu TVRI perlu memiliki pembina kepegawaian sendiri, sehingga dapat mengajukan formasi kepada Kementerian PAN RB, dan dapat melakukan rekrutmen PNS maupun PBPNS sesuai profesi dan kompetensi dalam dunia penyiaran.

6. Struktur Organisasi

PP 13 tahun 2005 pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa organisasi TVRI terdiri atas:

1. Dewan Pengawas
2. Dewan Direksi
3. Stasiun Penyiaran
4. Satuan Pengawasan Internal
5. Pusat dan Perwakilan

Struktur Organisasi TVRI tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi penyiaran digital saat ini. Struktur organisasi saat ini hanya untuk penyiaran analog, karena belum ada struktur yang menangani kanal/saluran digital, sehingga kinerjanya hanya diperuntukkan untuk sistem penyiaran analog, padahal telah melakukan penyiaran digital di pusat dan 29 stasiun penyiaran di seluruh Indonesia. TVRI memerlukan penyesuaian struktur organisasi untuk pengelolaan saluran digital dan media baru.

7. Klasifikasi Stasiun Penyiaran

PP 13 tahun 2005 pasal 12 menyatakan:

- a. Stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran TVRI yang berlokasi di Ibukota Negara, Provinsi, Kabupaten/ Kota
- b. Stasiun penyiaran di ibukota Negara menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional dan menyelenggarakan siaran internasional atau siaran luar negeri.

Pasal 13 menyatakan stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan TV publik sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus

yang ditetapkan Dewan Direksi. Pasal 14 menyatakan klasifikasi stasiun penyiaran terdiri atas:

- a. Stasiun tipe A
- b. Stasiun tipe B
- c. Stasiun tipe C

Sesuai penjelasan pasal 12 menyatakan yang dimaksud dengan:

- a. siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
- b. siaran regional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Provinsi sesuai wilayah layanan siaran.
- c. siaran nasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. siaran internasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat yang berada diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pasal 12 tersebut TVRI dapat membentuk stasiun penyiaran nasional dan stasiun penyiaran internasional, atau membuka saluran nasional digital dan saluran internasional digital. Disamping itu meningkatkan klasifikasi stasiun penyiaran agar menjadi lembaga penyiaran yang mampu memproduksi dan menyiarkan konten-konten lokal atau kearifikan lokal baik ke pentas nasional maupun internasional sekaligus juga meningkatkan klasifikasi stasiun penyiaran dari tipe B ke Tipe A dan Tipe C ke Tipe B. Sedangkan tipe C merupakan stasiun rintisan untuk stasiun penyiaran yang baru dibentuk.

Peningkatan klasifikasi stasiun penyiaran juga harus selaras dengan penyelenggaraan saluran digital internasional. Saat ini TVRI telah menyelenggarakan saluran digital nasional, yang merilai siaran nasional analog secara simulcast sedangkan saluran digital internasional belum. Padahal dalam Visi TVRI adalah menjadi Lembaga Penyiaran kelas dunia. Untuk menjawab

tantangan kedepan TVRI sudah saatnya mengalokasikan satu (1) kanal digital untuk menyelenggarakan siaran internasional yang ditujukan untuk masyarakat di luar wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan bahasa internasional. Bentuk siaran internasional yang telah dilakukan adalah *English News Service* (ENS), namun masih dalam skala nasional. Program ENS perlu dikembangkan menjadi siaran internasional termasuk juga program budaya dan pariwisata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa dan promosi budaya dan pariwisata Indonesia ke pentas global.

8. Regulasi TVRI sebagai Operator Multipleksing

TVRI saat ini telah melakukan uji penyiaran digital oleh Asosiasi TV swasta Digital Indonesia (ATSDI), sedangkan kelembagaan yang mengelola multipleksing belum tersedia. Berdasarkan hasil uji coba siaran digital, TVRI telah siap menjadi penyelenggara multipleksing di Indonesia. Untuk itu diperlukan organisasi TVRI yang kuat, dan dinamis sehingga mampu menyelenggarakan penyiaran digital yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sesuai pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 32 tahun 2002 dan Pasal 1 angka 2 PP No 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, serta Pasal 1 angka 2, Pasal 4 dan pasal 5 huruf b PP No 13 tahun 2005 hanya mengatur TVRI sebagai Lembaga penyelenggaraan program siaran saja, sedangkan pengaturan sebagai lembaga penyelenggaraan multipleksing masih dibahas oleh DPR-RI dalam revisi UU penyiaran. Namun sampai akhir tahun 2018 revisi undang-undang tersebut belum dapat dirampungkan. Untuk mempertegas peran dan fungsi lembaga penyiaran publik tidak hanya sebagai lembaga penyelenggaraan siaran tetapi juga lembaga penyelenggaraan multipleksing maka diharapkan revisi undang-undang penyiaran tersebut dapat dirampungkan oleh DPR-RI.

B. Misi Penyiaran TV Publik

1. Perbedaan Peran TV Publik dan Swasta

Misi TV publik secara internasional selalu bersandar pada tiga hal yakni, *to inform, to educate dan to entertain*. Dengan tiga fungsi ini karakter TV publik menjadi berbeda dengan TV swasta. NHK-Jepang membuat sebuah list yang menunjukkan peran TV publik yang amat berbeda dengan TV swasta. Dalam banyak hal terutama keberpihakan terhadap keragaman dan kemajemukan, menjaga nilai-nilai demokrasi, diseminasi informasi, menayangkan program berkualitas sampai kepada informasi kebencanaan adalah peran TV publik lebih menonjol ketimbang peran swasta.

Dalam buku putih NHK (2017) dijelaskan domain TV publik dan swasta yang sama dan memiliki irisan dan beberapa peran yang mutlak menjadi domain TV Publik di antaranya menjamin keragaman dan kemajemukan, mendukung dan mengembangkan demokrasi, menyebarluaskan informasi sampai ke seluruh wilayah. Dengan demikian TV publik mempunyai peran yang berbeda dengan televisi swasta. Peran yang berbeda berimplikasi terhadap penyelenggaraan program siaran masing-masing.

Misi utama TV publik adalah *diversity* dan *plurality* , mendorong dan ikut mengembangkan demokrasi, menyampaikan informasi dalam skala nasional sampai ke wilayah perbatasan, wilayah terluar dan tertinggal (3T), meningkatkan kualitas program siaran dengan menggunakan teknologi terkini, menyampaikan peringatan dini terkait dengan bencana (*early morning disaster system*). Sedangkan TV swasta menyelenggarakan siaran dengan skala terbatas dan lebih berorientasi komersial. Perbedaan peran dan fungsi TV publik dan TV swasta tersebut memerlukan pengelolaan yang berbeda pula.

Tabel 1.1: Perbedaan Peran TV Publik dan Swasta

Peran	Public	Private
Diversity and Plurality	✓	✗
Encouraging us to develop democracy	✓	✗
Spreading information to nation wide	✓	✗
Maintening and developing quality program	✓	✓
Early Warning Disaster System	✓	✗
Funded by Commercial	✗	✓

Televisi Publik dinegara-negara maju seperti BBC Inggris dan NHK Jepang, politik anggaran mereka menunjukkan keberpihakan pada misi dan peran tv publik. Sumber pendanaan mengandalkan peran publik dalam bentuk *license fee*, dan *government grant*. Politik anggaran televisi publik di tiga negara. Bandingkan dengan Indonesia yang sumber-sumber pembiayaanya hanya mengandalkan pemerintah yang tidak besar dan penghasilan komersial yang tidak sebanding dengan penerimaan televisi swasta. Bila dilihat dalam tabel berikut perbandingan anggaran BBC, NHK yang pertahun mencapai 80 triliun rupiah, sementara TVRI kurang dari 1 triliun rupiah, terlihat kemapanan politik anggaran pemerintah Inggris dan Jepang yang memberikan alokasi anggaran yang amat memadai untuk pengembangan TV Publik mereka. TV publik di Indonesia perlu mencari langkah terobosan dalam memenuhi kebutuhan anggarannya yang lebih memadai. Anggaran TVRI saat ini sangat terbatas hanya diperoleh dari APBN yang jumlah tidak sebanding dengan tuntutan pengembangan TV publik yang modern untuk menjadi lembaga penyiaran kelas dunia.

Tabel 1.2: Perbandingan Politik Anggaran Antara TV Publik Internasional dan TVRI

Sumber Keuangan	BBC	NHK	TVRI
License Fees	✓	✓	✗
Government Grants	✓	✓	✓
Commonwealth Grants	✓	✗	✗
Commercial	✓	✓	✓

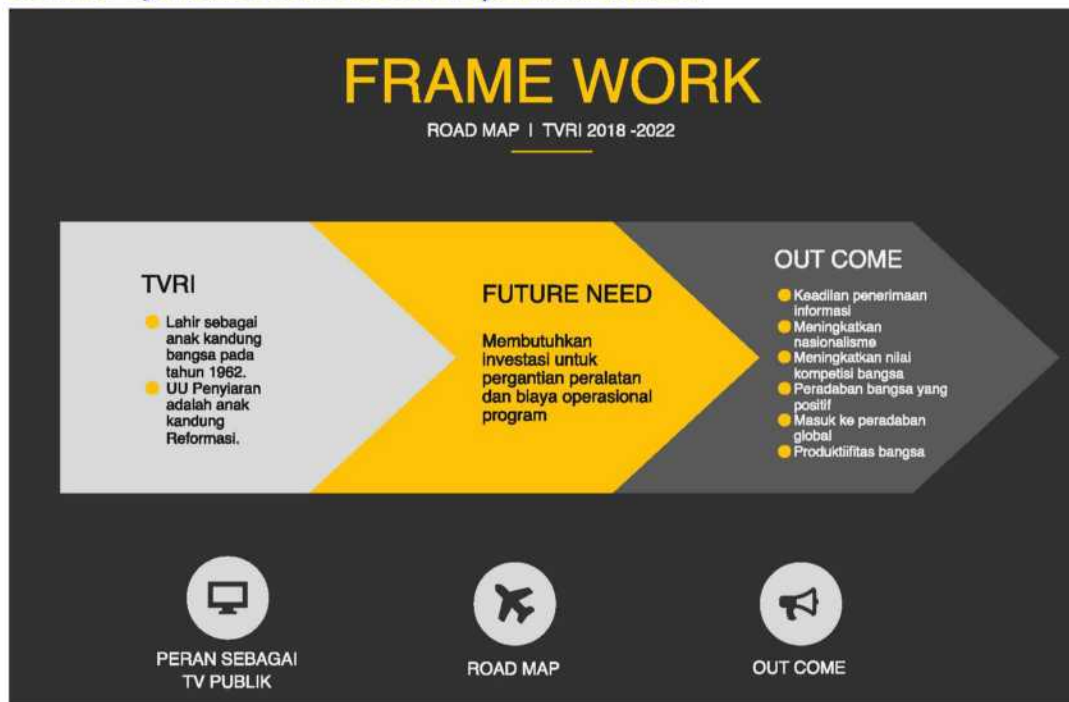
Di luar dana publik melalui iuran televisi, Pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan 450 juta USD per tahun untuk setiap *public broadcasting services* (PBS) mereka. Di Amerika, PBS ada di setiap negara bagian, selain mendapat dana alokasi umum dari pemerintah federal, mereka juga mendapatkan *grant* dari pemerintah negara bagian. Di Canada, alokasi pemerintah federal untuk PBS sebanyak 675 juta USD per tahun untuk *Canadian Broadcasting Corporation* (CBC). Pemerintah Quebec dan Ontario yang memiliki PBS sendiri juga hidup dari iuran publik dan *grant* pemerintah provinsi. Dengan segala keterbatasan anggaran tersebut, secara umum TVRI akan tetap pada tugas dan fungsi utamanya yaitu sebagai televisi publik, sehingga jumlah program berbasis informasi akan lebih banyak dari program-program lain. Untuk memperluas target kepermisaan, juga dibuatlah program-program *general entertainment*, yang tetap mengacu pada nilai-nilai TVRI sebagai lembaga informasi milik publik yang kredibel.

C. Kerangka Pikir Pengembangan TVRI

1. Kerangka Makro

Kebijakan pengembangan TVRI yang disesuaikan dengan Visi dan Misi TVRI yang baru dalam masa kepemimpinan manajemen TVRI periode 2018 – 2022. Kerangka Pemikiran Manajemen TVRI Periode 2017-2022 digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.3: *Frame Work* Televisi Republik Indonesia



TVRI lahir sebagai anak kandung bangsa Indonesia tahun 1962 pada saat penyelenggaraan Asian Games ke 4 di Jakarta. Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia akan menyelenggarakan Asian Games dan melakukan penyiaran Televisi baik secara langsung maupun secara tunda dan berbagai program lainnya. Saat itulah TVRI lahir sebagai anak kandung Bangsa Indonesia. Dalam era reformasi, TVRI juga lahir sebagai anak kandung reformasi yaitu dengan lahirnya UU penyiaran 32 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2005 yang menetapkan TVRI

sebagai Lembaga Penyiaran Publik bersama dengan RRI. Oleh karena itu TVRI sangat membutuhkan investasi negara untuk peremajaan peralatan produksi dan penyiaran yang telah dibangun sejak tahun 1962 dan tahun 1970 an yang masih digunakan sampai saat ini.

3. Penyelenggaraan Asian Games

Tahun 2018 TVRI kembali mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang setelah 56 tahun. Penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 berlangsung sukses, karena Indonesia berhasil meraih sukses dalam penyelenggaraan dan sukses prestasi. Indonesia berhasil meningkatkan peringkat sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.3 : Perolehan Medali Indonesia dalam Asian Games 1998 s/d 2018

NO	TAHUN	PEROLEHAN MEDALI			Jumlah	PERINGKAT
		EMAS	PERAK	PERUNGGU		
1	2018	31	24	43	98	4
2	2014	4	5	11	20	17
3	2010	4	9	13	26	15
4	2006	2	3	15	20	22
5	2002	4	7	12	23	14
1	1998	6	10	11	27	11

Keberhasilan Indonesia meraih prestasi terbaik dalam Asian Games tidak terlepas dari peran TVRI sebagai *Partner Broadcaster* yang menyelenggarakan siaran Asian Games selama 12 jam setiap hari. TVRI menyelenggarakan siaran melalui siaran langsung pembukaan dan penutupan Asian Games, serta berbagai cabang olah raga dan mendapat perhatian masyarakat Indonesia. hal itu dapat dilihat dengan meningkatnya *audiene share* TVRI.

Grafik 1.2 : Perkembangan Audience share TVRI Agustus s/d September 2018



4. Kanal Digital

TVRI saat ini meluncurkan 4 program untuk kanal digital, yaitu

- a. TVRI-1 Program Nasional,
- b. TVRI-2 Program DKI (Metropolitan),
- c. TVRI-3 Program Budaya dan Pariwisata
- d. TVRI-4 Program Olahraga.

Siaran digital tidak hanya di TVRI pusat tetapi juga di seluruh stasiun penyiaran di seluruh Indonesia. Stasiun penyiaran disamping melakukan siaran analog juga melakukan siaran digital lokal dan merilei 3 saluran siaran nasional digital. Walau pengelolaannya belum optimal, namun sebagai uji coba cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat khususnya untuk kualitas penerimaan siaran (ketajaman gambar) Dalam rangka mengubah *image* TVRI agar bisa sejajar dengan TV swasta nasional yang lain. TVRI melakukan pembenahan beberapa aspek antara lain :

a. Tampilan layar

Untuk mengubah tampilan layar (*on air look*) TVRI telah melakukan perubahan *News Look Feature* berupa *Curve Line* sehingga memberikan kesan luas dan mewah. *Color background element* berwarna biru (*color ID* TVRI) dipadu dengan nuansa panorama kota Metropolitan. Unsur menonjol lain adalah penggunaan grafis yang memanfaatkan unsur-unsur geometris yang tajam dikombinasikan dengan warna terang (sesuai tema Semangat

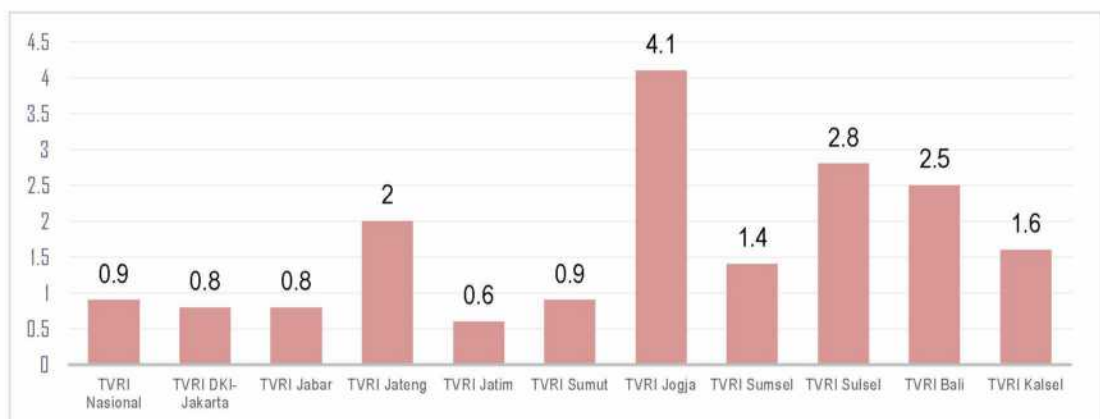
Indonesia). Desain set mempresentasikan kekinian dan mengikuti trend. *Background* menggunakan LED yang berfungsi untuk menampilkan *footage* dan mengesankan *update* teknologi. *Design* pencahayaan seperti tata cahaya dirancang untuk mengubah musik menjadi sebuah entitas fisik sehingga kehadiran musik dapat menciptakan art tidak hanya dalam ruang, tetapi juga gerakan melalui ruang. Sistem pencahayaan yang baik memberikan efek yang besar terhadap kualitas program yang disiarkan baik pada saat siaran langsung maupun rekaman. Itulah sebabnya tampilan layar ditentukan juga oleh sistem pencahayaan yang tepat dengan menggunakan filter cahaya yang tepat pula, dan gerakan cahaya yang disesuaikan irama musik, maupun jenis genre program yang diproduksi.

5. Audience Share

a. Audience Share Siaran Stasiun Penyiaran

Kekuatan TVRI terletak pada siaran konten bermuatan lokal, karena rata-rata *share* stasiun penyiaran daerah cukup baik pada jam siaran lokal, bahkan lebih tinggi dari siaran nasional baik TVRI pusat maupun TV swasta. Program dengan muatan konten lokal setempat lebih unggul pada jam siaran lokal

Grafik 1.3: Performa TVRI Nasional dan TVRI Stasiun Penyiaran Daerah berdasarkan TV Share Tahun 2017





TVRI DI-Yogyakarta mampu mempertahankan TV Share yang relatif stabil setiap minggu dengan kisaran 2.4 sampai dengan 5.2 persen. Pada tahun 2017 mencapai 4.1. Setiap tahun TVRI Yogyakarta mampu mempertahankan share yang cukup tinggi. Berbeda dengan TVRI Sulawesi Selatan pada bulan Juni mampu mencapai performa tertinggi dengan rata-rata pencapaian TV share 6.5 sampai dengan 8.9 persen. Namun pada bulan lainnya performa TVRI Sulawesi Selatan menurun pada kisaran 1.1 sampai dengan 5.3. Kendati demikian Performa TVRI Stasiun Penyiaran Daerah lebih tinggi dari TVRI Nasional yang mencapai 0.9 tahun 2017. Kekuatan TVRI terletak pada TVRI stasiun Penyiaran daerah. TVRI Jawa Tengah sharenya 2, TVRI Sumatera Selatan 1,4. TVRI Kalimantan Selatan 1,6. TVRI Bali 2.5 dan TVRI Sulawesi Selatan 2.8. Dari gambaran tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan TVRI berada pada stasiun penyiaran dengan konten siaran lokal atau kearifan lokal yang mendapat respon penonton yang cukup signifikan.

b. Survei Diluar Wilayah Nielsen

Survei yang dilakukan oleh Nielsen hanya di 11 Kota di Indonesia, yaitu Greater Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Greater Surabaya, Bali, Medan, Palembang, dan Makassar dan Banjarmasin. Sementara Stasiun Penyiaran TVRI berada di 29 provinsi dengan wilayah kerja 34 provinsi. Dengan demikian hasil survey Nielsen bukanlah satu-satunya alat untuk mengukur tingkat performa TVRI Pusat maupun Stasiun TVRI Penyiaran Daerah. Untuk mengetahui performa di luar wilayah survei Nielsen, Pusat Penelitian dan Pengembangan TVRI sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 TVRI telah melakukan penelitian *Audience Share* pada wilayah-wilayah diluar Nielsen. Tujuannya untuk mendapat gambaran penonton TVRI di daerah-daerah.

SURVEI 2015

Penelitian audience Share di lakukan di 4 kota di luar kota Nielsen yaitu :

1. Padang –Sumatera Barat : TV share yang dicapai TVRI Sumatera Barat adalah 5.56.
2. Pekanbaru –Riau : TV share yang diperoleh TVRI Riau adalah 4.27
3. Pontianak –Kalimantan Barat: TV share yang didapat adalah 7.59
4. Manado-Sulawesi Utara: TV share yang dicapai adalah 5.59

Grafik 1.4: AUDIENCE SHARE TVRIHASIL SURVEY PUSLITBANG TVRI TAHUN 2015

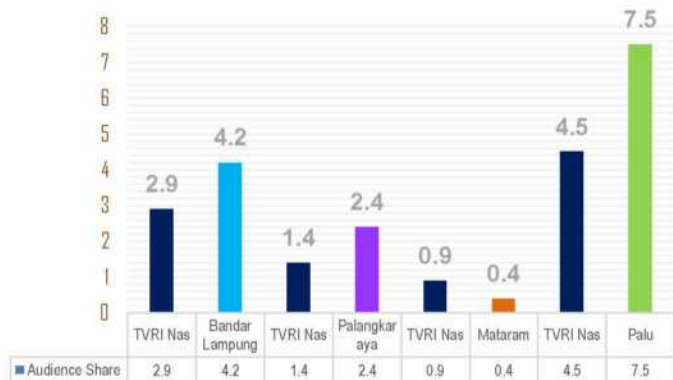


Sumber: Puslitbang TVRI, 2015

SURVEI 2016

Pada jam siaran lokal pukul 15:00 WIB-19:00 WIB, program siaran TVRI Stasiun Lampung, TVRI Stasiun Kalimantan Tengah dan TVRI Stasiun Sulawesi Tengah lebih unggul dibandingkan dengan program siaran TVRI Nasional. Hanya TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat yang performanya lebih rendah dibandingkan dengan TVRI Nasional. Secara umum dapat dikatakan bahwa Program dengan muatan konten lokal memnunyai

Grafik 1.5: AUDIENCE SHARE TVRI NASIONAL & TVRI PENYIARAN DAERAH HASIL SURVEY PUSLITBANG TVRI TAHUN 2016



Sumber: Puslitbang TVRI, 2016

SURVEI 2017

Penelitian *audience share* tahun 2017 di pusatkan pada 3 kota diluar kota survei Nielsen yaitu Jambi, Kupang- Nusa Tenggara Timur dan Ambon- Maluku. Pendekatan dalam penelitian adalah kuantitatif dengan metode penarikan sampel *multistage random sampling*. Instrumen penelitian adalah *Dayly Written Diary* [DWD].

Penarikan sampel dilakukan melalui 4 tahap yaitu Tahap pertama adalah memilih kelurahan/desa, tahap kedua adalah memilih RT, tahap ketiga adalah memilih Keluarga, dan tahap keempat adalah memilih responden (individu). Jumlah responden di Jambi sebanyak 436 orang, Ambon 434 orang dan Kupang 474 orang.

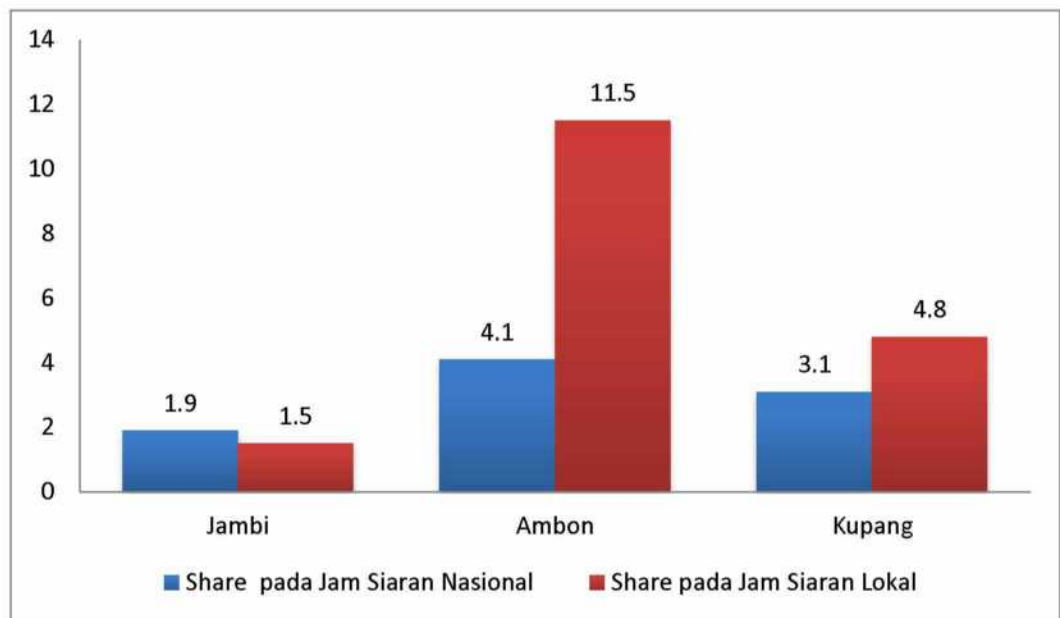
Gambar 1.4: Wilayah Penelitian Puslitbangtahun 2017 Di Jambi, Kupang Dan Ambon



Hasil penelitian memperlihatkan bahwa TV Share TVRI Stasiun Penyiaran Daerah pada 3 wilayah tersebut ternyata lebih tinggi dari hasil Nielsen pada beberapa kota besar di Indonesia. *Share* TVRI Jambi pada jam siaran lokal 1,9 lebih tinggi dari jam siaran lokal 1,5. Sedangkan TVRI Maluku *audience share* siaran lokal jauh lebih tinggi dari siaran nasional mencapai 11,5 dari pada siaran nasional yang hanya mencapai 4,1. TVRI Nusa Tenggara Timur share siaran lokal juga lebih tinggi dari siaran

nasional masing-masing 4,8 dan 3,1. Secara keseluruhan *share* TVRI Maluku masih lebih tinggi dari TVRI Jambi dan TVRI Nusa Tenggara Timur baik pada jam siaran nasional maupun jam siaran lokal. Dengan demikian baik berdasarkan hasil nielsen maupun hasil penelitian diluar wilayah nielsen memperlihatkan bahwa kekuatan TVRI terletak siaran-siaran bermuatan lokal yang tersebar pada 29 stasiun penyiaran di seluruh Indonesia.

Grafik 1.6: Graifk Audience share TVRI Jambi, Maluku dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2017



Tabel diatas memperlihatkan bahwa stasiun penyiaran daerah diluar wilayah nielsen peningkatan *audience share* yang signifikan. Peningkatan *audience share* stasiun penyiaran yang cukup tinggi menunjukkan kekuatan TVRI berada pada stasiun penyiaran dengan kearifan lokalnya. Siaran muatan lokal mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat di daerahnya masing-masing, demikian pula dengan siaran nasional di setiap daerah juga memperoleh respon yang positif. Oleh karena itu TVRI menetapkan sasaran prioritas pada tiga hal yaitu :

- a. peningkatan siaran berita berjaringan,
- b. muatan konten lokal
- c. program untuk segmen anak muda.

Ketiga sasaran tersebut diimplementasikan melalui Pola Acara Terpadu. Sementara itu kebijakan siaran TVRI diorientasikan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa serta pola perilaku yang sejalan dengan identitas dan budaya bangsa yang dinamis, terbangunnya masyarakat Indonesia yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera. Secara operasional sasaran prioritas dimanifestasikan melalui:

- a. peningkatan siaran berita berjaringan dan interaktif serta menyelenggarakan *News Live Cross* dari 29 Stasiun Penyiaran Daerah dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.
- b. peningkatan produksi paket acara bermuatan kearifan lokal setempat untuk memperkuat jati diri bangsa sekaligus meningkatkan peran Stasiun Penyiaran Daerah.

Sasaran prioritas tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pilkada serentak diberbagai daerah tahun 2018 serta Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Sebagai Saluran Pemilu, TVRI sangat konsen menayangkan informasi tentang Pemilu. Kegiatan-kegiatan utama KPU disiarkan secara langsung, seperti Pengumuman Parpol Peserta Pemilu, Penerimaan dan penolakan pendaftaran Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) parpol peserta Pemilu, Penetapan Parpol Peserta Pemilu, Demo peserta parpol yang gagal ikut pemilu ke kantor KPU.

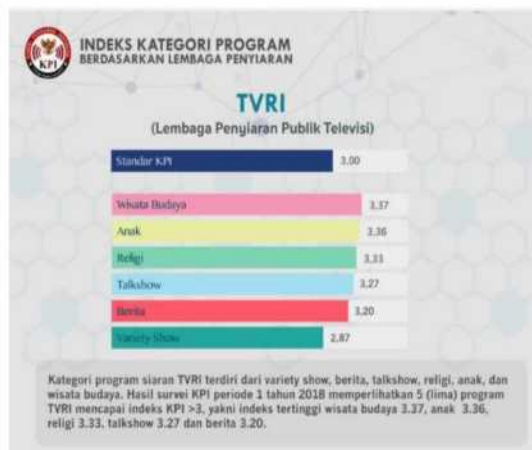
Untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap Calon Anggota Legislatif, TVRI secara khusus mengalokasikan waktu 2 jam per hari menyampaikan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI sejak diumumkan DCS hingga DCT 6. Program ini bekerjasama dengan KPU.

TVRI juga aktif meliput kampanye-kampanye di berbagai penjuru tanah air, penghitungan suara, Pelantikan Anggota DPR-RI, DPD-RI, dan MPR-RI. Demikian pun halnya dalam menyukseskan Pemilu Presiden, TVRI berperan aktif menyebar luaskan informasi Pemilu Presiden, mulai dari pendaftaran calon presiden, penetapan calon, kampanye terbuka, debat Capres dan Cawapres, pemungutan suara dan penghitungan suara hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Untuk Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta Pelantikan Kabibet Kerja, TVRI menayangkan secara langsung.

6. Survei Indeks Kualitas Program Televisi Oleh KPI

Berdasarkan survei indeks kualitas program siaran yang dilakukan oleh KPI terhadap triwulan I tahun 2018 TVRI menempati urutan pertama untuk beberapa program dan melampaui target standar kualitas program yang ditetapkan oleh KPI yaitu 3.

Grafik 1.7 : Survei KPI Katergor Program



Grafik 1.8: Survei KPI Program Anak



Grafik 1.9: Survei KPI Program Berita



Grafik 1.10: Survei KPI Program Talkshow



Kategori program siaran TVRI yang terdiri dari *variety show*, berita, *talkshow*, religi, anak dan wisata budaya, hasil survei KPI periode I tahun 2018 memperlihatkan bahwa 5 (lima) program siaran TVRI memperoleh Nilai Indeks Kualitas Program siaran > 3. Indeks tertinggi adalah wisata budaya 3.37, program Anak 3.36, program religi 3.33, *talkshow* 3.27 dan Berita 3.20. Keberhasilan TVRI melebihi target indeks kualitas program siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia, menunjukkan bahwa Program siaran TVRI memiliki kualitas terbaik dan dapat menjadi referensi publik.

7. Peran Lembaga Penyiaran Publik TVRI

Peran lembaga penyiaran publik antara lain :

1. memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa
2. siaran televisi masih menjadi sarana komunikasi yang sangat dibutuhkan untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. masyarakat di daerah perbatasan sangat kurang mendapat akses terhadap informasi dan hiburan melalui media televisi.

Untuk mendukung peran LPP TVRI maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bappenas, Kementerian Kominfo dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya:
 - a. dukungan TVRI terhadap berbagai rencana kerja pemerintah
 - b. penguatan siaran TVRI diseluruh wilayah Indonesia, di wilayah perbatasan Negara, daerah tertinggal dan daerah terpencil.
 - c. pelaksanaan digitalisasi TVRI
2. TVRI perlu mengkaji sumber-sumber pendanaan yang memungkinkan untuk pelaksanaan tugas dan peran LPP TVRI.
3. TVRI perlu memperkuat komunikasi dan kerjasama kelembagaan dengan pemangku kepentingan, baik dilingkungan eksekutif maupun legislative.
4. melakukan revitalisasi LPP TVRI dalam rangka menyediakan informasi bagi publik secara independen, netral dan tidak memihak dan tidak komersial.
5. revitalisasi TVRI harus dilakukan secara komprehensif meliputi : infrastruktur digital, SDM yang lebih kreatif, inovatif, dan bersifat *entrepreneur* serta kelembagaan yang lebih mantap dalam jangka panjang.

Untuk merealisasikan peran LPP TVRI tersebut, maka salah satu program prioritas adalah digitalisasi penyiaran. Di Indonesia digitalisasi merupakan proyek nasional. *Communication Union (ITU)* menyebutkan beberapa keuntungan yang potensial dapat diperoleh melalui penerapan sistem digital. Lembaga ini berkeyakinan bahwa transisi ke TV digital merupakan kebijakan yang ditujukan untuk lebih mengefisienkan pemanfaatan spektrum frekuensi agar mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

8. Uji Coba Siaran Digital

Sejalan dengan kebijakan digitalisasi penyiaran, TVRI telah melakukan uji coba siaran digital dengan televisi swasta menggunakan MUX TVRI pada kota-kota yang telah terpasang transmisi digital.

Uji coba siaran digital dengan LPS dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Menkominfo RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika dan Penyiaran
- Keputusan Menkominfo RI Nomor 1052 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Uji Coba Siaran Televisi Digital Terrestrial
- Keputusan Menkominfo RI Nomor 2053 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menkominfo RI Nomor 1052 Tahun 2016 Uji Coba Siaran Televisi Digital Terrestrial

Ujicoba siaran digital telah dilakukan pada 29 Stasiun Penyiaran di seluruh Indonesia sejak tahun 2016 dengan hasil yang cukup baik. Hal ini menunjukkan kesiapan TVRI untuk menjadi Multiplekser Siaran Digital di Indonesia.

Tabel 1.4: Uji Coba siaran Digital menggunakan MUX TVRI Tahun 2016 dan 2017

PERIODE I: 9 Juni 2016-9 Desember 2016			Periode II: 9 Desember 2016-9 Juni 2017		
NO	WILAYAH LAYANAN	LPS	NO	WILAYAH LAYANAN	LPS
1	Jabodetabek	12	1	Jabodetabek	12
2	Bandung	6	2	Bandung	6
3	Semarang	2	3	Semarang	4
4	Yogyakarta	3	4	Yogyakarta	7
5	Surabaya	3	5	Surabaya	5
6	Denpasar	1	6	Denpasar	1
7	Medan	3	7	Medan	4
8	Makassar	2	8	Makassar	4
9	Palembang	1	9	Palembang	1
10	Pekanbaru	2	10	Pekanbaru	2
11	Batam	1	11	Batam	1
12	Banjarmasin	2	12	Banjarmasin	2
			13	Sibolga	1
			14	Gorontalo	1
			15	Samarinda	1
			16	Lampung	1
			17	Banda Aceh	1
JUMLAH		38	JUMLAH		54

Tabel 1.5: Perpanjangan Uji Coba Siaran Digital Tahan II tahun 2017

NO.	WILAYAH LAYANAN	PENYEDIA KONTEN			KETERANGAN		
		NAMA PERUSAHAAN	CALL SIGN	MOU	PKS	ON AIR	
1	JABODETABEK	1	PT. Nusantara Media Mandiri	NTV	V	V	V
		2	PT. Inspira Televisi Indonesia	INSPIRA	V	V	V
		3	PT. Cipta Megaswara Televisi	KOMPAS TV	V	V	V
		4	PT. Gramedia Media Nusantara	GRAMEDIA	V	V	V
		5	PT. Detik TV Indonesia	CNN	V	V	V
		6	PT. TVMU Surya Utama	TVMU	V	V	V
		7	PT. Net Mediatama Televisi	NET	V	V	V
		8	PT. Media Inti Televisi Nusantara	TEMPO TV	V	V	V
		9	PT. Duta Anugerah Indah	DAAI	V	V	V
		10	PT. Badar Televisi Media Persada	BADAR TV	V	V	V
		11	PT. Merah Putih Satu Visi	OPUS TV	V	V	V
		12	PT. Indonesia Visual Televisi Serang	INDONESIA TV	V	V	V
TOTAL JAKARTA (12 PENYEDIA KONTEN)							

NO.	WILAYAH LAYANAN	PENYEDIA KONTEN			KETERANGAN		
		NAMA PT	CALL SIGN	MOU	PKS	ON AIR	
2	BANDUNG	13	PT. Nusantara Media Mandiri Parahyangan	NTV	V	V	V
		14	PT. Inspira Televisi Indonesia	INSPIRA	V	V	V
		15	PT. Detik TV Indonesia	CNN	V	V	V
		16	PT. Bandung Persada Tivi Digital	BP TV	V	V	V
		17	PT. Pasundan Utama Televisi	KOMPAS	V	V	V
		18	PT. Televisi Anak Bandung	NET TV	V	V	V
TOTAL BANDUNG (6 PENYEDIA KONTEN)							
3	YOGYAKARTA	19	PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta	NTV	V	V	V
		20	PT. Duta Inspirasi Indonesia	GRAMEDIA	V	V	V
		21	PT. Mitra Televisi Yogyakarta	NET TV	V	V	V
		22	PT. Inspira Media Televisi	INSPIRA	V	V	V
		23	PT. Indonesia Visual Televisi Yogyakarta	INDONESIA TV	V	V	V
		24	PT. Tegar TV Yogyakarta	TEGAR TV	V	V	V
		25	PT. Terang Abadi Digital Satu Televisi	TATV	V	V	V
TOTAL YOGYAKARTA (7 PENYEDIA KONTEN)							

NO.	WILAYAH LAYANAN	PENYEDIA KONTEN			KETERANGAN		
			NAMA PT	CALL SIGN	MOU	PKS	ON AIR
4	SURABAYA	26	PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta	NTV	V	V	V
		27	PT. Inspira Televisi Indonesia	INSPIRA	V	V	V
		28	PT. Detik TV Indonesia	CNN	V	V	V
		29	PT. Televisi Anak Surabaya	NET TV	V	V	V
		30	PT. Indonesia Visual Televisi Serang	INDONESIA	V	V	V
TOTAL SURABAYA (5 PENYEDIA KONTEN)							
5	SEMARANG	31	PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta	NTV	V	V	V
		32	PT. Inspira Televisi Indonesia	INSPIRA	V	V	V
		33	PT. Indonesia Visual Televisi Semarang	INDONESIA	V	V	V
		34	PT. Industri Televisi Semarang	NET TV	V	V	V
TOTAL SEMARANG (4 PENYEDIA KONTEN)							
6	DENPASAR	35	PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta	NTV	V	V	V
TOTAL DENPASAR (1 PENYEDIA KONTEN)							

Tabel 1.6: Lanjutan Uji Coba Siaran Digital tahan II Tahun 2017

NO.	WILAYAH LAYANAN	PENYEDIA KONTEN			KETERANGAN		
			NAMA PT	CALL SIGN	MOU	PKS	ON AIR
7	MEDAN	36	PT. Nusantara Media Mandiri Tapanuli	NTV	V	V	V
		37	PT. Inspira Medan Mulia	INSPIRA	V	V	V
		38	PT. Indonesia Visual Televisi Serang;	INDONESIA	V	V	V
		39	PT. Digital Inspirasi Indonesia	GRAMEDIA	V	V	STOP
TOTAL MEDAN (4 PENYEDIA KONTEN)							
8	MAKASSAR	40	PT. Nusantara Media Mandiri	NTV	V	V	V
		41	PT. Sunu Network Broadcast Televisi	CELEBES	V	V	PROSES
		42	PT. Inspira Televisi Indonesia	INSPIRA	V	V	V
		43	PT. Fajar Makassa Televisi	FAJAR TV	V	V	PROSES
TOTAL MAKASSAR (4 PENYEDIA KONTEN)							
9	PALEMBANG	44	PT. Nusantara Media Mandiri Tapanuli	NTV	V	V	V
TOTAL PALEMBANG (1 PENYEDIA KONTEN)							
10	PEKANBARU	45	PT. Nusantara Media Mandiri Tapanuli	NTV	V	V	V
		46	PT. Inspira Televisi Indonesia	INSPIRA	V	V	V
TOTAL PEKANBARU (2 PENYEDIA KONTEN)							
11	BATAM	47	PT. Nusantara Media Mandiri Batam	NTV	V	V	V
TOTAL DENPASAR (1 PENYEDIA KONTEN)							

NO.	WILAYAH LAYANAN	PENYEDIA KONTEN			KETERANGAN		
		NAMA PT	CALL SIGN	MOU	PKS	ON AIR	
12	BANJARMASIN	48	PT. Nusantara Media Mandiri	NTV	V	V	V
		49	PT. Inspira Multi Talenta	INSPIRA	V	V	V
TOTAL BANJARMASIN (2 PENYEDIA KONTEN)							
13	SIBOLGA	50	PT. Nusantara Media Mandiri Tapanuli	NTV	V	V	BELUM
TOTAL SIBOLGA (1 PENYEDIA KONTEN)							
14	GORONTALO	51	PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta	NTV	V	V	BELUM
TOTAL GORONTALO (1 PENYEDIA KONTEN)							
15	SAMARINDA	52	PT. Nusantara Media Mandiri Parahyangan	NTV	V	V	BELUM
TOTAL SAMARINDA (1 PENYEDIA KONTEN)							
16	LAMPUNG	53	PT. Nusantara Media Mandiri Batam	NTV	V	V	BELUM
TOTAL LAMPUNG (1 PENYEDIA KONTEN)							
17	ACEH	54	PT. Nusantara Media Mandiri Tapanuli	NTV	V	V	BELUM
TOTAL ACEH (1 PENYEDIA KONTEN)							

Keterangan

WILAYAH LAYANAN	17	KOTA
JUMLAH LPS (MOU)	33	LPS
JUMLAH PKS	54	PKS/WILAYAH LAYANAN
ON AIR	46	PKS/WILAYAH LAYANAN

9. Transmisi Digital dan Analog

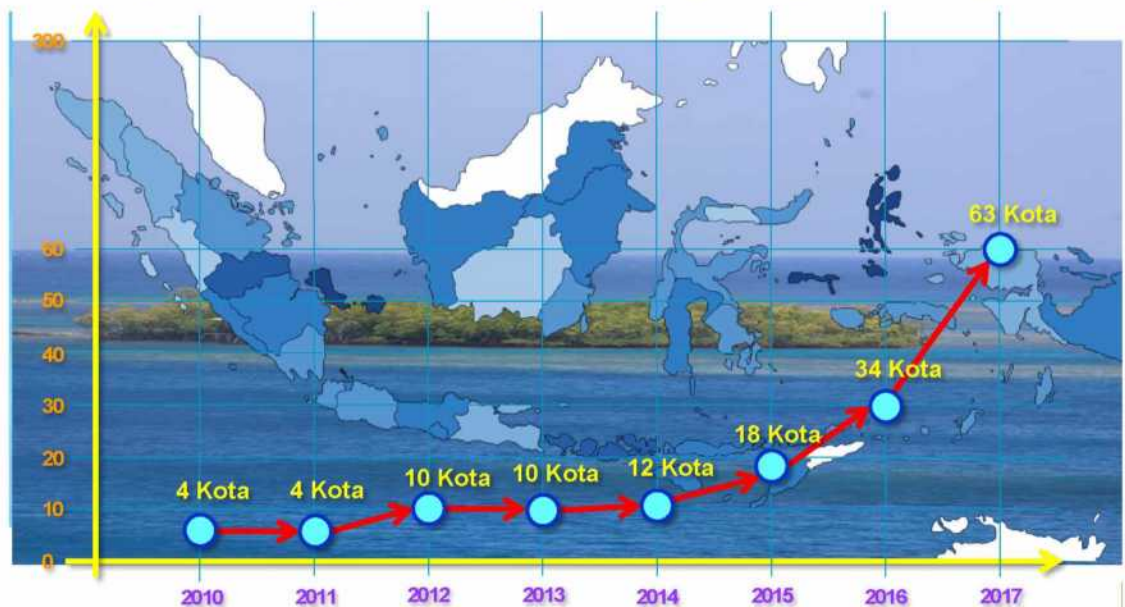
TVRI memiliki jumlah pemancar yang lebih besar dibandingkan dengan televisi swasta, ini berarti jangkauan siaran TVRI lebih luas dari televisi swasta di Indonesia. Pemancar TVRI terdiri dari pemancar analog dan digital dengan total pemancar secara keseluruhan sebanyak 378 pemancar.

Tabel 1.7: Perbandingan Jumlah Pemancar TVRI dengan TV Swasta



sementara itu jumlah pemancar digital TVRI saat ini telah tercatat sebanyak 68 pemancar yang telah dipasang pada 63 kota di Indonesia sampai dengan tahun 2017.

Gambar 1.5: Perkembangan Siaran Digital TVRI sampai dengan Tahun 2017



10. Penyebaran Berita Hoax

Berita Hoax di Indonesia mencapai puncak pada saat kontestasi pemilihan presiden 2014, berlanjut hingga ke Pilkada DKI dan hingga kini. Masyarakat lalu terdiktomi hingga kini pada dua kubu. Semua kebijakan pemerintah saat ini ditanggapi dan selalu disertai dengan versi hoaknya dari kubu yang berseberangan.

Sementara itu, media mainstream yang diharapkan menjadi penyeimbang ikut memviralkan berita-berita yang berasal dari sosial media. Konsumsi berita hoax dan *fake news* saat ini dipercaya melebihi informasi yang bisa disajikan oleh media arus utama. Pada kondisi ini, posisi TVRI menjadi penting, karena hanya TVRI yang saat ini melayani daerah rural di Indonesia. Hanya TVRI yang dimandatkan untuk melayani daerah 3T yakni, terdepan, terluar dan terbelakang. Konsumsi media sosial di rural area dari hasil FGD dan penelitian Media Perbatasan oleh Universitas Indonesia (2018) menyebutkan bahwa TVRI masih menjadi acuan masyarakat di area 3T. Mereka, karena keterbatasan layanan internet, tidak terlalu terpengaruh oleh produksi berita hoax yang banyak menyebar pada spektrum media sosial.

Kabar baik bisa dilihat dari riset Edelman Trust Barometer Global Report 2018, yang mengatakan terdapat sebanyak 5% peningkatan jumlah kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap *media mainstream*. Sebaliknya, rakyat Indonesia justru menurunkan nilai kepercayaan mereka terhadap media sosial pada tahun ini sebanyak 4%. Melihat trend peningkatan kepercayaan terhadap *media mainstream* ini maka TVRI sebagai TV publik dapat didorong terus pada upaya penyebarluasan informasi positif dan membangun.

D. Isu-Isu Strategis

1. Dominasi Penyiaran Swasta

Sejak regulasi siaran swasta diberlakukan tahun 1989, maka perlahan-lahan terjadi pergeseran penonton dan sumber-sumber kapital bagi industri televisi yang sebelumnya berada di TVRI lalu beralih ke lembaga penyiaran swasta (LPS). Kebijakan menteri penerangan pada tahun 1990 yang melarang TVRI beriklan dan dengan kompensasi mendapatkan 15 persen total penerimaan LPS TVRI berdampak pada operasional TVRI seperti sebelumnya. Apalagi pada kenyataannya beberapa LPS tidak memenuhi kewajibannya. Iklan televisi, sebagai sumber pendapatan lainnya yang dikelola oleh PT Mekatamaraya juga tidak jelas cara pemungutan dan pemanfaatannya. Akhirnya TVRI hanya hidup dari APBN dan sedikit sekali dari pendapatan komersial.

Sementara itu LPS saat ini sudah mendominasi industri televisi. Sebanyak 145 triliun dari total belanja iklan media tahun 2017, menurut Nielsen, 80 persen atau sekitar 120 Triliun itu dikuasai oleh 10 LPS. Tiga besar stasiun saat ini RCTI, SCTV dan Indosiar mampu meraup pendapatan dari belanja iklan televisi di kisaran masing-masing 14 sampai 20 triliun sepanjang 2017, bahkan ada satu grup media yang menguasai sekitar 30 persen penonton atau belanja iklan nasional.

Dengan jumlah pendapatan iklan media televisi sebesar itu, televisi swasta mendominasi seluruh belanja iklan nasional. Sementara, TVRI hanya memperoleh porsi kurang dari 1 persen saja. Jika dibandingkan di negara-negara maju dominasi pendapatan komersial justru sebagian besar didapat oleh televisi publik. Oleh karena itu kekuatan pendanaan TV publik harus diperkuat melalui penguatan regulasi untuk mengembalikan peran dan

fungsi TV publik di Indonesia. jika tidak didominasi TV swasta terhadap TV publik akan terus berlangsung tanpa dapat dibendung oleh TV publik.

2. Stasiun Penyiaran

TVRI saat ini telah memiliki 29 stasiun penyiaran di Indonesia dengan penyiaran nasional di Kantor pusat. Dengan demikian TVRI telah memiliki 30 stasiun penyiaran baik secara nasional maupun regional. Stasiun penyiaran memiliki 3 tipe stasiun klasifikasi stasiun yaitu tipe A, tipe B dan tipe C. Tipe A berjumlah 11 stasiun, tipe B sebanyak 13 stasiun dan tipe C berjumlah 5 stasiun. Setiap stasiun menyelenggarakan siaran analog lokal selama 4 jam, dan siaran lokal digital disesuaikan dengan kemampuan stasiun penyiaran tersebut. Disamping itu melakukan rielei siaran nasional saluran digital nasional yaitu :

- a. TVRI 1 : saluran digital nasional
- b. TVRI 3 : saluran digital budaya dan pariwisata
- c. TVRI 4: saluran digital olah raga (*sport HD*)

Sementara TVRI pusat menyelenggarakan siaran nasional analog selama 22 jam setiap hari. Siaran nasional analog juga disiarkan pada saluran siaran nasional juga selama 22 jam. Sedangkan untuk saluran olah raga saat ini juga telah menyelenggarakan siaran olah raga premium dari berbagai event olah raga bertaraf nasional maupun internasional. Siaran premium oleh disiarkan dalam saluran olah raga (*sport HD*) dengan kualitas *high definition*. Konten siaran seperti olah raga sepak bola internasional dari liga italia dan liga inggris. Jumlah stasiun penyiaran secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 1.8: Jumlah Stasiun Penyiaran TVRI.

1 Stasiun Penyiaran Nasional !		
29 TVRI Stasiun Penyiaran Daerah!		
68 Kota Jaringan Siaran Digital !		
1. Stasiun Nasional!	14. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur!	27. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat!
2. TVRI Stasiun Aceh!	15. TVRI Stasiun Bengkulu!	28. TVRI Stasiun Sulawesi Barat!
3. TVRI Stasiun Sumatera Utara!	16. TVRI Stasiun Kalimantan Selatan!	29. TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara!
4. TVRI Stasiun Sumatera Selatan!	17. TVRI Stasiun Kalimantan Barat!	30. TVRI Stasiun Bangka Belitung!
5. TVRI Stasiun Jawa Barat!	18. TVRI Stasiun Kalimantan Tengah!	
6. TVRI Stasiun Jawa Tengah!	19. TVRI Stasiun Sulawesi Utara!	
7. TVRI Stasiun Jawa Timur!	20. TVRI Stasiun Maluku!	
8. TVRI Stasiun DI-Yogyakarta!	21. TVRI Stasiun Riau!	
9. TVRI Stasiun Kalimantan Timur!	22. TVRI Stasiun Sulawesi Tengah!	
10. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan!	23. TVRI Stasiun Sumatera Barat!	
11. TVRI Stasiun DKI-Jakarta-Banten!	24. TVRI Stasiun Papua!	
12. TVRI Stasiun Bali!	25. TVRI Stasiun Lampung!	
13. TVRI Stasiun Jambi!	26. TVRI Stasiun Gorontalo!	

3. Edukasi dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi

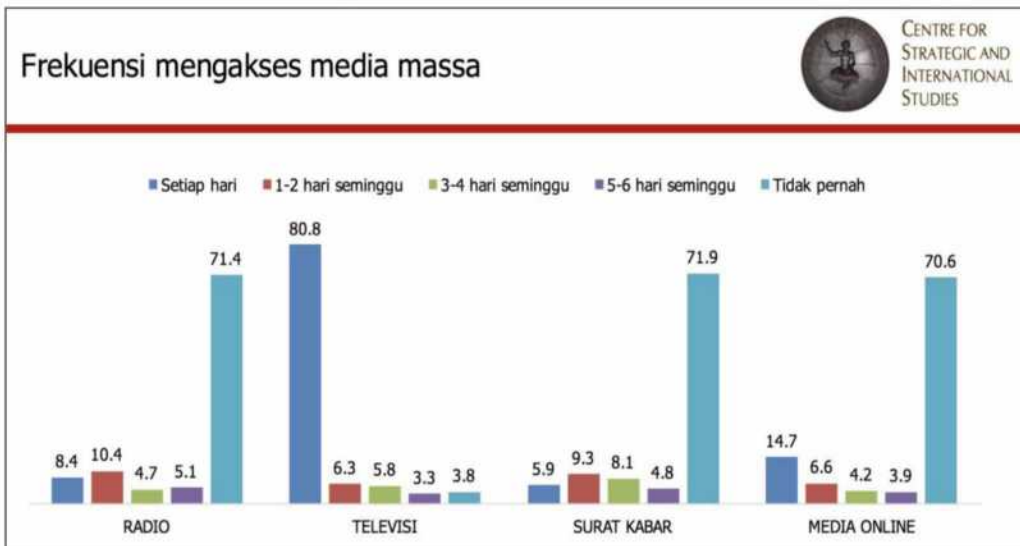
Saat ini secara perlahan langkah-langkah perbaikan siaran berita dari TVRI sudah dilakukan dengan mengedepankan faktor kecepatan, siaran langsung dan *on air look presentation* yang baru. Di program *features* dan *current affair* sudah diproduksi pula beberapa program baru antara lain morning show dan beberapa program bincang-bincang yang lebih ringan.

Pada tahapan berikutnya, TVRI harus melangkah dengan penguatan pada konten edukasi yang di dunia televisi publik sering disebut *knowledge* atau siaran ilmu pengetahuan. Biasanya programnya berbasis dokumenter yang *timeless* sering disebut *backbonecontent*. Sebab dari produksi dokumenter ini kelak bisa diproduksi berbagai varian produksi lainnya untuk keperluan short program dan content digital lainnya. Tidak ada satu station televisi di Indonesia yang memiliki *positioning* pada *knowledge documentary* dan ini harus dilirik. Dari sisi bisnis, konten-konten dokumenter juga dapat menopang kinerja keuangan karena sangat bisa dijual secara global.

Sikap TV Publik yang netral dan independen, membuat TVRI menjadi satu acuan bagi masyarakat untuk melihat informasi pemilu dan media demokrasi lainnya. Politik TVRI adalah politik negara, sehingga TVRI dilarang memiliki afiliasi dengan partai politik atau tokoh politik tertentu.

TVRI tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi oleh kekuatan-kekuatan partai politik untuk memuat atau tidak memuat berita dan program tertentu. Sikap ini menguntungkan TVRI, juga menguntungkan bagi negara untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam demokrasi utamanya pemilihan umum. Sikap netral dan independen harus terus dipertahankan oleh TV publik di Indonesia sehingga dapat memainkan peranan yang strategis dalam mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi di Indonesia, sehingga semakin tinggi partisipasi publik mencerminkan semakin tinggi pula peran TVRI sebagai sumber referensi publik di Indonesia.

Grafik 1.11 : Frekuensi Mengakses media



Dari survei Nasional yang dilakukan CSIS tahun 2017 mengenai preferensi mengakses informasi melalui media massa, terutama berkaitan dengan informasi pemilu, televisi masih menjadi pilihan. 80,8 persen responden masih melihat tv setiap hari disusul media online, radio lalu disusul surat

kabar. Sebuah alasan yang kuat bahwa televisi masih memainkan peranan penting dalam penyebarluasan informasi pembangunan.

Berkaitan dengan posisi TVRI dalam Pemilihan Umum, statuta TVRI jelas memberikan rambu bahwa lembaga penyiaran publik harus netral dan independen. Netral memberikan makna tidak memihak. Kepentingan public di atas segalanya. Dalam FGD Lembaga Riset Provetik (2018) terhadap persepsi dan perilaku penonton televisi terungkap beberapa pandangan sebagai berikut:

Seluruh partisipan di tiga kota sepakat bahwa kondisi pertelevisian Indonesia hari ini sangat mengkhawatirkan.

- a) mereka mempersoalkan acara hiburan yang lebih mengedepankan eksploitasi seseorang ketimbang pendidikan
- b) mereka juga mengeluhkan banyaknya stasiun TV di Indonesia yang mempertontonkan bias politiknya secara vulgar
- c) kondisi ini akhirnya mendorong para partisipan untuk mencari alternatif hiburan, umumnya di media sosial dan layanan streaming
- d) akan tetapi, para partisipan juga merindukan masa dimana televisi dapat menjadi sumber hiburan andalan

Temuan paling utama dari FGD adalah bahwa TVRI memiliki potensi untuk menjadi penyelamat pertelevisian Indonesia karena:

- a) para partisipan meyakini bahwa konten TVRI sesungguhnya lebih baik dibandingkan TV swasta pada umumnya
- b) mereka meyakini bahwa masyarakat Indonesia terlalu cepat 'menilai dari sampulnya' ketika memandang TVRI

- c) apabila masyarakat dapat mengesampingkan sampul TVRI yang tua dan kumal, mereka akan mendapati sebuah oase di tengah gerahnya pertelevisian Indonesia
- d) oleh karenanya, para partisipan meyakini bahwa kunci keberhasilan TVRI adalah memperbaiki atau merubah sampulnya yang sudah kusam tersebut

4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mewujudkan visi TVRI menjadi lembaga penyiaran berkelas dunia melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang memotivasi, memberdayakan, menguatkan persatuan, menjaga keberagaman dan meningkatkan martabat bangsa perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki profesionalitas, berintegritas, kreatif dan inovatif.

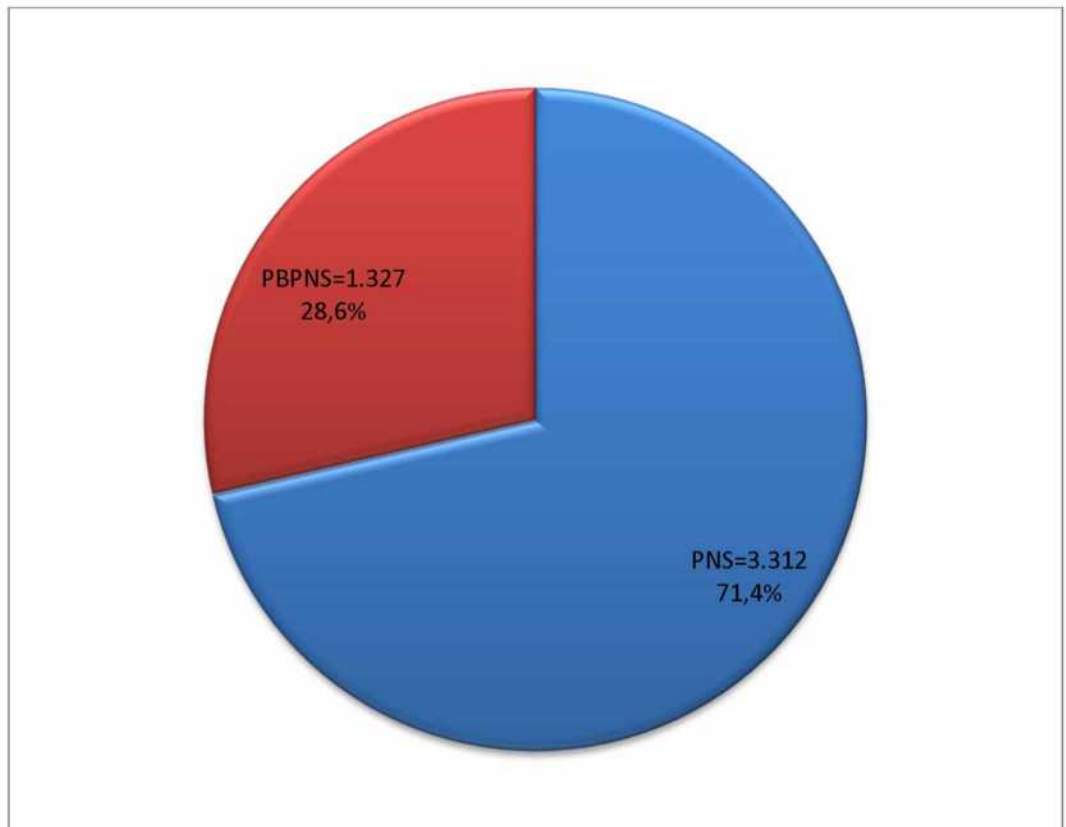
Sumber Daya Manusia TVRI saat ini terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Bukan PNS (PBPNS) yang secara kuantitas, kualitas dan integritas serta usia belum memenuhi harapan untuk mewujudkan visi TVRI. Hal lain yang juga menjadi kendala adalah terbatasnya kewenangan Dewan Direksi dalam melakukan penambahan Sumber Daya Manusia. Penambahan kebutuhan sumber daya manusia yang bersumber dari PNS tidak dapat diajukan langsung oleh TVRI melainkan harus melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan penambahan Sumber Daya Manusia yang bersumber dari PBPNS dan atau Tenaga Profesional harus mendapat izin dari Kementerian Keuangan RI. Disamping itu payung hukum yang dimiliki TVRI dalam melakukan pembinaan SDM belum sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Direksi TVRI, dikarenakan tidak memiliki Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina Kepegawaian berada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan uraian di atas, TVRI sangat membutuhkan :

- a. Penambahan Pegawai baru baik PNS maupun PBPNS dan atau Tenaga Profesional. Jumlah Pegawai TVRI saat ini : 4639 orang, terdiri atas:





- PNS : 3.312 orang
- PBPNS : 1.327 orang

Data jumlah dan kelompok usia PNS dan PBPNS di LPP TVRI sampai dengan 1 Agustus 2018 adalah sebagai berikut:

Grafik 1.12 : Kondisi SDM TVRI



Tabel 1.9: Usia PNS/PBPNS TVRI menurut kelompok usia.

USIA	26-30 TAHUN	31-40 TAHUN	41-50 TAHUN	51-60 TAHUN
				
PNS	7	156	1205	1944
PBPNS	495	656	51	25
TOTAL	502	812	1356	1969

Berdasarkan Analisa Beban Kerja didapatkan rencana kebutuhan sumber daya manusia (*Man Power Planning*) sebanyak : 5.642 orang. Dengan demikian untuk tahun 2018 dibutuhkan penambahan sumber daya manusia sebanyak : 1003 orang. Mengingat Pegawai TVRI yang akan pensiun Tahun 2019 s.d tahun 2024 sebanyak 1.716 orang, dengan perincian:

- a. tahun 2019 : 296 orang;
- b. tahun 2020 : 324 orang;
- c. tahun 2021 : 345 orang;
- d. tahun 2022 : 267 orang
- e. tahun 2023 : 275 orang
- f. tahun 2024: 209 orang

Dengan demikian tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 diperkirakan TVRI membutuhkan penambahan pegawai sebanyak 1.003 ditambah dengan jumlah pensiun 1.716 menjadi 2.719 orang. Maka penambahan kebutuhan sumber daya manusia pada tahun 2019 s.d. tahun 2024 adalah sebanyak jumlah pegawai yang pensiun (*Zero Growth*), yaitu 2.719 orang. Selanjutnya adalah adanya Pejabat Pembina Kepegawaian sendiri, sehingga dapat mengajukan formasi kepada Kementerian PAN RB, dan dapat melakukan rekrutmen PNS ,PBPNS, maupun tenaga profesional sesuai profesi dan kompetensi dalam dunia penyiaran.

5. Infrastruktur

Saat ini siaran *Terrestrial Free to Air* TVRI dijalankan dengan dua sistem yaitu dengan Analog UHF dan VHF Terrestrial di 248 lokasi dan Digital Terrestrial Format DVBT2 di 63 lokasi. Dari 248 lokasi Pemancar Analog terdapat 54 Pemancar dengan sistem *Dual Cast* (Analog & Digital DVBT2) namun karena belum dilengkapi dengan *Head End* maka Pemancar tersebut dioperasikan dengan sistem Analog. Di tahun 2019 ada rencana bantuan dari Kominfo untuk mendigitalkan 10 lokasi dari 54 pemancar *Dual Cast* tersebut. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa untuk menuju ke era Digital Terrestrial, TVRI saat ini adalah Stasiun yang paling siap dibandingkan dengan *TV Station* nasional lainnya. Walaupun TVRI harus tetap mempersiapkan diri untuk menjadi Mux Operator handal dan secara professional yang dapat memberikan *Services Level Guarantee* sesuai kebutuhan sekaligus dapat meyakinkan para mitra kerja.

Untuk menuju menjadi Station Televisi berkelas Dunia dari aspek teknologi dan infrastruktur tentunya TVRI harus melalui tahapan-tahapan yang harus dicapai antara lain:

Tahun 2018 Mayoritas fokus pada pemulihan dan peningkatan kualitas tampilan layar *greater Jakarta* yang memiliki *potential audience share* 59% dari total viewer seluruh Indonesia menurut data survei Nielsen di 11 kota besar. Dalam hal ini telah dilakukan perbaikan pemancar analog *Great Jakarta* dengan kekuatan *power* dari 30kW menjadi 80 – 100kW. Disamping itu telah dilakukan digitalisasi di 3 Studio di kantor pusat (Sto 5; 7; dan Auditorium) dengan kualitas Digital HD. Mempersiapkan fasilitas untuk mendigitalkan semua *file* yang ada dengan menyempurnakan MAM sistem (*Media Asset Management System*) dengan melakukan *upgrade capacity archaiving* dari 30G menjadi 375G.

Tahun 2019 Meningkatkan kualitas tampilan layar di kota besar diluar *Greater Jakarta* dan melakukan digitalisasi di beberapa kota tertentu, Hal ini juga bertujuan mempersiapkan diri menghadapi ASO yang sewaktu-waktu akan diputuskan oleh Pemerintah dan juga mempersiapkan diri sebagai Mux Operator Terrestrial untuk menampung konten dari mitra kerja. Disamping hal tersebut diatas, TVRI akan mempersiapkan platform dan infrastruktur terkait kebutuhan distribusi konten melalui IP / OTT dengan menyewa CDN (*Content Delivery Network*). Dengan demikian di tahun 2019 TVRI sudah siap dalam mengakomodir kebutuhan multi platform dan *multi device* dalam hal konten distribusi. Tidak hanya distribusi secara konvensional tetapi dapat diakses melalui *gadget* atau *smart phone*. Kebutuhan akan sarana peningkatan kompetensi juga akan dilakukan di 2019 yaitu adanya rencana peremajaan peralatan di Pusdiklat dengan menggunakan system peralatan berteknologi 4K. Tujuannya adalah agar TVRI dapat menjadi *Benchmark* bagi *TV Station* lain dalam hal fasilitas pengembangan dan peningkatan kompetensi karyawannya.

International Telecommunication Union (ITU) melalui *The Geneva 2006 Frequency Plan (GE06) Agreement* telah menetapkan bahwa tanggal 17 Juni 2015 merupakan batas waktu bagi negara-negara untuk melakukan migrasi dari penyiaran TV analog ke penyiaran TV digital. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi ketentuan tersebut,

namun hal ini menjadi acuan para pabrikan televisi untuk mengurangi produksi perangkat penyiaran analog, sehingga akan menjadi langka, sehingga sulit ditemukan dipasaran dalam beberapa tahun yang akan datang. Teknologi penyiaran analog akan semakin mahal dan secara bertahap akan menjadi usang.

Dilain pihak spektrum frekuensi yang merupakan barang publik dan memiliki sumber daya yang terbatas, penggunaannya menjadi sangat kritikal dalam penyiaran analog. Oleh karena itu solusinya tidak lain adalah dengan mengimplementasikan penyiaran digital di Indonesia. Dalam penyiaran digital penggunaan frekuensi akan lebih efisien, sehingga terjadi penghematan penggunaan frekuensi yang cukup besar.

Indonesia sudah memulai program migrasi analog ke TV digital sejak tahun 2003, sehingga sudah lebih dari sepuluh tahun melakukan uji coba siaran digital melalui TVRI. Saat ini banyak permohonan izin baru penyelenggara siaran, namun kanal frekuensi tidak tersedia, sehingga penyiaran digital menjadi solusi untuk mengakomodir permohonan izin baru tersebut.

Jika pemerintah tidak mengimplementasikan penyiaran digital, potensi keuntungan yang hilang akan sangat besar dan potensi kerugian yang timbul di masyarakat juga akan jauh lebih besar karena masyarakat tidak dapat menerima informasi dengan kualitas yang lebih baik. Bahkan jika pabrikan tidak lagi memproduksi perangkat penyiaran analog, masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan transisi penyiaran analog ke digital, sehingga pada saat terjadi analog *switch off*, maka Indonesia sudah siap untuk memasuki era digital.

Transisi sistem penyiaran dari analog ke digital menimbulkan perubahan model bisnis penyiaran yang berbeda baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam penyiaran analog Lembaga Penyiaran melaksanakan seluruh kegiatan penyiaran,

sebagai penyelenggara program siaran, pemegang hak penggunaan frekuensi, penyelenggara infrastruktur dan penyedia menara. Dalam sistem digital terdapat pemisahan kegiatan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran. Penyelenggaraan program siaran diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPS), sedangkan dalam penyelenggaraan penyiaran multipleksing dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPM), sebagai penyedia menara, pemegang hak pemanfaatan frekuensi dan penyelenggaraan infrastruktur multipleksing.

Prinsip dasar dari migrasi analog ke digital adalah sebagai berikut:

- a) Jaminan penyaluran informasi melalui penyiaran televisi ke pemirsa tidak terputus.
- b) Jaminan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tentang tidak terganggunya kegiatan penyiaran walau dalam masa transisi (*simulcast*)
- c) Pada masa transisi LPP dan LPS yang sudah beroperasi memiliki prioritas awal untuk bersiaran di era digital.
- d) Pemerintah mengkaji kebijakan subsidi *Set Top Box* ke masyarakat agar tepat sasaran.

Didalam merumuskan model bisnis TVRI perlu juga memperhatikan transisi model bisnis dari analog ke digital terutama terkait dengan prinsip-prinsip migrasi penyiaran analog ke digital. Hal ini penting sehingga tidak terjadi kekosongan informasi kepada masyarakat pada saat terjadi analog *switch off* secara total diseluruh Indonesia. Sedangkan dalam struktur organisasi penyelenggara *multiplexing* dapat mengelola 1 sampai 12 saluran digital, termasuk TVRI.

6. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan

keahlian serta profesi masing-masing. Peningkatan keterampilan dan profesi pegawai dapat merespon perkembangan dan perubahan terurama dalam migrasi siaran analog ke siaran digital. Diklat juga dilaksanakan untuk meningkatkan sikap kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan citra TVRI sebagai TV Publik di Indonesia. Tujuan tersebut diimplementasikan dengan menyelenggarakan diklat profesi meliputi :

- a. bidang jurnalistik
- b. bidang produksi
- c. bidang teknik
- d. bidang manajemen
- e. bidang umum

Disamping itu Pusdiklat juga menyelenggarakan *in house training* pada beberapa stasiun penyiaran di Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi profesi pegawai di Stasiun penyiaran. *In house training* dilakukan tanpa harus menunggu jadwal pelaksanaan diklat di Jakarta. Dengan *in house training* dapat mempercepat peningkatan jumlah SDM TVRI yang memperoleh pendidikan profesi.

Tabel 1.10 : Kegiatan Diklat yang dilaksanakan Tahun 2017

NO	NAMA DIKLAT	PELAKSANAAN	PESERTA	ANGGARAN	INSTRUKTUR
BIDANG JURNALISTIK					
1	Video Jurnalistik	17 Jul s/d 4 Ags 2017	20 Orang	KAT Pusdiklat 2017	TVRI dan Luar TVRI
2	TV News Presenter	24 Jul s/d 11 Ags 2017	20 Orang	KAT Pusdiklat 2017	TVRI dan Luar TVRI
BIDANG PRODUKSI CREATIVITY CONTENT					
1	Dasar Produksi Acara TV	30 Jan s/d 24 Mar 2017	20 Orang	KAT Pusdiklat 2017	TVRI dan Luar TVRI
2	Directing Multicamera for Musik	3 Apr s/d 28 Apr 2017	20 Orang	KAT Pusdiklat 2017	TVRI dan Luar TVRI
3	Grafhic Design	30 Jan s/d 17 Feb 2017	18 Orang	KAT Pusdiklat 2017	TVRI dan Luar TVRI
BIDANG TEKNIK					
1	Diklat Dasar Teknik Studio	30 Jan s/d 24 Mar 2017	20 Orang	KAT Pusdiklat 2017	TVRI dan Luar TVRI
2	Camera Under Water	20 s/d 25 Feb 2017	12 Orang	KAT Pusdiklat 2017	TVRI dan Luar TVRI
3	Dasar Transmisi Digital	13 Mar s/d 5 Mei 2017	20 Orang	KAT Pusdiklat 2017	TVRI dan Luar TVRI
4	DVB-T2	15 s/d 19 Mei 2017	20 Orang	KAT Pusdiklat 2017	TVRI dan Luar TVRI
5	Kamerawan Televisi	17 Apr s/d 19 Mei 2017	30 Orang	KAT Pusdiklat 2017	TVRI dan Luar TVRI

7. Diklat Untuk Umum

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 20027 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusdiklat ditetapkan sebagai salah satu sumber penerimaan PNBP melalui penyelenggaraan diklat profesi untuk masyarakat umum. Diklat untuk masyarakat umum meliputi :

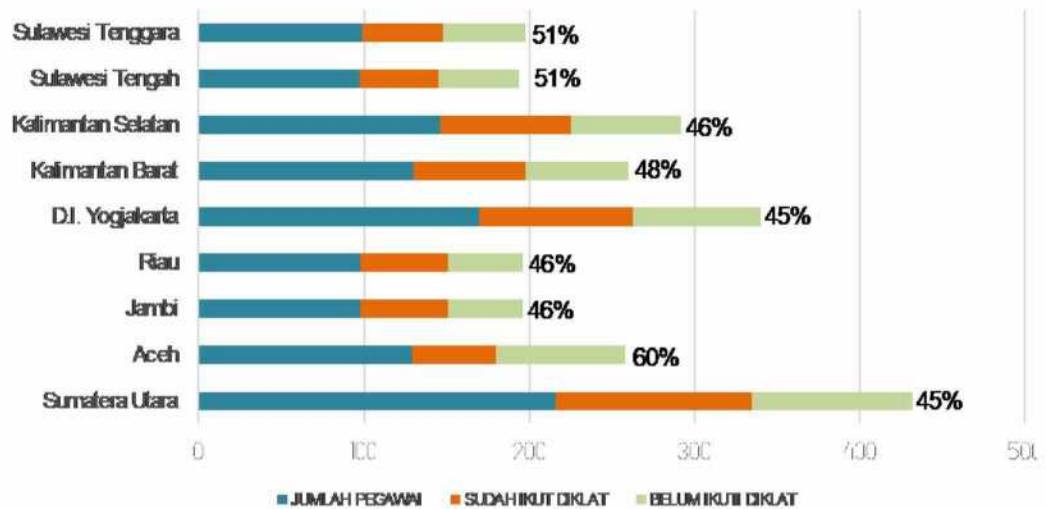
- a. diklat Kameraman
- b. diklat Persenter
- c. diklat Editing
- d. diklat video Jurnalistik

Diharapkan dengan penyelenggaraan diklat untuk masyarakat umum termasuk untuk lembaga/instansi pemerintah dan swasta dapat meningkatkan PNBP TVRI. Sedangkan untuk menetapkan jenis diklat dilakukan evaluasi ke berbagai daerah untuk analisis kebutuhan diklat. Hasil *Training Need Analysis* (TNA) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.11: Hasil *Training Need Analysis* Kebutuhan Diklat Tahun 2017.

NO	STASIUN PENYIARAN	JUMLAH PEGAWAI	TELAH MENGIKUTI DIKLAT	BELUM MENGIKUTI DIKLAT
1	Sumatera Utara	216	119	97
2	Aceh	129	51	78
3	Jambi	98	53	45
4	Riau	98	53	45
5	D.I. Yogyakarta	170	93	77
6	Kalimantan Barat	130	68	62
7	Kalimantan Selatan	146	79	67
8	Sulawesi Tengah	97	48	49
9	Sulawesi Tenggara	99	49	50

Grafik 1.13. Prosentase Training Need Analysis



8. Pelatihan *Service Excellence* di Dunia Broadcasting

Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pusdiklat TVRI menyelenggarakan pelatihan *service excellence* bagi manajemen TVRI maupun staf dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelatihan *service excellence* semakin diminati oleh banyak lembaga, yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang berkualitas terutama yang berkaitan dengan pelayanan terhadap konsumen TVRI. Pelatihan ini dimaksudkan untuk membuka wawasan, imajinasi, inspirasi, serta membangun motivasi dan komitmen pegawai TVRI dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bentuk layanan informasi publik maupun layanan publik, baik kepada lembaga maupun mitra kerjasama TVRI. Sedangkan bagi TVRI pelatihan *service excellence* adalah meningkatkan kinerja lembaga agar lebih optimal. Untuk menyelenggarakan pelatihan ini TVRI melakukan kerjasama dengan *Garuda Training Center*, dimana seluruh kurikulum dan pengajar dari Pihak Garuda. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah :

Memahami konsep diri dan pribadi yang unggul secara benar yaitu:

- a. Memiliki rasa percaya diri yang kuat diiringi dengan perubahan sikap dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang prima.
- b. Memahami dan mengaplikasi sikap layanan kepada orang lain maupun masyarakat sesuai dengan standar sikap dan perilaku organisasi.
- c. Memiliki sikap layanan yang positif dan penampilan yang profesional sebagai *servicing personnel*.
- d. Memiliki kemampuan *interpersonal*, dan *communication skill*, dalam membina hubungan baik secara *external* maupun *internal*.
- e. Membangun nilai-nilai layanan yang prima untuk meningkatkan budaya layanan di TVRI.
- f. Membangun *awareness* dan komitmen para bawahannya untuk selalu mengembangkan budaya layanan yang *excellence* dalam setiap aktivitas setiap hari.

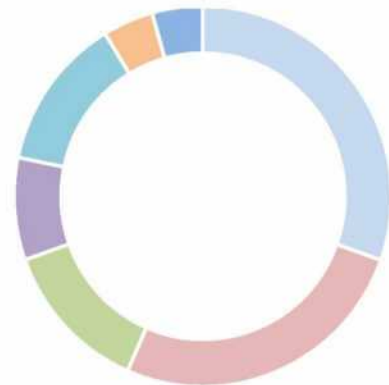
Bagi *frontliner* adalah perubahan sikap terhadap meningkatnya rasa kecintaan terhadap TVRI dalam melaksanakan aktivitas setiap hari baik pada saat melaksanakan tugas didalam kantor maupun diluar kantor.

9. Prioritas Pelatihan

Prioritas diklat dilakukan sesuai dengan kebijakan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi serta berdasarkan *Training Need Analysis (TNA)* dan masukan dari stasiun penyiaran di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan prinsip *link and match* sehingga sesuai kebutuhan TVRI dan pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif. Sementara itu prioritas pendidikan dan pelatihan kepada peningkatan kemampuan profesi.

Tabel: 1.12: Prioritas Diklat

NO	DIKLAT PROFESI	STASIUN	%
1	Reporter	7	25.93
2	Kamerawan	6	22.22
3	Editor	3	11.11
4	Progran Director	2	7.41
5	Video Journalist	3	11.11
6	Presenter	1	3.7
7	Animasi Video	1	3.7



Pengembangan diklat kedepan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi yang fokus pengembangan kompetensi profesi sebagai seorang *broadcaster*. Untuk itu Pusdiklat perlu membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi, sehingga dapat menjadi lembaga penyelenggara sertifikasi profesi.

BAB II
RUMUSAN VISI, MISI
DAN EVALUASI RENSTRA 2015-2019

2.1 RUMUSAN VISI

Rumusan Visi harus menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh LPP TVRI pada akhir periode perencanaan. Rumusan Misi merupakan gambaran mengenai upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang ditetapkan. Tujuan menggambarkan mengenai penjabaran visi dan misi dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai prioritas program yang ditetapkan. Strategi harus menggambarkan mengenai langkah-langkah dalam bentuk program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan harus menggambarkan mengenai penjabaran program prioritas sesuai dengan visi, misi dan tujuan LPP TVR, yang rumusannya mencerminkan program-program direktorat dan unit kerja dalam mencapai sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, termasuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Sedangkan program harus menggambarkan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran.

Rumusan Visi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tidak terlepas dari cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rumusan Visi juga berdasarkan pada Agenda Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Spirit yang mendasari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla adalah meneguhkan kembali jalan ideologis. Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menyadari bahwa dalam melakukan pembangunan membutuhkan jalan untuk

memberikan arah yang jelas. Jalan perubahan itu adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945.

A. Visi Nasional

Bagi suatu bangsa agar tetap eksis dalam menghadapi perubahan dinamika sosial budaya yang begitu cepat, ideologi merupakan penuntun; sebagai penggerak; dan juga sebagai pemersatu perjuangan. Ideologi itu adalah PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI. Pancasila meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arah dalam membangun jiwa bangsa untuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat, dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa; menegaskan kembali fungsi publik negara; menggelorakan kembali harapan di tengah krisis sosial yang mendalam; menemukan jalan bagi masa depan bangsa; dan meneguhkan kembali jiwa gotong-royong. TRISAKTI memberikan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antar bangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jalan TRISAKTI menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan nasional masa depan. TRISAKTI mewadahi semangat perjuangan nasional yang diterjemahkan dalam tiga aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Amanat yang diemban dalam RPJMN 2015-2019 adalah meneguhkan kembali jalan ideologis. Dalam rangka mewujudkan cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mencanangkan visi pembangunan, yaitu:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang dinyatakan dalam NAWA CITA :

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pembangunan Nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan pembentukan NKRI. Pada prinsipnya Pembangunan adalah proses perubahan menuju kearah kehidupan yang lebih baik. Disadari bahwa dalam melaksanakan pembangunan (proses perubahan) banyak tantangan yang dihadapi. Untuk mengatasi tantangan tersebut agar pembangunan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kallamemberikan arah kebijakan umum pembangunan, antara lain:

- a. Menyiapkan Landasan Pembangunan yang kokoh yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjangaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional.
- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan).
- c. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan;

Ada pun sasaran yang ingin diwujudkan dalam RPJMN ke tiga pada tahun 2019 antara lain: perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 6-8 persen pertahun secara berkelanjutan dan Indonesia dapat menjadi Negara maju, pengurangan pengangguran, tingkat partisipasi politik dalam pemilu 80 persen, indeks Reformasi Birokrasi 83,48, indeks integritas pelayanan publik (pusat) 9 dan daerah 8. Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, ada beberapa isu pembangunan dan sektor pembangunan yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Jangka Panjang dan merupakan sektor-sektor kunci RPJMN 2015-2019. Satu di antara yang sangat penting sebagai landasan pembangunan di semua bidang adalah stabilitas politik dan keamanan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

TVRI sebagai entitas negara diperankan sebagai sabuk pengaman informasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Informasi sangat berperan penting di dalam suatu negara untuk mendukung kelangsungan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Negara membutuhkan informasi dari seluruh pelosok negeri tentang keadaan rakyatnya, harapan dan berikutan permasalahannya, sehingga dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat. Bagi warga masyarakat, mereka membutuhkan informasi dan berita tentang kegiatan politik, kejadian-kejadian, baik berskala lokal, nasional, maupun internasional, atau tentang keadaan cuaca, harga-harga komoditas dan lain sebagainya. Informasi-informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk aktifitas keseharian, untuk merencanakan masa depan yang lebih baik.

Oleh karena itu arah dan kebijakan pembangunan nasional adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, dengan sasaran ke 5 yaitu : tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informasi diperdesaan, perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial peningkatan jangkauan siaran LPP RRI dan TVRI menjangkau 99 % dan 88% penduduk Indonesia. Sedangkan untuk sasaran strategis yaitu

optimalisasi pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui migrasi sistem penyiaran televisi dari sistem analog ke sistem digital selesai *analog switch off* (ASO).

1. TVRI Sebagai Rujukan Informasi Yang Netral dan Mendidik

Sasaran strategis nasional dalam bidang penyiaran juga harus memperhatikan kondisi penyiaran yang terjadi saat ini. Secara umum kondisi dunia penyiaran adalah

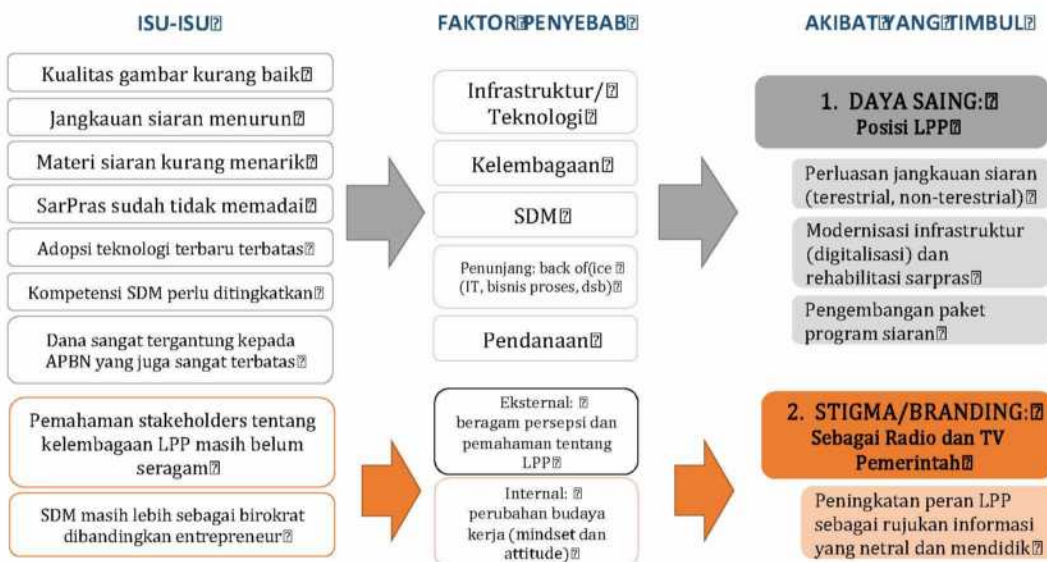
- a. informasi dan media penyiaran televisi dan radio belum dapat diakses oleh seluruh orang/penduduk Indonesia
- b. informasi yang disampaikan oleh media penyiaran belum semuanya mempunyai kualitas baik yaitu mendidik, akurat dan terkini dan bermanfaat
- c. penyampaian informasi melalui media penyiaran belum seluruhnya dilakukan secara santun
- d. intervensi politik dalam penyelenggaraan penyiaran dirasakan masih tinggi
- e. media penyiaran sebagai wahana komunikasi dan penyampaian informasi publik belum optimal.

Kondisi penyiaran tersebut menyebabkan stasiun televisi di Indonesia tidak lagi netral dan telah partisan dalam memenuhi kepentingan kelompok maupun golongan. Sementara itu peran TV publik juga belum optimal sehingga menimbulkan sistem penyiaran yang tidak berpihak pada kepentingan publik, tetapi kepentingan kelompok politik maupun golongan. Disamping itu arah penyiaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran belum terpenuhi disebabkan :

- a. Banyak informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak mendukung pelaksanaan nilai moral, tidak berimbang, bahkan tidak bertanggung jawab
- b. Terjadi kepemilikan media televisi yang dapat menimbulkan perilaku monopoli dan digunakan untuk kepentingan individu/golongan/politik.

Beberapa isu yang terkait dengan belum optimalnya peran Lembaga Penyiaran Publik TVRI tergambar sebagai berikut :

Tabel 2.1: Isu Belum Optimalnya Peran Lembaga Penyiaran Publik



Secara umum Lembaga Penyiaran Publik belum berperan secara optimal disebabkan karena daya pancar yang semakin menurun karena umur teknis dari transmisi analog semakin menurun. Adopsi teknologi baru sangat terbatas, pemahaman *stakeholder* terhadap peran Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia belum seragam sehingga menimbulkan persepsi yang salah tentang peran dan fungsi LPP TVRI. Kondisi tersebut menyebabkan daya saing TVRI yang rendah. Untuk itu perlu upaya kongkrit untuk meningkatkan perluasan jangkauan siaran melalui program modernisasi infrastruktur digitalisasi, rehabilitasi sarana dan prasarana, serta pengembangan paket program siaran. Dengan demikian dapat meningkatkan peran lembaga penyiaran publik sebagai rujukan informasi yang netral dan mendidik.

2. Kebijakan Nasional Terkait Lembaga Penyiaran Publik

Kebijakan yang terkait dengan pengembangan lembaga penyiaran publik dalam RPJM 2015-2019 adalah : merestrukturisasi sektor penyiaran dengan strategi yaitu :

- a. memperkuat Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI) sebagai lembaga penyiaran yang independen, netral dan tidak komersial, dan memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat sehingga mampu menjadi rujukan dan penyeimbang berita.
- b. merevitalisasi sarana pasarana lembaga penyiaran publik dengan memperhatikan perkembangan teknologi.
- c. mempercepat perluasan jangkauan siaran lembaga penyiaran publik dengan mendorong pemanfaatan dan pengembangan media dan teknologi baru (non tradisional).

Dengan demikian peran lembaga penyiaran publik tetap menjadi kebutuhan negara, dan masyarakat karena :

- a. keberadaan Lembaga Penyiaran Publik TVRI masih sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa
- b. siaran televisi dan radio masih menjadi sarana komunikasi yang sangat dibutuhkan untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama yang berada di daerah terpencil.
- c. masyarakat di daerah perbatasan sangat kurang mendapatkan akses terhadap informasi dan hiburan melalui media televisi dan radio.

Untuk mendukung peran LPP TVRI maka rekomendasi yang dapat disampaikan kepada negara antara lain :

- a. TVRI perlu melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bappenas, Kementerian Kominfo, dan kementerian dan lembaga terkait terutama mengenai :

- penguatan siaran TVRI diseluruh wilayah Indonesia termasuk di perbatasan negara, daerah tertinggal, dan daerah terpencil
 - pelaksanaan digitalisasi penyiaran.
- b. mengkaji sumber-sumber pendanaan yang memungkinkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peran TVRI
 - c. memperkuat komunikasi dan kerjasama kelembagaan dengan para pemangku kepentingan baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
 - d. melakukan revitalisasi Lembaga Penyiaran Publik TVRI dalam rangka penyediaan informasi bagi publik baik secara independen, netral, tidak komersial, tidak memihak.
 - e. berperan aktif dalam pembahasan kerangka regulasi berupa revisi undang-undang penyiaran atau RUU RTRI untuk kemudian disesuaikan dalam perencanaan jangka panjang dan menengah.
 - f. strategi untuk melakukan perubahan pengelolaan lembaga penyiaran publik menjadi organisasi penyiaran yang mandiri, sehat, kuat dan dapat bersaing di dunia internasional.
 - g. berinovasi secara terus menerus ditengah tengah media penyiaran yang semakin kompetitif.
 - h. menyajikan siaran yang beragam informasi dan hiburan
 - i. memproduksi siaran sendiri yang mengangkat kearifan lokal.
 - j. membuka dialog interaktif dengan penonton
 - k. menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat
 - l. memperbanyak materi siaran berita lokal yang berkualitas dan lebih aktual dibandingkan dengan media cetak.
 - m. meningkatkan kemampuan SDM yang profesional
 - n. mengikuti perkembangan teknologi
 - o. bekerja keras untuk memperbaiki opini BPK.

Dengan demikian peranan LPP TVRI begitu strategisnya bagi negara dan masyarakat Indonesia, khususnya pada bidang Polhukhankam dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional. Dewan Pengawas TVRI periode 2017-2022 telah Menerbitkan menerbitkan Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Keputusan tersebut menetapkan Kebijakan Umum LPP TVRI meliputi :

- a. Visi dan Misi
- b. Slogan
- c. Prinsip-prinsip Lembaga Penyiaran Publik
- d. Nilai Dasar Lembaga Penyiaran Publik

3. VISI dan Misi LPP TVRI

Visi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas LPP TVRI adalah:

“Menjadi Lembaga Penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa”

MISI

Misi merupakan langkah strategis yang harus dilakukan untuk mewujudkan VISI TVRI yang telah ditetapkan.

Misi TVRI adalah

1. Menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi dan memberdayakan, yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa;

2. Mengelola sumber daya unggulan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel, secara profesional, modern serta terukur kemanfaatannya;
3. Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam bentuk layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini yang dikelola secara modern dan tepat guna serta dapat diakses secara global;
4. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi serta mencerminkan keberagaman;
5. Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan asset secara optimal dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan asset, meningkatkan pendapatan siaran iklan dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Nilai Dasar Penyiaran Publik

1. **Integritas** dalam arti sikap dan perilaku yang melekat pada sumber daya manusia yang taat peraturan, mampu bekerja secara utuh, terampil dan jujur
2. **Terpercaya** dalam arti penuh percaya diri, ajeg, dapat diandalkan dan selalu menyatakan kebenaran.
3. **Kualitas** dalam arti menghasilkan yang terbaik, unggul dan berdaya saing
4. **Kreativitas** dalam arti kemampuan untuk melahirkan gagasan **orisinil** dan **inovatif**
5. **Keberagaman** dalam arti pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap perbedaan
6. **Orientasi Pelayanan** dalam arti proses kinerja yang memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi pemangku kepentingan
7. **Harmoni** dalam arti selaras di berbagai bidang dan peran untuk mencapai tujuan lembaga

5. Prinsip Prinsip Penyiaran Publik

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, serta keberhasilan strateginya, TVRI sebagai media publik merumuskan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip lembaga yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) **Independen** : dalam arti memiliki sikap dan kemandirian di dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain
- b) **Netral**: dalam arti mengakomodasi kepentingan publik dan tidak memihak kepada salah satu pihak dengan tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara
- c) **Tidak Komersial** : dalam arti menambah pendapatan dengan syarat memberi manfaat dan nilai tambah bagi peningkatan pelayanan
- d) **Layanan Publik** : memberikan layanan bagi kepentingan masyarakat dalam arti sesuai minat, kepentingan dan kenyamanan publik

6. Penjabaran Visi

Visi “Menjadi Lembaga Penyiaran Kelas Dunia yang memotivasi dan memberdayakan dimaksudkan untuk memotivasi dan memberdayakan masyarakat Indonesia untuk semua kalangan, baik untuk anak-anak remaja, pemuda dan orang dewasa, tetapi juga untuk kelompok-kelompok termarginal kelompok-kelompok miskin, serta masyarakat di daerah perbatasan, terluar dan terpencil yang selama ini tidak terjangkau oleh informasi. Disamping itu Visi tersebut juga ditujukan memotivasi dan memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki TVRI dengan menyajikan karya-karya kreatif untuk kepentingan publik. Karya-karya kreatif diwujudkan dalam bentuk program-program siaran yang dikemas secara kreatif dengan konten yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Program tersebut dapat dipromosikan secara lokal, regional, nasional dan internasional. Hal ini juga sejalan dengan Visi TV publik NHK-Jepang

“Becoming an Even More Trustworthy Source of Information, Shaping the Future with the Power of Creativity”

Menjadi lebih dari sumber informasi yang terpercaya dan gambaran masa depan dari kekuatan kreativitas. TVRI juga harus menjadi sumber informasi terpercaya, dan menjadi referensi publik, apalagi menghadapi berita *hoax*, *fake news* dan *bad news*. TVRI harus terus mengembangkan *good news is a good news*, bukan sebalik seperti yang dikembangkan oleh TV swasta, *bad news is a good news*. Untuk menjadi referensi publik TVRI juga harus memperoleh informasi dari sumber-sumber terpercaya dan data dan fakta disampaikan secara arief dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Penyampaian informasi juga disampaikan secara akurat dan berimbang serta tidak bias. Akurasi yaitu informasi yang ditulis *reliabel* dan bebas dari kesalahan penulisan bahkan kesalahan pada saat penyiaran. Selain itu informasi itu sendiri harus benar dan bebas dari *hoax* dan opini pribadi. Jika tidak yakin apakah informasinya benar, harus dilakukan verifikasi data dan fakta, melakukan *check and recheck* secara teliti sebelum informasi tersebut ditulis dalam bentuk naskah berita, naskah features, naskah dokumenteri, dan naskah drama atau skenario. Disamping itu narasumber yang dihadirkan harus kredibel, memiliki kompetensi dengan bidangnya, sehingga tidak menimbulkan kesalahan menyampaikan informasi kepada publik.

2.2. Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis

A. Tujuan Strategis

Tujuan strategis suatu organisasi dapat dirumuskan dalam berbagai bentuk dan diturunkan dari Visi dan Misi Organisasi. Tujuan digunakan untuk menyatakan rumusan yang luas dan tidak terbatas waktu tentang apa yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran digunakan untuk menyatakan rumusan hasil akhir yang lebih spesifik dan pencapaiannya harus terwujud dalam batas waktu tertentu. Tujuan strategis termasuk dalam proses perencanaan strategi, sedangkan sasaran strategis digunakan dalam proses pengendalian manajemen untuk melaksanakan strategi. Tujuan maupun sasaran strategis menyatakan hasil akhir yang ingin dicapai, tetapi kedua istilah ini berbeda dari segi batas waktu dan tingkatan kerinciannya. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan sedangkan rencana-rencana yang lebih rinci digunakan untuk mencapai sasaran.

Tujuan strategis TVRI merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi TVRI yang telah ditetapkan Dewan Pengawas. Tujuan strategis yang dirumuskan sebanyak 6 tujuan. Masing-masing tujuan ditentukan PIC atau yang bertanggung terhadap pencapaian tujuan strategis tersebut yaitu para direktur, kepala SPI, kepala Pusdiklat, kepala Puslitbang dan kepala TVRI Stasiun Penyiaran. Sedangkan koordinator PIC adalah Direktur Utama yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh direktorat dan satuan kerja baik di pusat maupun stasiun penyiaran untuk dalam rangka mencapai tujuan strategis secara keseluruhan. Koordinasi lintas direktorat dan satuan kerja agar dapat tercipta pemahaman yang sama dalam mencapai tujuan strategis.

Koordinasi bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan organisasi yang efektif yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) dan meningkatkan tingkat kepuasan publik dalam menerima informasi berupa program-program siaran yang mendidik, hiburan yang sehat, kontrol dan

perekat sosial. Dengan demikian pencapaian tujuan strategis sangat ditentukan juga oleh koodinasi lintas sektoral. Tujuan strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 : Tujuan Strategis LPP TVRI

NO	MISI	Tujuan Startegis	PIC	KoordinatorPIC
1	Menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi dan memberdayakan, yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.	Terselenggaranya program siaran informasi pendidikan dan hiburan yang sehat secara lokal, nasional dan internasional berbasis hasil penelitian untuk mencerdaskan bangsa dan memperkuat persatuan dan keberagaman.	Direktur Program dan Berita. Kepala Stasiun Penyiaran Kepala Puslitbang	DIREKTUR UTAMA
2	Mengelola sumber daya unggulan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel, secara profesional, modern serta terukur kemanfaatannya	Terselenggaranya pengelolaan dan pengawasan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan kredibel secara profesional dan modern, berbasis teknologi informasi	Direktur Keuangan Kepala SPI	
3	Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam bentuk layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini yang dikelola secara modern dan tepat guna serta dapat diakses secara global	Terselenggaranya penyiaran berbasis digital dalam bentuk layanan multiplatform, dan multiplexing dengan menggunakan teknologi terkini yang dapat diakses secara global	Direktur Teknik	
4	Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi serta mencerminkan keberagaman	Terselenggaranya reformasi birokrasi, tata kelola dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif, profesional dan beretika berbasis meritokrasi serta memiliki budaya kerja yang mencerminkan keberagaman.	Direktur Umum Kepala Pusdiklat	
5	Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan asset secara optimal dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terselenggaranya tatakelola kelembagaan yang dinamis, efektif, efisien dan berkelanjutan serta pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	Direktur Umum	
6	Mengoptimalkan pemanfaatan asset, meningkatkan pendapatan siaran iklan dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya optimalisasi dan pemanfaatan aset serta usaha jasa siaran dan jasa non siaran untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan	Direktur Pengembangan Usaha	

Tujuan strategis 1 ditetapkan 3 PIC 3 yaitu :

1. Direktur Program dan Berita yang bertanggung terhadap penyelenggaraan program siaran TV publik secara nasional dan internasional yang mengandung nilai kepublikan.
2. Kepala Stasiun Penyiaran yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan siaran TV publik secara lokal, dan mengangkat kearifian lokal untuk dipromosikan pada tingkat nasional dan internasional
3. Kepala Puslitbang yang bertanggung terhadap pelaksanaan penelitian/survei dan pengkajian serta pengelolaan data Nielsen dan hasil penelitian *audience share*.

Tujuan strategis 2 ditetapkan 2 PIC yaitu

1. Direktur Keuangan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan yang efektif, akuntabel dan transparan yang kredibel secara profesional dan modern berbasis teknologi informasi.
2. Kepala SPI yang bertanggung jawab terhadap pengawasan keuangan yang efektif, akuntabel dan transparan yang kredibel secara profesional dan modern berbasis teknologi informasi

Tujuan strategis 3 ditetapkan 1 PIC yaitu Direktur teknik yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya penyiaran berbasis digital dalam bentuk layanan multiplatform dan multiplexing dengan menggunakan teknologi terkini yang dapat diakses secara global.

Tujuan strategis 4 memiliki 2 PIC yaitu :

1. Direktur umum yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya reformasi birokrasi, tata kelola dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif, profesional, dan beretika yang berbasis meritokrasi serta memiliki budaya kerja yang mencerminkan keberagaman.

2. Kepala Pusdiklat yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif, profesional, dan beretika yang berbasis meritokrasi serta memiliki budaya kerja yang mencerminkan keberagaman.

Tujuan strategis 5 memiliki 1 PIC yaitu Direktur Umum yang bertanggung jawab terhadap tatakelola kelembagaan yang dinamis, efektif, efisien dan berkelanjutan serta pengelolaan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan strategis 6 memiliki 1 PIC yaitu Direktur Pengembangan Usahayang bertanggung jawab terhadap optimalisasi pemanfaatan aset, usaha jasa siaran dan jasa non siaran untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan. Koordinator dari PIC adalah Direktur Utama yang bertanggung terhadap pencapaian 6 tujuan strategis tersebut.

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis fokus pada pencapaian 6 tujuan strategis yang dirumuskan dan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk indikator kinerja, target kinerja dan program kegiatan dan indikator kegiatan. Sasaran strategis TVRI juga terkait dengan strategi pembangunan nasional yaitu memperkuat jati diri bangsa. Itulah sebabnya strategi pengembangan TVRI adalah sebagai saluran pemersatu bangsa.

Menjadi saluran pemersatu bangsa merupakan komitmen dasar sejak TVRI dibentuk tahun 1962 oleh Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno sampai saat ini. Oleh karena itu strategi pengembangan TVRI harus terkoneksi strategi nasional, yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat informasi, yang mampu menghadapi tantangan perubahan zaman, bahkan mampu meningkatkan daya saing sebagai suatu bangsa secara global.

Sasaran strategis yang dirumuskan juga tidak terlepas dan tugas dan fungsi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang memberikan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, melakukan kontrol dan perekat sosial yang bersifat independen, netral dan imparsial.

Tabel 2.3 : Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LPP TVRI.

TS	Tujuan Startegis	SS	Sasaran Strategis	IK	Indikator Kinerja
TS1	Terselenggaranya program siaran informasi pendidikan dan hiburan yang sehat secara lokal, nasional dan internasional serta siaran bermuatan lokal yang berbasis hasil penelitian untuk mencerdaskan bangsa dan memperkuat persatuan dan keberagaman.	SS1	Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan siaran TV publik	IK1	% Siaran Informasi, Pendidikan dan Hiburan masing-masing
				IK2	% Peningkatan <i>Audience Share</i>
				IK3	Jam Siaran Nasional (Analog dan Digital)
				IK4	% Biaya Hak Siar
				IK5	% Penataan Kanal Digital
				IK6	Indeks Survei Eksternal
				IK7	Jumlah Penghargaan Eksternal (TVRI Nasional)
				IK8	Jumlah Penghargaan Eksternal (TVRI Sta. Penyiaran)
				IK9	Jumlah Penghargaan Internasional
				IK10	% Penataan Program
				IK11	% Kerjasama Program Internasional
				IK12	% Kerjasama Program Nasional
				IK13	Jumlah Taging Program Nasional
				IK14	% Diversifikasi Konten digital
				IK15	% Distribusi konten melalui media baru
				IK16	% Pusat-Pusat Produksi Program di daerah
				IK17	% Distribusi konten ke market regional
				IK18	% Distrubisi konten ke Market global
				IK19	% <i>International Rating</i>

Tabel 2.4 : Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LPP TVRI.

TS	Tujuan Startegis	SS	Sasaran Strategis	IK	Indikator Kinerja
				IK20	% surat Teguran KPI (Kepatuhan terhadap regulasi)
		SS2	Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Stasiun Penyiaran TV Publik	IK21	% Siaran Muatan Lokal
				IK22	% Jam siaran lokal (analog dan digital)
				IK23	% Audience share lokal
TS1	Terselenggaranya program siaran informasi pendidikan dan hiburan yang sehat secara lokal, nasional dan internasional serta siaran bermuatan lokal yang berbasis hasil penelitian untuk mencerdaskan bangsa dan memperkuat persatuan dan keberagaman.	SS3	Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian yang efektif untuk meningkatkan daya saing TVRI	IK24	Jumlah wilayah Survei audience share diluar Nielsen
				IK25	% Langganan Data Nielsen
				IK26	Indeks survei kepuasan mitra pada stasiun penyiaran
				IK27	Indeks survei Kepuasan Pegawai pada stasiun penyiaran
				IK28	Jumlah survei teknik pada stasiun penyiaran
TS2	Terselenggaranya pengelolaan dan pengawasan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan kredibel secara profesional dan modern, berbasis teknologi informasi	SS4	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	IK29	Opini BPK
				IK30	Penyelesaian Akun-Akun Terisoliasi
				IK31	Indeks SPIP
		SS5	Terlaksana Koordinasai dan Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan yang tranparan dan akuntabel	IK32	Jumlah Stasiun Penyiaran yang memperoleh pembinaan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

Tabel 2.5: Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LPP TVRI.

TS	Tujuan Startegis	SS	Sasaran Strategis	IK	Indikator Kinerja
		SS6	Terlaksananya Pengawasan yang efektif terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP TVRI	IK33	Indeks APIP
		SS7	Sumber pembiayaan baru	IK34	% proses peraturan tentang implementasi iuran penyiaran.
				IK35	% Proses peraturan tentang pajak media bagi TVRI
				IK36	% PSO (<i>Public Service Obligation</i>) untuk wilayah Perbatasan
				IK37	% PSA dari biaya promosi Kementerian/Lembaga/BUMN dipusat dan daerah.
				IK38	% Biaya USO untuk TVRI
% TS3	Terselenggaranya penyiaran berbasis digital dalam bentuk layanan multiplatform, dan <i>multiplexing</i> dengan menggunakan teknologi terkini yang dapat diakses secara global	SS8	Peningkatan Jangkauan Siaran Terhadap Wilayah dan Jumlah Penduduk	IK39	% <i>Coverage Area</i>
				IK40	% <i>Coverage Population</i>
		SS9	Digitalisasi Pemancar, studio dan peralatan	IK41	Jumlah pemancar digital
				IK42	Jumlah Studio digital
				IK43	Jumlah Kanal Digital
				IK44	% <i>Fully Integrated digital MAM</i>
				IK45	% peralatan produksi dan penyiaran yang dimodernisasi
				IK46	% persiapan TVRI sebagai operator multipleksing
			IK47	Layanan Multiplatform	
		SS10	Pengembangan <i>Early Warning Syastem</i>	IK48	% <i>Early Warning system (EMS)</i>
		SS11	Penguatan <i>signal</i> penerimaan Siaran	IK49	% penguatan kualitas <i>signal</i> penerimaan Jakarta.

Tabel 2.6 : Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LPP TVRI.

TS	Tujuan Startegis	SS	Sasaran Strategis	IK	Indikator Kinerja
				IK50	% Penguatan kualitas <i>signal</i> Penerimaan Surabaya.
				IK51	<i>Indeks Quality Receptions</i>
		SS12	Taging program prioritas nasional untuk Teknik	IK52	Jumlah Program prioritas nasional untuk teknik
		SS13	Terlaksananya pengembangan ICT <i>office</i> dan <i>broadcasting</i> yang terintegrasi	IK53	Jumlah program ICT <i>Office</i>
				IK54	Jumlah program ICT penyiaran
			IK55	<i>Indeks E-Government</i>	
TS4	Terselenggaranya reformasi birokrasi, tata kelola dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif, profesional dan beretika serta memiliki budaya kerja dan loyalitas berbasis meritokrasi.	SS14	Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	IK56	Nilai Reformasi Birokrasi
				IK57	Jumlah Stasiun Penyiaran yang telah melaksanakan reformasi birokrasi
				IK58	% Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional
				IK59	% Pegawai yang menerapkan kinerja individu
		SS15	Tatakelola Organisasi yang akuntabel, bersih dan berkinerja tinggi	IK60	Indeks Akuntabilitas Kinerja
			IK61	Jumlah Unit kerja yang menerapkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) /WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)	

Tabel 2.7 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LPP TVRI.

TS	Tujuan Startegis	SS	Sasaran Strategis	IK	Indikator Kinerja
		SS16	Meningkatnya kapasitas pelayanan publik	IK62	Indeks Pelayanan Publik
		SS17	Peningkatan Kompetensi Profesi	IK63	Jumlah pegawai TVRI yang memperoleh sertifikasi profesi
				IK64	Indeks Kompetensi Profesi
		SS18	Kepemimpinan dalam organisasi	IK65	Indeks <i>leadership</i>
			IK66	% Potensi Kandidat Pemimpin	
		SS19	Penambahan SDM dan Lelang Jabatan Sesuai Kebutuhan	IK67	% Rekrutment SDM dan seleksi terbuka.
TS5	Terselenggaranya tatakelola kelembagaan yang dinamis, efektif, efisien dan berkelanjutan serta pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	SS20	Penguatan Kelembagaan	IK68	Jumlah stasiun penyiaran yang menyelesaikan proses bisnis.
				IK69	Jumlah stasiun penyiaran yang merumuskan Renstra Stasiun yang diturunkan dari Renstra Pusat
				IK70	% Perubahan Struktur Organisasi.
				IK71	% Pembentukan Stasiun Nasional
				IK72	% Pembentukan Stasiun Internasional
				IK73	% Pembentukan Saluran Internasional
				IK74	% Pembentukan Saluran Parlemen
				IK75	Jumlah stasiun penyiaran yang naik tipe klasifikasi.
				IK76	% persiapan Kelembagaan baru melalui revisi UU penyiaran dan RUU RTRI
IK77	% Revisi Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI				

Tabel 2.8 : Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LPP TVRI.

TS	Tujuan Startegis	SS	Sasaran Strategis	IK	Indikator Kinerja
		SS21	Melakukan Rebranding TVRI	IK78	% <i>Rebranding</i> TVRI
				IK79	% Implementasi <i>Rebranding</i>
		SS22	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara yang efektif	IK80	% Pengelolaanaset
				IK81	% Distribusi aset
TS5	Terselenggaranya tatakelola kelembagaan yang dinamis, efektif, efisien dan berkelanjutan serta pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	SS23	Terwujudnya pembentukan stasiun penyiaran baru.	IK82	Jumlah stasiun penyiaran baru
		SS24	Terwujudnya pembangunan balai diklat di daerah	IK83	Jumlah balai diklat yang dibangun di daerah
		SS25	Terwujudnya Rumah Dinas Pejabat	IK84	Jumlah rumah dinas pejabat yang dibangun
		SS26	Terwujudnya mess/asrama Pusdiklat	IK85	Jumlah mess/asrama Pusdiklat
		SS27	Terwujudnya Pembangunan Kantor TVRI Stasiun Penyiaran	IK86	Jumlah pembangunan Kantor TVRI Stasiun Penyiaran
				IK87	% Pembangunan Pusdiklat di studio Alam

Tabel 2.9 : Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LPP TVRI.

TS	Tujuan Startegis	SS	Sasaran Strategis	IK	Indikator Kinerja
TS6	Terselenggaranya optimalisasi pemanfaatan asset, usaha jasa siaran dan jasa non siaran untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan	SS28	Terwujudnya layanan dalam pengembangan usaha yang prima terhadap mitra	IK88	% Peningkatan PNBP
		SS29	Terwujudnya optimalisasi aset	IK89	Jumlah optimalisasi Aset TVRI
				IK90	% Optimalisasi Aset dan <i>Ground Breaking</i> TVRI <i>Super block</i> dengan <i>Digital Hub</i> melalui Kerjasama Pemanfaatan Aset (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) dan kerjasama lain sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku
SS30	Melakukan Revisi Peraturan pemerintah Nomor 33 tentang Jenis dan tarif PNBP TVRI	IK91	% Revisi PP 33 tahun 2017 tentang PNBP		

2.3 Evaluasi Renstra Tvri Tahun 2015-2019

Untuk melakukan revisi renstra, maka dilakukan evaluasi terhadap pencapaian renstra Tahun 2015-2019, terutama dalam pencapaian terhadap pendanaan. Anggaran yang direncanakan dalam renstra dengan RKAT yang diterima oleh TVRI dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dibawah 50 persen, sehingga memberikan dampak terhadap kinerja TVRI tidak optimal secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan target kinerja yang ditetapkan tidak tercapai. Evaluasi renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10: Evaluasi Anggaran RENSTRA dengan RKAT/RKP 2015-2019
(dalam miliar rupiah)

TAHUN ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN (milyar)	RKAT TVRI (milyar)	PERSENTASE (%)
2015	1,917.96	901.01	46.98%
2016	2,888.58	762.45	26.40%
2017	4,674.08	762.48	16.31%
2018	4,420.74	-	-
2019	6,093.32	-	-

Tidak tercapainya alokasi anggaran dalam renstra menyebabkan target kinerja masing-masing direktorat juga tidak tercapai. Untuk bidang produksi program misalnya, dalam renstra 2015-2019 sudah merencanakan *audience share* TVRI meningkat menjadi 2% pada tahun 2015 yang didukung oleh adanya 4 program unggulan masing-masing 2 Program Unggulan dari Bidang Berita dan Bidang Non Berita. Peningkatan *audience share* 4% pada tahun 2016 didukung oleh adanya 6 program unggulan masing-masing 3 Program Unggulan dari Bidang Berita dan Bidang Non Berita. Pada tahun 2017 target peningkatan *audience share* 6% yang didukung oleh adanya 8 program unggulan masing-masing 4

Program Unggulan dari Bidang Berita dan Bidang Non Berita. Peningkatan ini didukung oleh adanya program unggulan yang mampu bersaing dengan program TV Swasta, baik untuk kategori Berita dan Informasi maupun untuk kategori non berita, namun target tersebut semuanya tidak tercapai, disebabkan anggaran program yang terbatas, sehingga tidak dapat memproduksi program-program unggulan yang ditetapkan untuk mendorong, peningkatan *audience share* secara keseluruhan.

Tabel 2.11 : Rencana Kinerja Bidang Program dan Berita dalam RENSTRA 20152019

NO	PROGRAM	2015	2016	2017
1	Audience Share	2%	4%	6%
2	Fresh Program Konten Digital TVRI-2	20%	40%	60%
3	Fresh Program Konten Digital TVRI-3	20%	40%	60%
4	Fresh Program Konten Digital TVRI-4	20%	40%	60%
5	Fresh Program Konten Digital TVRI-5		25%	45%
6	Implementasi Siaran Digital TVRI-6		2	4
7	Program Unggulan:			
	1). Berita/Informasi dan Citizen Journalism	2	3	4
	2). Non Berita	2	3	4

Namun dengan anggaran program yang jauh dari harapan, TVRI tidak bisa membuat program unggulan. Dengan anggaran produksi program yang tidak optimal, bahkan untuk memproduksi program reguler, anggaran hanya cukup untuk kegiatan 4 bulan. Selain program unggulan untu TVRI Nasional, pembuatan konten baru (fresh program) untuk mengisi konten saluran digital TVRI-2 (Berita dan Bisnis), TVRI-3 (Budaya dan Pariwisata), TVRI-4 (Olahraga) tidak dapat dilakukan. Konten untuk saluran tersebut merupakan program *re-run* atau *make up montage* program-program yang pernah ditayangkan di TVRI Nasional. Terkecuali TVRI-2, diisi oleh Stasiun Penyiaran Daerah.

A. Evaluasi Anggaran Bidang Program Dan Berita

Dalam Renstra 2015-2019 dengan RKP/RKAT 2015-2017 (alokasi DIPA), Alokasi anggaran bidang program dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.12: Anggaran Program dan Berita dalam RENSTRA 2015-2019 dengan RKP/RKAT2015-2017 Untuk Kegiatan Siaran Nasional dan Daerah (dalam miliar rupiah)

TAHUN ANGGARAN	ANGGARAN PROGRAM (MILYAR)	RKP/RKAT ANGGARAN PROGRAM (MILYAR)	PERSENTASE
2015	507.36	286.61	56.49%
2016	929.65	183.57	19.75%
2017	1,781.33	191.84	10.77%
2018	2,229.04		
2019	3,236.28		

Namun dengan anggaran program yang jauh dari harapan, TVRI tidak bisa membuat program unggulan. Dengan anggaran produksi program yang tidak optimal, bahkan untuk memproduksi program reguler, anggaran hanya cukup untuk kegiatan 4 bulan.

B. Evaluasi Renstra Bidang Teknik

Dibidang infrastruktur (teknologi produksi dan penyiaran) selama tahun 2015-2016 APBN TVRI hanya mampu membiayai pembangunan 3 pemancar baru, selebihnya merupakan hibah dari Kominfo melalui proyek ITTS-II. Dalam Renstra, melalui APBN TVRI diharapkan dapat membangun 44 pemancar sehingga pada akhir tahun 2016 jumlah pemancar digital TVRI sebanyak 66 pemancar digital tersebar di 34 ibu provinsi layanan TVRI dan 32 pemancar di daerah *remote*.

Demikian halnya dengan pembangunan studio digital, sampai dengan akhir 2016 direncanakan terbangun 11 studio *full digital* dan 4 Newsroom. Realisasinya APBN TVRI hanya mampu membangun 1 Newsroom untuk Kantor Pusat.

Tabel 2.13 : Renstra Bidang Teknik 2015-2017

PROGRAM/KEGIATAN	2015	2016	2017
Transmisi Digital	34 Prov		
Remote Wilayah		Jawa	Luar Jawa
FPU Digital	1	4	4
Menara 100 M: 5		5 unit	4
Rekon Menara 100M: 5		5 unit	5
Rekon Menara 65M: 10		10	10
Digitalisasi Sto. Kantor Pusat		Sto. 2, 5, 10	Sto. 6
Digitalisasi Sto. TVRI Daerah Tipe A	1	2	2
Digitalisasi Sto. TVRI Daerah Tipe B	1	2	2
Digitalisasi Sto TVRI Daerah Tipe C		1	1
New Room Kantor Pusat	1		
New Room TVRI Daerah		3	4
SNG Van		1	3

C. Evaluasi Renstra Pengembangan Usaha

Ada 13 Unit Usaha Strategis yang akan dikembangkan oleh DPU. Usaha-usaha ini dikembangkan dari peningkatan manfaat kanal digital dan optimalisasi aset. Peraturan tentang pemanfaatan kanal digital belum ada, sementara untuk optimalisasi aset umum lainnya berbenturan dengan pengelolaan aset BMN. Pada sisi yang lain, anggaran juga kurang mendukung untuk pengembangan unit-unit usaha strategis.

Tabel 2.14: Pengembangan Unit Bussines Renstra Tahun 2015-2019

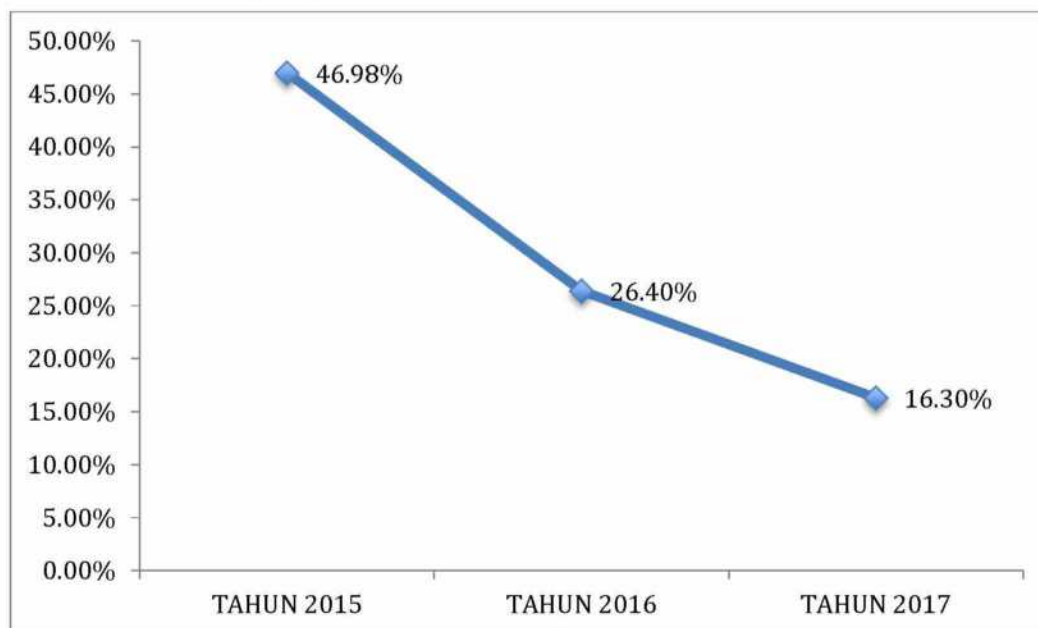
NO	PROGRAM: UNIT USAHA STRATEGIS	2015	2016	2017
1	UBS Kanal Digital TVRI-1, TVRI-2, TVRI-3, dan TVRI-4	30%	50%	75%
2	UBS Kanal Digital TVRI-5	15%	30%	50%
3	UBS Penyewaan Kanal Digital	15%	30%	50%
4	UBS Penyewaan Komersial Kanal (TV Shopping)	15%	30%	50%
5	UBS TVRI News.Com	30%	50%	75%
6	UBS: VideoTron			
	1). Di Kantor Pusat Jakarta	30%	50%	75%
	2). Di Luar Jakarta	15%	30%	50%
7	UBS HotSpot			
	1). Di Kantor Pusat Jakarta	15%	30%	50%
	2). Di Kota Prov. Jawa	15%	30%	50%
	3). Di Kota Prov. Luar Jawa	15%		50%
8	UBS: Event Organizer:			
	1). Di Kantor Pusat	15%	30%	50%
	2). Di Stasiun Daerah	15%	30%	50%
9	UBS: Video On Demand	15%	30%	50%
10	UBS: Optimalisasi Aset Broadcasting Tourism	15%	30%	50%
11	UBS: Optimalisasi Aset Lahan dan Bangunan	15%	30%	50%
12	UBS: Optimalisasi Aset Data Center	15%	30%	50%
13	UBS: Optimalisasi Aset Video Conference	15%	30%	50%

Pengembangan unit *bussines* TVRI tidak dapat berjalan secara maksimal karena tidak tersedia anggaran yang cukup menyebabkan target yang ditetapkan dalam Renstra tersebut tidak tercapai secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi Renstra agar lebih realistis sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.

D. Penurunan Realisasi Renstra TVRI 2015-2019

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra TVRI tahun 2015-2019 ternyata target alokasi anggaran tidak tercapai, bahkan selama 3 tahun pertama realisasi anggaran dalam DIPA TVRI tahun 2015 s/d 2017 rata-rata 29,8%. Tidak tercapainya target anggaran dalam Renstra TVRI ini menyebabkan target *output* dan *outcome* yang dalam Renstra juga tidak tercapai.

Grafik 2.1: Persentase Realisasi Anggaran APBN TVRI Tahun 2015-2017 dalam DIPA dibandingkan dengan Alokasi Anggaran dalam Renstra TVRI Tahun 2015-2019



Oleh karena itu maka perlu dilakukan revisi terhadap Renstra TVRI tahun 2015-2019 khususnya untuk tahun 2018-2019 sehingga target alokasi anggaran maupun target *output* dan *outcome* lebih realistis. Revisi Renstra dilakukan karena terjadi perubahan Manajemen TVRI baik pada Dewan Pengawas maupun Dewan Direksi periode 2017-2022.

Dewan Pengawas telah menetapkan Visi TVRI yang baru yang bertujuan menjadikan TVRI sebagai lembaga penyiaran kelas dunia. Dengan demikian kebijakan baru Dewan Pengawas dan dewan Direksi untuk mewujudkan Visi tersebut dapat dimasukkan dalam Renstra Tahun 2018-2019. Ini berarti perlu dilakukan revisi terhadap target *output* dan *outcome* TVRI secara keseluruhan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Pembangunan Nasional sebagai upaya yang terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan tujuan nasional pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus terus-menerus terpelihara dengan seksama agar pemerintah mampu mengejawantah amanah cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. *Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*, merupakan visi pembangunan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Visi tersebut tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) 2015-2019. Visi pembangunan ini menjadi sumber inspirasi dan spirit dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan di berbagai bidang Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Berdasarkan arahan tersebut pembangunan Indonesia periode 2015-2019 di arahkan untuk mencapai, antara lain: *Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah*. Sasaran-sasaran tersebut diwujudkan melalui agenda utama *Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara*.

Struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi berlandaskan kemampuan SDM berkualitas, didukung dengan infrastruktur handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi.

Kebijakan Pembangunan Nasional disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur Bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi begitu cepat, serta mampu mengatasi dampak informasi yang dikomersialisasikan sebagaimana terjadi saat ini. Beberapa catatan terhadap informasi yang dikomersialisasikan menjadikan masyarakat sulit memilah-milah perilaku yang baik sesuai dengan nilai dan norma agama dan kepribadian bangsa. Adegan kekerasan, kejahatan, konsumtif, termasuk perilaku seksual di layar televisi diduga kuat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku masyarakat. Sepertinya hal itu menjadi sangat wajar, karena kini anak-anak bisa menyaksikan secara bebas acara televisi setiap saat. Kondisi tersebut bertentangan dengan semangat demokratisasi informasi yang sedang digelorakan. Harapannya, informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi bangsa dan negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga menjadi aset yang sangat berharga bagi bangsa.

Ada dua hal penting dalam memandang informasi, pertama terkait keutuhan NKRI, yaitu bahwa pengelolaan informasi diorientasikan untuk peningkatan kualitas persatuan dan kesatuan bangsa dan kedua dari sektor industri yaitu bahwa informasi merupakan faktor ekonomi. Beberapa hal berikut yang perlu mendapatkan penekanan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi nasional dalam bidang informasi untuk peningkatan kualitas persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai berikut:

- a. Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia.
- b. Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal inipun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa.
- c. Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain:
 - Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
 - Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
 - Langkanya informasi tentang pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (*blank spot*).

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat masyarakat setempat berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka tidak jarang daerah perbatasan dijadikan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan teroris.

Dampak globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama siaran televisi dan internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dan dapat merusak ketahanan nasional, karena

mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Televisi sebagai salah satu sub sektor industri kreatif, mempunyai keterkaitan yang erat dengan sub sektor yang lain, baik sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi profesi-profesi terkait maupun dalam rangka menghidupi industri-industri yang terkait. Karena itu industri ini harus menjadi landasan bagi arah kebijakan dan strategi pengembangan TVRI ke depan.

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi TVRI

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di bidang informasi, maka rumusan arah kebijakan dan strategi dalam menyusun Rencana Strategis TVRI Tahun 2015-2019 yang mencakup pula *roadmap* digitalisasi, setidaknya ada tiga hal utama menyangkut infrastruktur yang harus dibenahi TVRI, yaitu melaksanakan konvergensi jaringan, konvergensi peralatan, dan konvergensi kelembagaan. Kesemuanya itu harus direncanakan dengan matang seiring dengan pengembangan bisnis model layanan penyiaran di era digital.

Untuk mewujudkan transformasi teknologi di era konvergensi yang ditandai dengan migrasi sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital, tentunya TVRI membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit, terutama untuk membiayai pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknik produksi dan penyiaran, revitalisasi sumber daya manusia dan organisasi untuk menjawab tantangan zaman. Transformasi teknologi konvergensi tidak terlepas dari perubahan konteks ekonomi global. Oleh karena itu Indonesia perlu memperkuat pilar demokrasi dan kebangsaan TVRI. Salah satu pilar ekonomi bangsa adalah media yang didalamnya terdapat Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi dirumuskan secara tepat sehingga dapat mendorong perkembangan ekonomi bangsa Indonesia, khususnya ekonomi digital di bidang penyiaran. Saat ini ekonomi digital mengalami perkembangan yang sangat cepat di Indonesia. Namun untuk digitalisasi penyiaran belum berjalan sebagaimana yang diharapkan disebabkan hingga saat ini belum ditetapkan *analog switch off*. Padahal Negara-negara lain sebagian besar telah melaksanakan *analog switch off* bahkan ada yang telah melakukan implementasi sistem penyiaran digital di negaranya masing-masing. Kendati demikian TVRI tetap harus mempersiapkan diri untuk memasuki era penyiaran digital dengan melakukan konvergensi teknologi. Hal ini penting agar pada saat *analog switch off*, TVRI telah siap untuk menyelenggarakan siaran digital secara penuh, apalagi saat ini TVRI telah menyelenggarakan siaran digital dan uji coba pemanfaatan MUX TVRI melalui kerjasama dengan Asosiasi Televisi Swasta Digital Indonesia (ATSDI).

A. Arah Kebijakan Pengembangan TVRI

Perkembangan TV publik di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan industri penyiaran. Perkembangan industri harus ditampilkan dalam renstra dimana televisi swasta pun saat ini tengah melakukan *resizing* karena adanya penurunan penerimaan iklan yang cukup signifikan. Pihak pengiklan sebagian beralih ke digital dan sebagian lagi beralih dengan mengadakan *event off air* karena ini bisa langsung memperoleh *revenue* dari penjualan. Keinginan seperti apa TV Publik di masa depan, dari hasil *benchmarking* Dewan Pengawas yang berkesempatan ke NHK-Jepang, KBS-Korea dan ABC-Australia maka keinginan TV publik di Indonesia kedepan sebagai berikut:

- a. TV Publik harus mempunyai *public trust* yaitu memperkuat lembaga penyiaran publik melalui Undang-Undang tersendiri, Peraturan Pemerintah dan penataan struktur organisasi

- b. TV Publik harus menjadi rujukan dan menjadi media Pemersatu Bangsa dengan kekuatan kearifan lokal
- c. TV Publik harus mempunyai program yg berpihak kepada publik dan memenuhi kepentingan publik
- d. Arah TV Publik bukan lagi menjadi *Public Service Broadcasting* semata, tetapi sudah bergeser menjadi *Public ServicesMedia*, sehingga penyiaran tidak hanya di televisi saja namun juga terintegrasi dalam multiplatform. Ini berarti *PublicService Media* dapat mengelola TV, Radio, *social mediadan internet based media* yang mengarah kepada VoD (*Video on Demand*) dengan aplikasinya dimana orang menonton dari multiplatform kapan dan dimana saja.

Gambaran masa depan yg diinginkan dalam pengembangan TVRI adalah :

- a. Sebuah lembaga Negara yang memiliki undang-undang sendiri, sehingga TVRI menjadi kuat secara penganggaran, pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan, sebagaimana Polri yang mendapatkan penugasan khusus untuk mengamankan Negara. Demikian pula dengan peran dan fungsi TVRI sebagai media dalam upaya menangkal disinformasi.

1. TVRI atau RTRI menjadi *Public Service Media*

Kedepannya jika memang memungkinkan untuk menjadi RTRI kemudian *on beyond* tidak sekedar menjadi RTRI saja, tetapi juga menjadi *Public Service Media*, maka *benchmark*-nya persis seperti NHK-Jepang dimana RTRI menjadi *Public Service Media* yang berada dibawahnya sebagai lembaga Negara. RTRI berhak dan mempunyai keleluasaan untuk membentuk *subsidiary* (cabang/unit). Di NHK memiliki banyak *subsidiary* yg sifatnya menjadi unit bisnis yang bertugas melaksanakan kegiatan bisnis sebagai sumber penerimaan. Oleh karena itu arah pengembangan TVRI kedepan sebagai :

- a. *Multiplexer* digital yang mengelola frekuensi, dimana bisa mendapatkan *revenue* dari hasil mengelola frekuensi dan dengan gambaran ini bisa mendapatkan paling tidak Rp. 5 Triliyun atau lebih setiap tahun.

- b. *Content provider* yang memiliki stasiun nasional, stasiun daerah dan stasiun internasional. Dengan ini maka TVRI dapat *goingtglobal* namun juga merupakan pemersatu bangsa dengan adanya *local wisdom* dan *local based* yang kuat, sehingga TVRI yang merekatkan setiap provinsi dengan kearifan lokal dan budaya lokalnya, serta secara nasional memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, juga secara internasional dapat ikut mempromosikan Indonesia di pentas dunia.

2. Optimalisasi Aset

TVRI memiliki aset diseluruh Indonesia dan untuk itu perlu pengelolaan aset yang baik (*Asset Management*). *Property* di beberapa daerah itu sangat strategis dan sangat baik. TVRI bisa membuat digital hub yang bukan sekedar bangunan biasa berupa bangunan kantor biasa yang *multi mix use* dan sudah banyak dibuat oleh pengusaha *property* atau BUMN lain. Namun dengan melihat betapa strategisnya aset TVRI di beberapa daerah seperti Jakarta, Depok dan Surabaya, maka dapat membangun bangunan dengan digital hub yang mengintegrasikan kantor dengan apartment dan lain sebagainya. selain itu saya juga ingin TVRI ini menjadi *landmark*, seperti Tokyo Tower atau Fukuoka Tower, dengan menjadikan pemancar sekaligus sebagai tempat wisata, sebagai icon baru. Dengan menggabungkan semua itu dalam sebuah *digital hub* dan *start-up tower*, tempat mengelola sebuah *public service media* yang berbasis digital hub dengan segala pengoperasian teknologi yang tinggi. Kalau perlu dibuat di 2 kota yaitu di Jakarta dan Surabaya atau mungkin bisa ditambah Medan. TVRI kedepan perlu mengembangkan *digital hub* sebagai satu kesatuan yang terintegrasi antara antara bangunan kantor dan digital sistem.

3. Pajak Iklan Media

Selain itu juga TVRI dapat mengusulkan pendanaan dari pajak iklan media. Kalau di Jepang NHK mendapat pendanaan dari pajak TV, yang dipungut dari orang-orang yang memiliki TV di Jepang. Sistem pendanaan dengan pajak iklan

media dapat diimplementasikan di masyarakat di Indonesia mungkin tidak sulit, karena tidak dikenakan kepada masyarakat, tetapi terhadap iklan media televisi. Pendanaan dari pajak iklan media, jumlahnya bisa sekitar 2-3 % sudah cukup besar untuk mendukung pendanaan di TVRI. Selain itu kemungkinan disetujui akan lebih besar karena tidak secara langsung memberikan beban kepada masyarakat luas.

4. Sosial, Pendidikan dan Budaya

a. Mitigasi Bencana

Sepanjang tahun 2018, Indonesia dikejutkan dengan beberapa bencana, gempa di Lombok, Tsunami dan gempa di Sulawesi Tengah, serta Tsunami dan Gempa di Banten dan Lampung. Indonesia termasuk daerah rawan bencana, karena berada di jalur cincin api yang merupakan daerah rawan gempa. Untuk itu Indonesia perlu mempertimbangkan untuk memperbaiki sistem manajemen bencana dan mitigasi bencana. Dalam kunjungan ke NHK Jepang Dewan Pengawas LPP TVRI, dan akhir November 2018 TVRI melakukan kerjasama dengan NHK (Nippon Hoso Kyokai) sebagai lembaga penyiaran publik di Jepang belajar tentang peran manajemen bencana yang dilakukan NHK Jepang sebagai media penyiaran publik. NHK memiliki 3 komitmen yaitu :

- a) NHK berperan aktif dalam aksi preventif dari bencana
- b) Melakukan peran mereduksi dampak bencana
- c) Melakukan aksi nyata dalam proses *recovery* pasca bencana.

Komitmen tersebut dilakukan dalam bentuk pemberitaan, informasi dini bencana, signal evakuasi bencana dan berbagai peran mitigasi bencana, sehingga negara dan publik sangat respek dan mendukung NHK untuk menjalankan perannya dalam mitigasi bencana. NHK Jepang mempunyai 4 prinsip dasar yaitu:

- a) Tahap I : Mengembangkan sistem peringatan dini dalam manajemen bencana. Sistem peringatan dini bersifat *real time* dan data *online*.
- b) Tahap II : melakukan *breaking news* pemberitaan mengenai bencana dan berbagai aspek
- c) Tahap III: *Screen Info* (informasi layar TV), berisikan informasi detail tentang lokasi bencana dan waktu terkait dengan bencana.
- d) Tahap IV: menerapkan signal evakuasi sebagai informasi signal bahaya untuk melakukan penyelamatan diri dari proses evakuasi. Sudah ada prosedur standar yang dilakukan NHK terkait mitigasi bencana.

NHK memiliki jaringan informasi terpadu tentang bencana *Disaster Information Network* (DIN) yang memperoleh laporan dan data dari *Japan Metrological Agency* (JMA) dan data Pemerintah Jepang. Sistem peringatan dini disiarkan melalui televisi dan multiplatform. NHK telah memiliki peralatan yang canggih dalam manajemen bencana berupa helikopter, *robot camera*, *remote control*, *internet protocol camera*, *drone camera* dan *vibration*, serta *proof camera* yang dapat menyiarkan secara langsung peristiwa bencana dari kamera.

NHK juga memiliki *IPhone Reporting* dan *NHK scoop box* dan bahkan banyak informasi penting yang diperoleh masyarakat dari *Smart Phone*. Belajar dari pengalaman NHK dalam manajemen bencana, maka TVRI sebagai lembaga penyiaran publik di Indonesia seyogianya berperan aktif dalam mitigasi bencana:

- a) TVRI perlu melakukan pemberdayaan SDM dan Teknologi terkait bencana.
- b) Menerapkan *Early Warning System*
- c) Melakukan siaran *breaking News* tentang bencana dan mitigasi bencana
- d) Membangun jaringan informasi bencana dengan BMKG, Badan Negara Penanggulangan Bencana (BNPB), BASARNAS dan Kepolisian Republik Indonesia.

b. Pengembangan Pusdiklat sebagai Universitas

Kedepan TVRI perlu mengembangkan pusdiklat menjadi Universitas *broadcasting* di Indonesia, karena sekarang ini untuk bekerja sudah bukan hanya gelar sarjana saja yang diperlukan, tapi juga *skill*/kemampuan tambahan dan mereka memerlukan sertifikat untuk pengakuan atas kemampuan mereka tersebut. Dari sini kita bisa membangun sekolah untuk menjadi presenter, kameramen, editor, produser dan VJ (*Video Journalist*) dan lain sebagainya. TVRI bisa bekerjasama dengan universitas lain atau pihak-pihak lain yang terkait agar marketnya menjadi banyak.

5. Media Baru

a. TVRI On Demand

Kita lihat secara arsip kita sudah menyimpannya dari sejak tahun 1962 dengan jenis yang beragam. Mulai dari peristiwa Asian Games, serta *file videomantan* Presiden Sukarno dan Mantan Presiden Suharto sampai ke masa Presiden Jokowi saat ini. Sehingga kita bisa membuat beberap tema serial yan bermacam-macam mulai dari budaya, politik dan lain sebagainya. TVRI bisa menjadi *window of Indonesia* dengan berbagai arsip yang kita miliki ini kepada dunia Internasional. TVRI tidak perlu pusing mengenai pendanaan lagi jika hal hal tadi diatas bisa kita lakukan. Karena TVRI tidak lagi akan bergantung pada pendanaan dari Negara, tapi sudah akan mendapatkan *revenue* dari usaha-usaha digital.

TVRI bisa menjadi *content provider* dengan menjual *license* acara acara yang ditayangkan seperti ketoprak, wayang, dan lain-lain. Selain itu juga saya mengusulkan pendanaan dari pajak iklan media. Kalau di Jepang NHK mendapat pendanaan dari pajak TV, yang dipungut dari orang-orang yang memiliki TV di Jepang. Kalau diimplementasikan di masyarakat kita mungkin

akan sulit, oleh karena itu TVRI mengusulkan agar mendapat pendanaan dari pajak iklan media, jumlahnya bisa sekitar 2-3% saja sudah cukup besar, selain itu juga bisa lebih mungkin disetujui karena tidak secara langsung memberikan beban kepada masyarakat luas.

6. Menjaga Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik sangat penting bagi TVRI dalam mengimplementasikan fungsi dan peran sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Oleh karena itu TVRI harus bermanfaat bagi publik sehingga dapat memperoleh dukungan dari penuh dari publik. Sebagai contoh KBS-Koreayang mendapatkan dukungan publik sehingga bermanfaat bagi masyarakatnya. Salah satu manfaat yang diperoleh dari TV publik di Korea adalah harus berada di garda terdepan dalam menjaga *public interest*, yaitu seluruh kepentingan publik yang harus diwakili oleh KBS.

7. Media Kontrol Sosial

TVRI perlu menjadi kontrol sosial (*public watchdog*), berkolaborasi dengan Ombudsman atau lembaga lain yang menampung aduan masyarakat seperti Komnas HAM dengan membuat sebuah program editorial untuk merangkum keluhan-keluhan tersebut, dibahas dan disampaikan kepada kementerian/ lembaga baik Pemerintah maupun swasta yang bertanggung jawab dalam menjawab keluhan-keluhan masyarakat.

Dengan demikian TVRI bisa menjadi referensi media yang netral dan anti-*hoax* serta benar-benar memberitakan fakta sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat. Dalam fungsinya sebagai *public watchdog* TVRI juga diharuskan memiliki *editorial policy* baik di pusat maupun daerah untuk mengakomodir semua keluhan masyarakat agar diketahui oleh pemerintah setempat dan dapat langsung diatasi.

8. Siaran Internasional

Dalam PP No 13 tahun 2005 TVRI memiliki kewajiban untuk memberikan Rencana Induk Lembaga setiap 5 tahun sekali kepada Presiden. Renstra adalah “mutatis mutandis” dengan rencana induk. Namun sebagai penajaman terhadap Renstra TVRI 2015 – 2019 yang tidak dicabut oleh Dewan Pengawas sebelumnya, maka perlu diadakan revisi untuk mencantumkan Visi yang baru yaitu TVRI menjadi lembaga penyiaran kelas dunia. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka TVRI perlu merencanakan siaran internasional.

Berdasarkan penjelasan pasal 12 PP 13 tahun 2005 yang dimaksud dengan:

Siaran internasional adalah siaran yang ditujukan kepada masyarakat yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 13 PP 13 tahun 2005 dinyatakan bahwa stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran televisi publik sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi. Sesuai definisi siaran tersebut TVRI seyogianya menyelenggarakan siaran internasional, dengan menggunakan bahasa internasional. Saat ini TVRI telah menyiarkan *English News Service*, namun masih secara nasional. Program tersebut perlu ditingkatkan ke siaran internasional.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka TVRI perlu mengusulkan perubahan struktur organisasi sehingga terdapat struktur yang menangani siaran internasional. Sebagai referensi siaran internasional adalah TV publik internasional seperti BBC-Inggris dan NHK-Jepang.

Salah satu program BBC yang menyelenggarakan siaran internasional adalah *BBCWorld*. Sementara itu NHK-Jepang juga menyelenggarakan siaran internasional yang disebut *NHK World*. Siaran tersebut ditujukan untuk masyarakat berada di luar negaranya.

B. Disruption Technology

Disruption Technology adalah teknologi yang menggeser teknologi yang sudah mapan dan mengguncang industri atau produk inovatif yang menciptakan industri yang sepenuhnya baru. Teknologi baru terbagi dua kategori yaitu teknologi berkelanjutan dan Teknologi mengganggu (*disruption*). Teknologi yang berkelanjutan sangat bergantung pada peningkatan inkremental dari teknologi yang sudah mapan. Teknologi yang mengganggu tidak dapat dilakukan perbaikan, seringkali menimbulkan masalah kinerja, sehingga dilakukan inovasi dengan temuan teknologi baru. Dalam dunia penyiaran yaitu adanya pergeseran dari teknologi penyiaran analog ke teknologi penyiaran digital. pergeseran baik dalam teknologi transmisi maupun teknologi produksi konten. *Disruption technology* ditandai dengan *artificial intelligence* yaitu Jenis kecerdasan khusus yang ditunjukkan oleh komputer, robotik dan mesin lain yang berfungsi sebagai otak atau pengatur sistem.

Kecerdasan buatan ini digunakan ketika mesin menyalin fungsi kognitif otak manusia dalam belajar dan menyelesaikan masalah. Ketika mesin menjadi semakin mampu, sebagian fungsi manusia digantikan oleh mesin dan fasilitas lain dihapus. Meskipun bidang ini memiliki sejarah panjang, para profesional di bidang ini semakin dekat untuk mencapai kecerdasan buatan.

Gelombang *disruption* dalam *broadcasting* telah mengubah industri penyiaran berubah dari sistem analog ke digital dimana signal video analog di ubah menjadi signal digital berbentuk data. Model bisnis konvensional mengalami tekanan, teknologi beralih ke digital lebih murah dan persaingan dari saingan digital. Industri televisi global berada di tengah-tengah revolusi digital. Video online telah menyebar dan menjangkau semua kalangan, bahkan memberdayakan konsumen untuk menonton program televisi sesuai dengan apa yang diinginkan, kapan dan dimanapun juga.

Aplikasi yang ditemukan sebagai *artificial intelligence* di media penyiaran telah membuka pintu bagi pengembangan katalogisasi, dan monetisasi media baru. Sistem ini memungkinkan otomatisasi tugas dan proses berulang sehingga membutuhkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih sedikit atau lebih efisien. Industri audiovisual dalam beberapa tahun terakhir, mendapatkan perhatian khusus dalam industri *Broadcast & Media*.

Jumlah solusi termasuk sistem *artificial intelligence* untuk pengembangan tugas pengeditan dan manajemen media telah meningkat secara eksponensial, terutama solusi yang berfokus pada tugas berulang dan yang paling mungkin otomatis. Area utama aplikasi *artificial intelligence* adalah katalogisasi dan deteksi metadata, terotomatisasi secara efisien.

Jumlah waktu yang diperlukan untuk katalogisasi konten berkurang menjadi hampir “*real-time*” berkat *artificial intelligence*, yang diterapkan pada pekerjaan sehari-hari di stasiun TV dan dapat menciptakan alat analisis yang kuat bahkan dapat digunakan untuk berita dan produksi siaran langsung.

Keakuratan, kecepatan dan jumlah informasi yang dihasilkan dengan alat *artificial intelligence* membuka pintu bagi banyak aplikasi lain di bidang penyiaran diantaranya: *video on demand, over the top, media asset management, production asset management, web plugging for NRCs. news and live production, ingest, studio playout, MCR playout, traffic & scheduling, monitoring, dan multiplexing.*

Dengan teknologi digital dapat dikembangkan *TVRI On Demand* sebagai salah satu bentuk model bisnis TVRI kedepan terutama terkait dengan diversifikasi layanan konten siaran. Untuk mengembangkan *TVRI On Demand* maka perlu memiliki sistem *archiving* dalam bentuk *Media Asset Management (MAM)* yang mampu melayani kebutuhan *Video on demand* oleh masyarakat, tetapi dengan

biaya yang lebih rendah dan dapat mendistribusikan konten secara lebih efektif.

1. Dampak *Disruption Technology* Terhadap Penggunaan Sumber Daya Manusia.

Dampak dari *disruption technology* tidak hanya pada teknologi penyiaran baik transmisi maupun produksi dan penyiaran, tetapi juga pada penggunaan sumber daya manusia. Dengan *artificial intelligence* dapat mengurangi penggunaan Sumber Daya Manusia pada suatu organisasi termasuk TVRI. Oleh karena itu perlu dilakukan penghitungan secara tetap penggunaan sumber daya manusia di TVRI terkait dengan adanya *disruption technology* ini, sehingga dapat direncanakan kebutuhan SDM untuk jangka waktu Renstra yaitu 2018-2019.

Perhitungan SDM berdasarkan Analisa Beban kerja dan khusus untuk transmisi dapat menggunakan pendekatan *public private partnership* yang berarti bahwa TVRI melakukan kerjasama dengan *public private* untuk mengelola transmisi, dan sebagai jaminan dibuat *Service Level Agreement* (SLA). Untuk itu dalam perhitungan kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu :

1. pendekatan analisa beban kerja
2. pendekatan *public private partnership*

2. Kebutuhan SDM Berdasarkan Analisa Beban Kerja

Analisa kebutuhan SDM di TVRI sejak ditetapkan sebagai lembaga penyiaran publik telah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu

- Tahun 2011 oleh Quantum HRM Internasional
- Tahun 2018 oleh Konsultan.

a. Hasil Analisa Beban Kerja TVRI Tahun 2011 oleh HRM Quantum Internasional

Perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan ABK dilakukan dengan mengidentifikasi rincian pekerjaan dan jumlah alokasi waktu yang dibutuhkan serta beban peralatan dibagi dengan asumsi jam kerja formal, baik untuk tenaga struktural maupun fungsional. Berdasarkan hasil survei terdapat ketidakseragaman /ketimpangan jumlah beban kerja antara satu stasiun penyiaran dengan stasiun penyiaran lainnya, baik tipe stasiun yang sama maupun yang berbeda. Untuk TVRI Pusat terdapat kekurangan SDM sebanyak 28 orang.

Tabel 3.1. Jumlah SDM dan Beban Kerja TVRI Kantor Pusat Tahun 2011.

No	Stasiun Penyiaran	Jumlah SDM	Beban Kerja Jam/Tahun	Jumlah SDM Berdasarkan Beban Kerja	Kelebihan	Kekurangan
1	Direktorat Program & Berita	730	276.467	742	-	12
2	Direktorat Keuangan	79	272.705	80	-	1
3	Direktorat Teknik	173	269.075	155	16	-
4	Direktorat Umum	287	269.579	265	22	-
5	Direktorat Pengembangan & Usaha	76	272.003	60	16	-
6	Satuan Pengawasan Internal	23	273.491	32	-	9
7	Puslitbang	17	243.161	19	-	2
8	Pusdiklat	56	276.935	60	-	4
	Jumlah			1.413	54	28

Tabel 3.2. Jumlah SDM dan Beban Kerja Stasiun Penyiaran Daerah 2011

NO	Stasiun Penyiaran	Jumlah SDM	Beban Kerja Jam/Tahun	Jumlah SDM Berdasarkan Beban Kerja	Kelebihan	Kekurangan
A	Tipe A					
1	TVRI Stasiun Jawa Timur	349	276.467	265	84	-
2	TVRI Stasiun Jawa Barat	301	272.705	263	38	-
3	TVRI Stasiun Jawa Tengah	245	269.075	260	-	15
4	TVRI Stasiun Sumatera Utara	296	269.579	260	36	-
5	TVRI Stasiun Sumatera Selatan	232	272.003	262	-	30
6	TVRI Stasiun Sulawesi Selatan	263	273.491	262	-	-
7	TVRI Stasiun DKI Jakarta & Banten	100	243.161	240	-	140
8	TVRI Stasiun Kalimantan Timur	155	276.935	262	-	107
9	TVRI Stasiun DI Jogjakarta	272	248.033	244	28	-
10	TVRI Stasiun Bali	175	268.175	259	-	84
11	TVRI Stasiun NAD	214	326.759	303	-	89
B	Tipe B					
12	TVRI Stasiun Sulawesi Utara	140	271.979	258	-	118
13	TVRI Stasiun Sumatera Barat	148	286.295	268	-	120
14	TVRI Stasiun Maluku	150	281.591	265	-	115
15	TVRI Stasiun Papua	97	288.671	270	-	173
16	TVRI Stasiun Kalimantan Selatan	101	258.047	248	-	147
17	TVRI Stasiun Kalimantan Tengah	99	265.643	253	-	154
18	TVRI Stasiun Jambi	79	272.579	258	-	179
19	TVRI Stasiun Riau	103	277.679	262	-	159
20	TVRI Stasiun Kalimantan Barat	118	282.227	265	-	147
21	TVRI Stasiun Lampung	118	256.583	247	-	129
22	TVRI Stasiun Bengkulu	59	261.239	250	-	191
23	TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur	137	290.351	271	-	131
24	TVRI Stasiun Sulawesi Tengah	94	287.543	269	-	175
C	Tipe C					
25	TVRI Stasiun Gorontalo	51	236.159	236	-	185
26	TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat	57	259.859	250	-	193
27	TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara	80	273.299	260	-	180
28	TVRI Stasiun Bangka Belitung					
	Jumlah	4.233	7.346.127	7.010	186	2.961

Perkiraan kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja pada masing-masing 28 stasiun penyiaran daerah tidak termasuk TVRI Stasiun Bangka Belitung sebanyak 7.010. Hal ini menunjukkan implikasi dari ketidakseragaman dan ketimpangan jumlah beban kerja antara satu stasiun dengan stasiun lainnya maupun di Pusat. Akibatnya terjadi kekurangan SDM sekitar 2.961 orang, sementara itu kekurangan SDM di Kantor Pusat sebanyak 28 orang. dengan demikian kekurangan SDM TVRI Tahun 2011 mencapai 2.961+ 28 orang menjadi 2.989 orang.

b. Hasil Analisa Beban Kerja Tahun 2018

Berdasarkan hasil survei terhadap rincian pekerjaan dan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh aktivitas tersebut diketahui bahwa:

1. Terdapat ketidakseragaman/ketimpangan jumlah beban kerja antara satu stasiun penyiaran dengan stasiun penyiaran lainnya, baik pada tipe yang sama maupun di antara masing-masing tipe. Padahal tuntutan terhadap penyelenggaraan program di antara satu stasiun penyiaran dengan stasiun penyiaran lainnya adalah sama, dalam hal ini setiap stasiun televisi baik pada tipe A, B, maupun C wajib menyelenggarakan siaran selama 4 jam dalam satu hari. Di samping itu, jumlah peralatan – baik peralatan produksi dan penyiaran maupun peralatan transmisi di antara satu stasiun televisi dengan stasiun televisi lainnya memiliki variasi nilai yang beragam. Tetapi pada intinya jumlah tersebut tidak berbanding lurus dengan tipe stasiun, jumlah pegawai, maupun tuntutan program yang harus diselenggarakan oleh masing-masing stasiun penyiaran. Sebagai contoh, berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK), TVRI Stasiun Sumatera Barat memiliki jumlah beban kerja yang lebih besar dibandingkan dengan TVRI Stasiun Sumatera Selatan, yakni 268 jam untuk TVRI Stasiun Sumatera Barat dan 262 untuk TVRI

Stasiun Sumatera Selatan. Ini menunjukkan bahwa pendistribusian pegawai pada masing-masing stasiun penyiaran tidak dilaksanakan berdasarkan alokasi beban kerja yang berkorelasi terhadap kewajiban siaran, jumlah sarana produksi dan penyiaran, serta jumlah peralatan transmisi lainnya. Jumlah pegawai di LPP TVRI berdasarkan *database* Analisis Beban Kerja (ABK) Kepegawaian LPP TVRI seluruhnya adalah 4.767 pegawai.

Tabel 3.3.
JUMLAH BEBAN (BOBOT) KERJA JABATAN
(DALAM MENIT)

UNIT ORGANISASI		JUMLAH BEBAN (BOBOT) KERJA JABATAN (DALAM MENIT)	JUMLAH KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI		JUMLAH PEJABAT/ PEGAWAI YANG ADA	+/-
1	Direktorat Program dan Berita	57.714.480	558,59	559	514	-44,59
2	Direktorat Keuangan	5.251.680	83,94	84	66	-17,94
3	Direktorat Teknik	28.654.560	370,98	371	244	-126,98
4	Direktorat Umum	10.877.040	227,07	227	176	-51,07
5	Direktorat Peng, dan Usaha	8.106.480	123,59	124	94	-29,59
6	SPI	2.239.920	37,11	37	24	-13,11
7	Puslitbang	1.436.400	18,95	19	17	-1,95
8	Pusdiklat	3.939.840	50,72	51	41	-9,72
9	TVRI Stasiun Jawa Timur	21.481.200	285,35	285	238	-47,35
10	TVRI Stasiun Jawa Barat	17.250.480	226,59	227	196	-30,59
11	TVRI Stasiun Jawa Tengah	18.362.880	240,04	240	204	-36,04
12	TVRI Stasiun Sumatera Utara	14.317.920	191,86	192	177	-14,86
13	TVRI Stasiun Sumatera Selatan	15.197.760	194,08	194	148	-46,08
14	TVRI Stasiun Sulawesi Selatan	19.701.360	243,63	244	194	-49,63
15	TVRI Stasiun DKI Jakarta	11.656.800	134,90	135	106	-28,9
16	TVRI Stasiun Kalimantan Timur	10.512.720	124,01	124	121	-3,01
17	TVRI Stasiun D,I,Y,	21.700.080	272,39	272	219	-53,39
18	TVRI Stasiun Bali	14.219.280	187,49	187	160	-27,49
19	TVRI Stasiun NAD	15.127.200	197,10	197	170	-27,1
20	TVRI Stasiun Sulawesi Utara	9.514.080	113,14	113	102	-11,14
21	TVRI Stasiun Sumatera Barat	10.900.080	133,39	133	107	-26,39
22	TVRI Stasiun Maluku	13.205.520	163,41	163	129	-34,41
23	TVRI Stasiun Papua	8.295.120	108,21	108	87	-21,21
24	TVRI Stasiun Kalimantan Selatan	9.280.800	120,90	121	93	-27,9
25	TVRI Stasiun Kalimantan Tengah	8.837.280	111,74	112	92	-19,74
26	TVRI Stasiun Jambi	22.618.800	88,15	88	72	-16,15
27	TVRI Stasiun Riau	7.043.760	86,83	87	74	-12,83
28	TVRI Stasiun Kalimantan Barat	8.750.880	108,54	109	89	-19,54
29	TVRI Stasiun Lampung	8.400.960	106,68	107	98	-8,68
30	TVRI Stasiun Bengkulu	5.585.040	67,57	68	59	-8,57
31	TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur	10.095.120	132,21	132	102	-30,21
32	TVRI Stasiun Sulawesi Tengah	9.385.920	114,36	114	105	-9,36
33	TVRI Stasiun Gorontalo	5.857.920	75,36	75	62	-13,36
34	TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat	7.179.120	91,71	92	71	-20,71
35	TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara	11.072.160	150,78	151	98	-52,78
36	TVRI Stasiun Sulawesi Barat	4.746.240	58,92	59	53	-5,92
37	TVRI Stasiun Bangka Belitung	3.173.760	41,08	41	37	-4,08
	JUMLAH	461.690.640	5.641,37	5.641	4639	-1002,37

Total jumlah pegawai LPP TVRI berdasarkan data tahun 2018 adalah sebanyak 4.639 orang dengan perkiraan kebutuhan berdasarkan beban kerja di masing-masing direktorat kantor pusat dan stasiun televisi daerah adalah sebanyak 5.461 orang pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa implikasi dari ketidakseragaman/ketimpangan jumlah beban kerja antara satu stasiun televisi dengan stasiun televisi lainnya, baik pada tipe yang sama maupun di antara masing-masing tipe, mengakibatkan terjadinya kekurangan pegawai sekitar 1.003 orang pegawai.

c. Selisih Kekurangan Kebutuhan SDM Berdasarkan Analisa Beban kerja Tahun 2011 dan Tahun 2018.

Kekurangan sumber daya manusia TVRI berdasarkan hasil analisis beban kerja tahun 2011 dan tahun 2018 cukup besar. Ini berarti terdapat efisiensi yang cukup besar.

- Kekurangan SDM berdasarkan ABK Tahun 2011 sebanyak 2.989 orang
- Kekurangan SDM berdasarkan ABK Tahun 2018 sebanyak 1.003 orang
- Selisih kekurangan SDM berdasarkan ABK tahun 2011 dan 2018 sebanyak 1.986 orang.

Dengan demikian terjadi efisiensi yang cukup besar sejak tahun 2011 sampai tahun 2018 yang mencapai 1.986 orang. Untuk itu diperlukan langkah terobosan oleh jajaran direksi melakukan analisa kebutuhan SDM TVRI secara tepat untuk jangka waktu Renstra periode tahun 2018-2019. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan SDM setiap tahun.

d. Analisa Kebutuhan SDM Periode Renstra 2018-1019

Analisa kebutuhan SDM periode Renstra tahun 2018-2019 dihitung dengan 2 pendekatan yaitu:

- Kekurangan SDM tahun 2018 berdasarkan analisa ABK tahun 2018
- *Public Private Partnership*.

d.1. Pendekatan ABK Tahun 2018

Berdasarkan Analisa Beban Kerja tahun 2018 terdapat kekurangan SDM TVRI sebanyak 1.003 orang. kekurangan SDM tersebut tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu 1 tahun, karena setiap tahun jumlah SDM yang pensiun cukup tinggi. Oleh karena itu Analisa kebutuhan SDM dalam jangka waktu renstra dapat dipenuhi dengan membagi jumlah kekurangan pegawai berdasarkan ABK dengan jangka waktu Renstra yaitu dibagi dengan 6 tahun. Rata-rata pemenuhan SDM untuk menutupi kekurangan SDM 1.003 selama 5 tahun adalah 200 orang. Perhitungan SDM periode Renstra digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4: Penambahan SDM TVRI periode Renstra 2018-2019 Berdasarkan Analisis Beban Kerja.

NO	Uraian	2018	2019	Jumlah
1	Pensiun	243	296	539
2	Kekurangan SDM berdasarkan ABK	201	201	402
3	Jumlah	444	497	941
4	Rekrutmen	145	49	194
5	Kekurangan Rekrutmen	299	448	747
6	Kekurangan rekrutmen 2018 299 dipenuhi dalam 4 tahun =299/4		74	74
7	Penambahan SDM		522	522

Berdasarkan perhitungan ABK penambahan SDM TVRI setiap tahun dalam periode Renstra mencapai 2.768 orang, dimana tahun 2018 telah dilakukan rekrutmen SDM sebanyak 194 orang. Penambahan SDM TVRI untuk menutupi kekurangan SDM sesuai ABK dan jumlah SDM yang pensiun yang jumlah cukup tinggi setiap tahun. Hal ini karena sejak tahun 2011 sampai saat ini tidak ada penambahan SDM TVRI.

d.2. Pendekatan *Public Private Partnership*

Pendekatan *public private partnership* adalah penggunaan SDM di transmisi TVRI dilakukan melalui pola kerjasama dengan *public private*, dan TVRI melakukan *Service Level Agreement* (SLA) dengan *public private* untuk menjamin pelayanan siaran TVRI berlangsung dengan baik. Untuk itu perlu diketahui analisa kebutuhan SDM berdasarkan ABK untuk profesi transmisi di TVRI dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Kebutuhan profesi Transmisi Berdasarkan ABK

NO	Profesi Transmisi	Kebutuhan Berdasarkan ABK	Jumlah Profesi Saat ini	Kekurangan
1	Koordinator Satuan Transmisi	142	121	21
2	Operator Pemancar	142	122	20
3	Operator Pemancar (Teknisi Transmisi)	369	280	89
4	Operator Transmisi	20	19	1
5	Operator Transmisi	85	64	21
6	Penyusun Laporan Data Transmisi Wilayah Barat	3	2	1
7	Penyusun Laporan Data Transmisi Wilayah Tengah	3	2	1
8	Teknisi Pemancar	142	114	28
9	Teknisi Pemeliharaan Transmisi	4	1	3
	Jumlah	910	725	185

Berdasarkan analisa profesi transmisi berdasarkan ABK tersebut diketahui kebutuhan SDM berdasarkan ABK untuk transmisi sebanyak 910 orang. Oleh karena itu perhitungan kebutuhan SDM transmisi dengan pendekatan *public private partnership* adalah dengan memperhitungkan jumlah kebutuhan profesi

transmisi di TVRI berdasarkan ABK. Artinya profesi transmisi sebanyak 910 orang akan dikelola melalui kerjasama dengan *public private*. Dengan pendekatan ini penggunaan SDM TVRI dapat dilakukan efisiensi yang cukup besar.

Tabel 3.6 Alisa Kebutuhan SDM Transmisi *Public Private Partnership*

NO	Uraian	2018	2019	Jumlah
1	Pensiun	243	296	539
2	Kekurangan SDM berdasarkan ABK dikurangi SDM Transmisi (1003-910=93)	18	19	37
3	Jumlah	261	315	576
4	Rekrutmen	145	49	194
5	Kekurangan Rekrutmen	116	266	382
6	Kekurangan rekrutmen 2018 299 dipenuhi dalam 4 tahun =116/4		29	29
7	Penambahan SDM		295	295

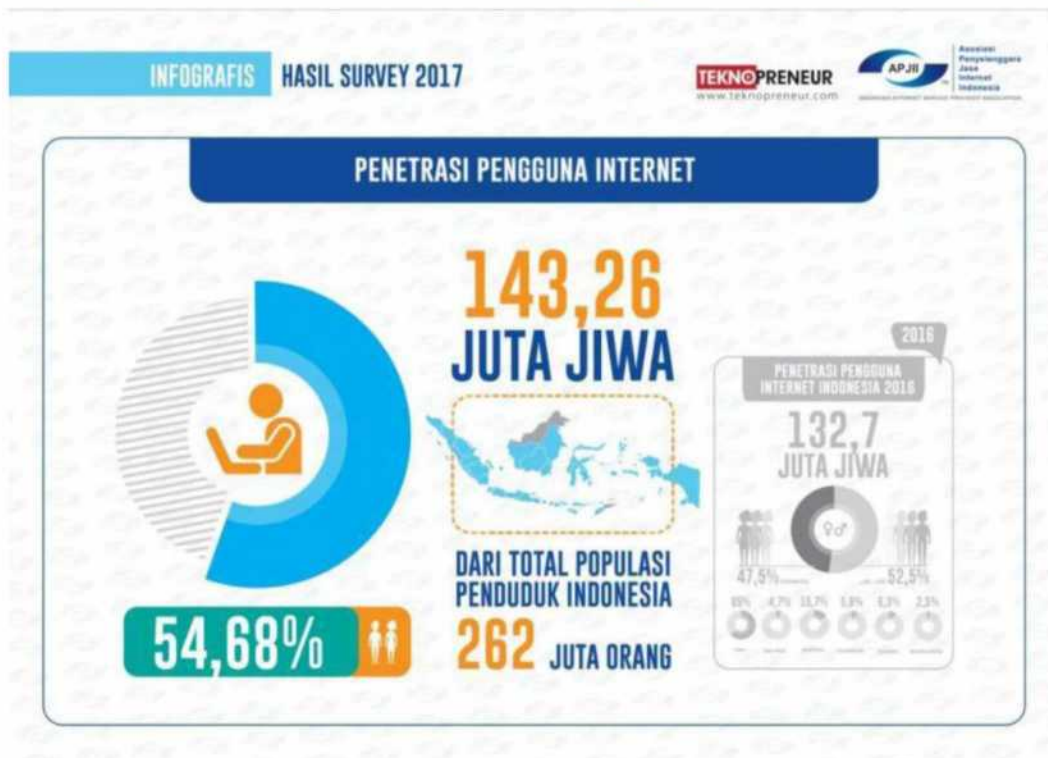
Tabel diatas memberikan gambaran bahwa kebutuhan SDM TVRI dengan pendekatan *public private partnership* lebih efisien dengan pendekatan ABK. Dengan demikian penambahan SDM TVRI periode Renstra 2018-2019 adalah sebanyak 295 pada tahun 2019.

C. Perkembangan Broadband di Indonesia

Broadband memegang peran penting dalam berkontribusi aktivitas masyarakat secara individual dalam memperkuat dan menjaga keberlangsungan pengembangan sosial dan ekonomi termasuk transformasi politik dan institusional, juga pengembangan pengetahuan masyarakat terhadap empat pilar dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kebebasan dalam berekspresi, pendidikan yang berkualitas, akses terhadap informasi dan pengetahuan serta penghormatan dan pengembangan budaya dan keberagaman.

Jumlah pengguna internet tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 10,56 juta jiwa dari hasil survei pada tahun 2016. Hal ini merupakan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017.

Gambar 3.1 Penetrasi Pengguna Internet

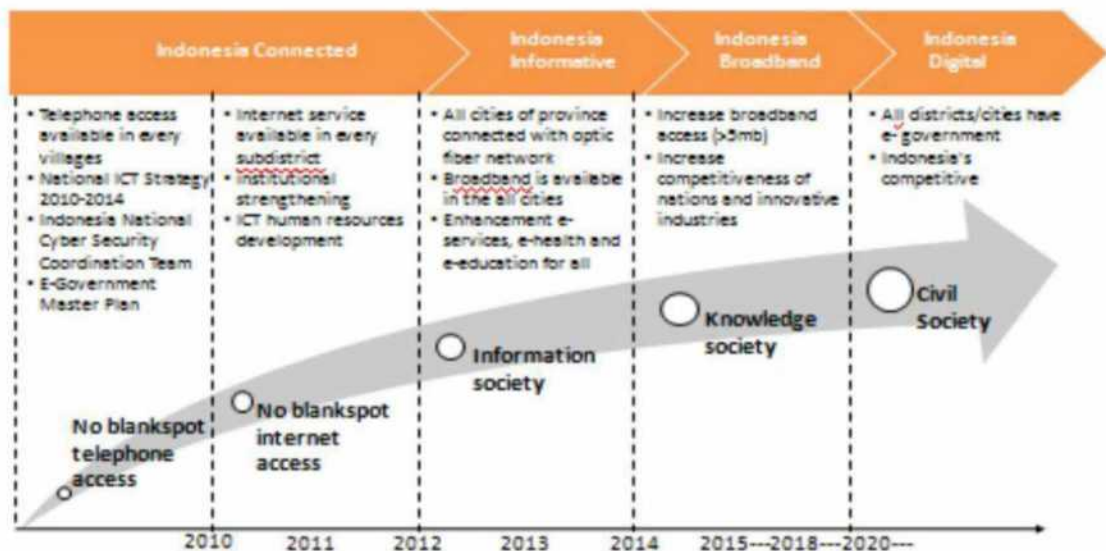


Broadband yang dibangun dengan teknologi menstimulasi adanya inovasi-inovasi baru dan menjadi menginspirasi generasi muda untuk menciptakan aplikasi baru, layanan dan konten pada berbagai industri. Untuk memahami peran broadband terhadap ekonomi maka perlu juga dipahami bagaimana *broadband* berdampak pada ekonomi. Pengembangan broadband mempunyai dua dampak yaitu dampak secara langsung pada pengembangan investasi pada infrastruktur. Dampak secara langsung akan meningkatkan penetrasi perumahan dan penetrasi perusahaan dimana penetrasi perumahan akan mendorong *consumer surplus* dan pendapatan perumahan. Penetrasi perusahaan akan meningkatkan produktifitas *Gross Domestic*

Product. Broadband adalah "KATALISATOR dalam digital ekonomi, yang dapat menimbulkan adanya *digital dividend*. Sifat katalis yang akan menjadi pengakselerasi efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi pada berbagai sektor, termasuk pada sektor penyiaran. Dengan demikian *broadband* dan digitalisasi penyiaran memiliki keterkaitan dan dapat dilakukan secara terintegrasi. Oleh karena itu Target pengembangan *broadband* di Indonesia adalah tahun 2018 adalah era Indonesia *broadband* dan pada tahun 2020 menuju era Indonesia digital.

Gambar 3.2 Target Pengembangan Broadband

Target Pengembangan Broadband di Indonesia



Sumber : Kominfo

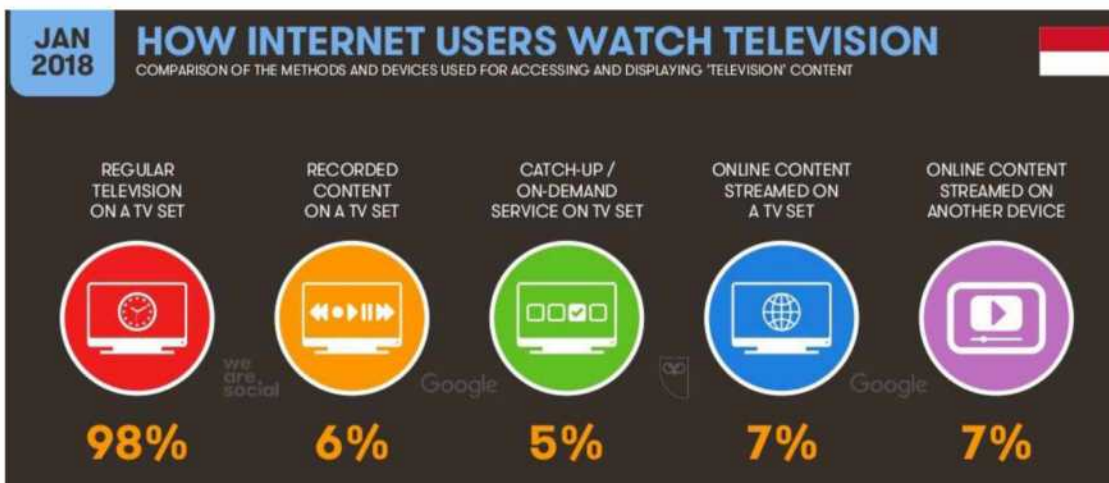
Penetrasi digital di Indonesia sampai dengan tahun 2018 memperlihatkan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dari total jumlah penduduk Indonesia 265,4 juta pengguna internet mencapai 50% atau sebanyak 132,7 juta jiwa. sedangkan mengguna media sosial 49%, pengguna mobile merupakan penetrasi tertinggi mencapai 177,9 juta jiwa atau 67% dari penduduk Indonesia.

Gambar 3.3 Digital In Indonesia



Namun demikian pengguna internet melalui TV set mencapai penetrasi tertinggi di Indonesia 98%. Sedangkan *recorder content on TV* hanya 6 %, *on demand service on TV set* sebesar 5%. *On line conten streaming on TV set* 7%.

Gambar 3.4 How Internet Users



D. Pemenuhan Jangkauan Siaran Nasional

1. Perencanaan Pengembangan Stasiun Daerah

Saat ini TVRI telah memiliki 29 stasiun penyiaran daerah yang program-program siarannya mengedepankan warna dan kearifan lokal dalam koridor NKRI. Jumlah ini tentunya belum mencakup seluruh provinsi yang ada, yakni 34 provinsi untuk memuhi keinginan sesuai dengan RPJM TVRI agar mencapai 90 persen wilayah Indonesia dan 88 persen jumlah penduduk, maka diperlukan setidaknya dua strategi besar yakni:

- a. Menambah jumlah kualitas dan kuantitas pemancar
- b. Menambah jumlah stasiun daerah sesuai dengan jumlah provinsi dan kota-kota kedua terbesar.

Untuk itu ke depan provinsi-provinsi yang belum memiliki stasiun penyiaran TVRI diprioritaskan pengadaannya. Sejalan dengan era konvergensi teknologi yang bermuara pada ASO tahun 2018, keberadaan TVRI Daerah harus ditingkatkan peran dan fungsinya di tiap provinsi.

Untuk itu selain menambah jumlahnya sesuai dengan jumlah provinsi yang ada, juga diperlukan berbagai upaya perbaikan dan pembaruan infrastrukturnya sehingga kualitas layanan kepada masyarakat meningkat.

Selain menambah jumlah Stasiun Penyiaran TVRI Daerah, langkah strategis yang juga harus dilaksanakan dalam lima tahun ke depan adalah meningkatkan status kelas/tipe TVRI Daerah. Peningkatan kelas/tipe TVRI Daerah tersebut direncanakan selesai pada tahun 2019

- a) Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke Kawasan 3T menyebabkan masuknya paham ideologi lain seperti radikalisme, komunisme dan liberal kapitalisme yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Kehidupan sosial ekonomi di kawasan perbatasan umumnya dipengaruhi oleh negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi perbatasan sangat tergantung pada negara tetangga, Hal ini pun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Selain itu situasi politik yang terjadi di negara tetangga akan turut mempengaruhi situasi keamanan daerah perbatasan.
- c) Daerah perbatasan yang merupakan wilayah berkategori 3T disebabkan oleh lokasi yang relatif terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. Rendah dalam tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Rendah dalam tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dan langka nya informasi pembangunan karena keterbatasan cakupan area siaran (*blank spot*).

E. Peningkatan Jumlah Penonton

Dalam survey Indeks Kualitas Program dan Berita TVRI Tahun 2018 oleh lembaga riset media Poveetik disimpulkan bahwa TVRI memiliki penonton loyal terutama di acara kebudayaan. Di bawah ini adalah rangkuman eksekutif atas profil penonton dan persepsinya tentang TVRI. Sebanyak 68% responden masih menonton TVRI dalam sebulan terakhir (April-Mei 2018)

- a. Persentase responden yang masih menonton TVRI juga tersebar merata di setiap golongan usia
- b. Akan tetapi, responden umumnya tidak menonton TVRI lebih dari 2 jam setiap harinya
- c. Berdasarkan acara yang ditonton oleh responden, terlihat bahwa TVRI memiliki niche di penggemar acara kebudayaan

- d. Akan tetapi, nama acara TVRI yang paling banyak disebut oleh responden adalah “Dunia Dalam Berita,” menegaskan statusnya sebagai acara TVRI paling ikonik

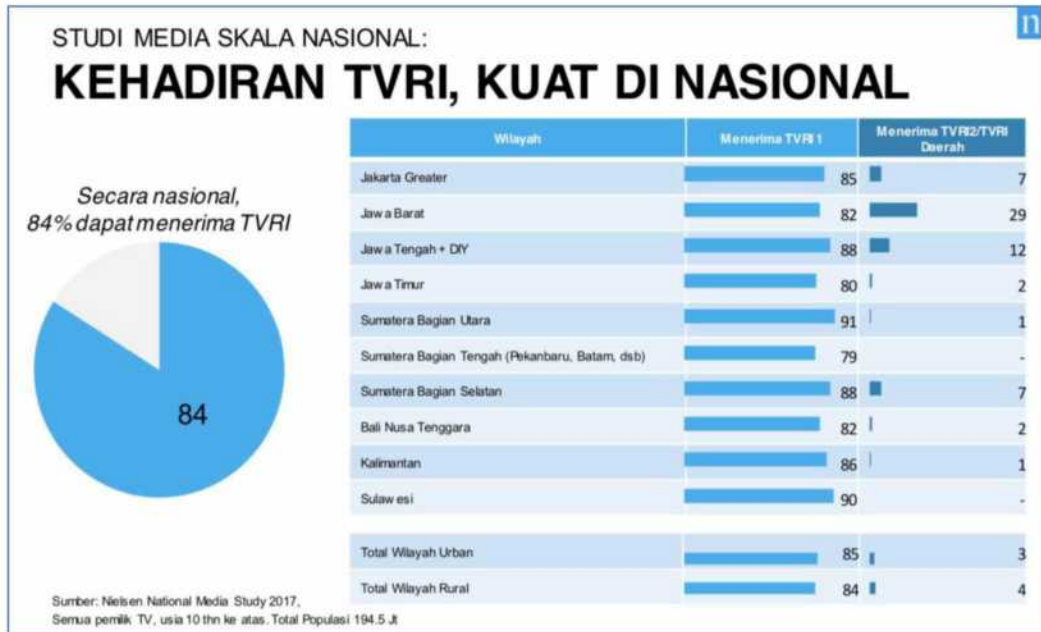
Kemudian dari 32% responden yang sudah tidak lagi menonton TVRI, mayoritas menyebutkan konten/visual sebagai alasan utama, yaitu:

- a. Bagi responden, konten TVRI yang tidak variatif dan kualitas gambarnya yang tidak stabil menguatkan kesannya sebagai televisi jadul.
- b. Responden cenderung lebih terintimidasi oleh kesan jadul yang begitu melekat pada TVRI ketimbang mempersoalkan konten-konten acaranya
- c. Hal ini mengindikasikan bahwa responden akan tertarik untuk menonton TVRI apabila TVRI mampu melepaskan diri dari asosiasi negatifnya tersebut
- d. Sebagian responden bahkan menyarankan agar TVRI dapat meremajakan seluruh sumberdayanya atau melakukan *rebranding* apabila memungkinkan.

Menurut Nielsen 2017, hasil riset di 11 kota Nielsen menunjukkan bahwa 84 persen pemilik televisi mempunyai *channel* TVRI Nasional (TVRI-1). Di Jakarta dan sekitarnya dan Pulau Jawa bahkan mencapai 88 persen. Di Sumatera dan Sulawesi tingkat penerimaan TVRI mencapai 90 persen. Hanya di Sumatera Bagian Tengah (sebagian Riau dan Batam) saja yang tingkat penerimannya di bawah 80%. Wilayah Sumatera Tengah adalah wilayah yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, sehingga beberapa rumah tangga lebih memilih *channel* negara tetangga.

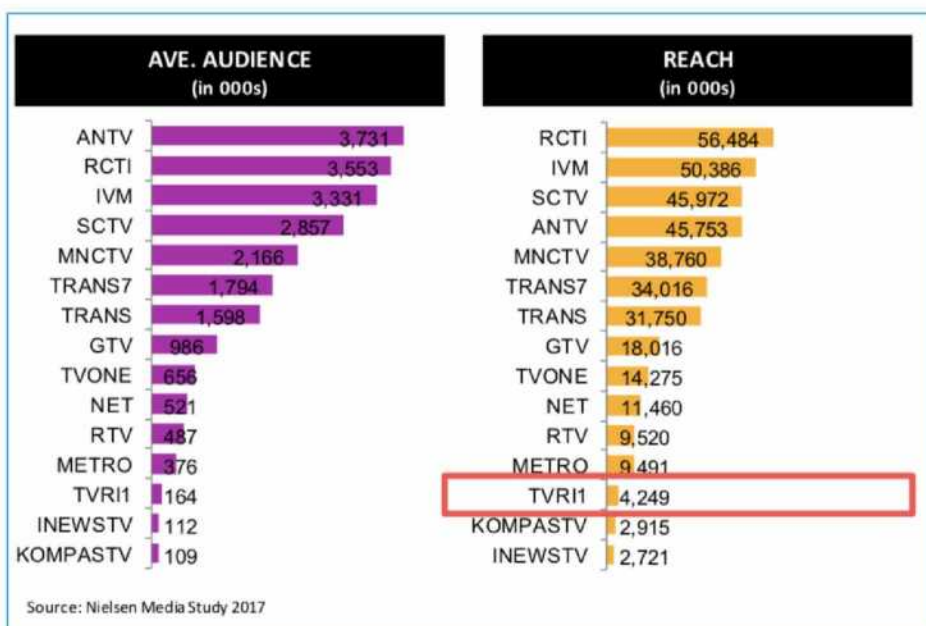
Di bawah ini data selengkapnya penerimaan TVRI di level nasional berdasarkan hasil studi media skala nasional yang dilakukan Nielsen tahun 2017.

Grafik 3.1. Studi Media Skala Nasional Menerima kehadiran TVRI



Meski secara nasional kuat, tidak berarti TVRI memiliki jumlah penonton yang masif. Menurut riset Nielsen tahun 2017, TVRI hanya ditonton 4,5 juta pemirsanya saja. Data ini berdasarkan *audience share* TVRI tahun 2017 yang bertada di kisaran 1,64 persen saja.

Grafik :3.2 Hasil Riset Nielsen pada 11 Kota di Indonesia



Nielsen memang bukan satu-satunya data karena riset Nielsen hanya dilakukan di 11 kota besar. Sementara TVRI jangkauannya banyak di rural area. Dengan 361 pemancar setidaknya wilayah yang terlayani TVRI mencapai 165 juta penduduk atau sekitar 41 juta rumah tangga di Indonesia.

Menurut FGD yang dilakukan oleh lembaga riset Provetik, asosiasi TVRI justru melekat sebagai saluran berita dan kebudayaan. Persepsi TVRI sebagai TV Berita justru mengalahkan televisi dengan *positioning* sebagai tv berita seperti TV One, Metro TV dan Kompas TV. Ini dilihat dari hasil survei Provetik bahwa *Dunia Dalam Berita* sangat digemari dan disebut sebagai “ikonik” disusul oleh program berita lain seperti Berita pagi, Berita siang dan Berita malam.

Grafik 3.3: Hasil Riset Provetik Persepsi Publik tentang Preferensi Acara TVRI Tahun 2018

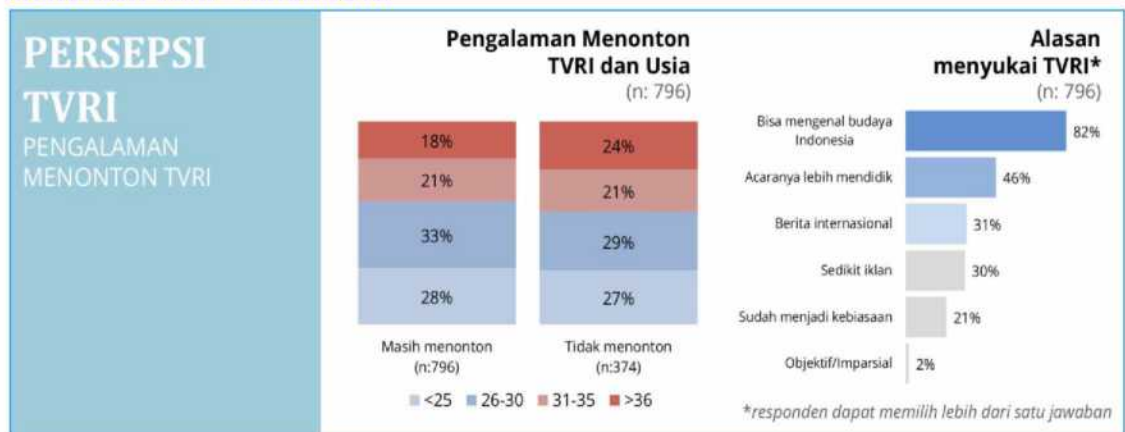


Dalam tahun 2018, acara yang paling banyak dibicarakan adalah Putaran Final Piala Thomas dan Uber Cup. Hasil survei Provetik bahkan menunjukkan bahwa acara Thomas dan Uber dalam satu minggu menjadi trending topic nasional di social media twitter. Selain di social media Piala Thomas dan Uber juga mampu meningkatkan kepemirsaaan TVRI menjad 5 kali lebih tinggi dari base line minggunya. Bahkan bisa lebih tinggi di atas TV One dan Net TV dengan angka

Politik anggaran terhadap TVRI menjadi penting untuk meningkatkan jumlah pemirsa TVRI. Secara normal anggaran program rata-rata industri saat ini berkisar di antara 500 miliar sampai 1,2 triliun rupiah. Karenanya harus ada keberpihakan terhadap penambahan anggaran. Kedua, peningkatan kualitas penerimaan yang ditandai dengan kualitas infrastruktur TVRI. Ketiga, adalah soal awareness, persepsi jadul dan harapan publik agar TVRI menjadi televisi publik sekelas BBC menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan alternatif tontonan di tengah derasnya program-program yang tidak mendidik.

Menarik kembali disimak survei Lembaga riset Provetik bahwa responden yang masih menonton TVRI terdistribusi secara merata di tiap golongan usia. Ketika ditanya apa yang membuat mereka suka pada TVRI, mayoritas menyatakan karena TVRI membuat mereka kenal pada budaya lokal. Dalam hal ini, acara budaya lokal memang telah menjadi keunikan TVRI yang tidak banyak ditemukan di channel lain

Grafik 3.5. Hasil Riset Provetik Persepsi Publik tentang Pengamalan Menonton TVRI Tahun 2018



Bagi kebanyakan responden yang tidak lagi menonton TVRI, konten/visual tampaknya menjadi persoalan utama. Responden mempersoalkan konten TVRI yang kurang kekinian dan tidak variatif serta kualitas gambar yang tidak stabil. Mereka menyatakan baru akan menonton TVRI apabila sudah seperti BBC yang kontennya lebih variatif dan kualitas gambarnya sudah HD. Hal ini mengindikasikan

bahwa citra TVRI sebagai TV jadul masih melekat di benak responden yang tidak lagi menonton TVRI .

Grafik 3.6. Hasil Riset Provetik Persepsi Publik Tentang Responden yang tidak menonton TVRI tahun 2018



F. Pengembangan Tipe Stasiun Penyiaran

Pengembangan stasiun penyiaran menjadi salah satu program strategis yang akan ditempu untuk meningkatkan klasifikasi stasiun penyiaran dari Tipe B ke Tipe A dan dari Tipe C ke Tipe B, sedangkan Tipe C diperuntuhkan untuk stasiun perintisan. Saat ini TVRI telah memiliki 29 stasiun penyiaran daerah yang program-program siarannya mengedepankan warna dan kearifan lokal dalam koridor NKRI. Jumlah ini tentunya belum mencakup seluruh provinsi yang ada, yakni 34 provinsi untuk memuhi keinginan sesuai dengan RPJM TVRI agar mencapai 90 persen wilayah Indonesia dan 88 persen jumlah penduduk, maka diperlukan setidaknya dua strategi besar yakni:




- a) Menambah jumlah kualitas dan kuantitas pemancar
- b) Menambah jumlah stasiun daerah sesuai dengan jumlah provinsi dan kota-kota kedua terbesar.

Untuk itu kedepan provinsi-provinsi yang belum memiliki stasiun penyiaran TVRI diprioritaskan pengadaannya. Sejalan dengan era konvergensi teknologi yang bermuara pada rencana ASO tahun 2020, keberadaan TVRI daerah harus

ditingkatkan peran dan fungsinya di tiap provinsi. Untuk itu selain menambah jumlahnya sesuai dengan jumlah provinsi yang ada, juga diperlukan berbagai upaya perbaikan dan pembaharuan infrastrukturnya sehingga kualitas layanan kepada masyarakat meningkat.

Selain menambah jumlah Stasiun Penyiaran TVRI Daerah, langkah strategis yang juga harus dilaksanakan dalam lima tahun ke depan adalah meningkatkan status kelas/tipe TVRI Daerah. Peningkatan kelas/tipe TVRI Daerah tersebut direncanakan selesai pada tahun 2019.

Tabel 3.7: Rencana Pengembangan Tipe TVRI Penyiaran Daerah

	TVRI TIPE A	TVRI TIPE B	TVRI TIPE C	TOTAL
				
TAHUN 2018	17	12	3	32
TAHUN 2019	19	12	3	34

Penambahan dan peningkatan kelas stasiun daerah memerlukan perumusan arah pelaksanaan program pengembangan stasiun penyiaran daerah sebagai berikut:

- a) Peningkatan jumlah dan status Stasiun Penyiaran
- b) Peningkatan Pemberdayaan stasiun penyiaran daerah untuk mengembangkan warna dan kearifan lokal, sarana informasi dan komunikasi antar warga masyarakat dan pemerintah.
- c) Peningkatan pemberdayaan industri kreatif

Outcome yang diharapkan dari Program Pengembangan Stasiun Penyiaran Daerah Pencapaiannya diukur dengan indikator sebagai berikut

- a) Jumlah stasiun penyiaran daerah
- b) Jumlah peningkatan status stasiun penyiaran daerah
- c) Persentase peningkatan konten warna kearifan lokal
- d) Persentase peningkatan sebagai sarana informasi dan komunikasi antar warga masyarakat dan pemerintah.

1. Kebijakan dan Strategis Restrukturisasi Sektor Penyiaran

Untuk mengimplementasikan agenda dan sasaran pembangun komunikasi dan informatika, maka diperlukan kebijakan dan strategi restrukturisasi sektor penyiaran sehingga Indonesia dapat mempersiapkan diri menghadapi era digitalisasi. Era digitalisasi akan ditandai dengan analog *switch off* yang akan berlangsung pada beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu kebijakan dan strategi restrukturisasi sektor penyiaran dipaparkan sebagai berikut :

- a) Memperkuat peran pemerintah dalam pengaturan prasarana dan pengelolaan spektrum
- b) Memperkuat peran pemerintah dalam pengaturan prasarana dan pengelolaan spektrum frekuensi radio
- c) Menata ulang spektrum frekuensi radio untuk penyiaran guna mengakomodasi penyiaran sistem digital dan mendukung layanan pitalebar

- d) Memastikan tidak terjadinya praktek monopoli dan penguasaan oleh kelompok tertentu dalam sektor penyiaran
- e) Memperkuat Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI) sebagai lembaga penyiaran yang independen, netral, tidak komersial, dan memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat sehingga mampu menjadi rujukan dan penyeimbang berita
- f) Merevitalisasi prasarana Lembaga Penyiaran Publik dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan
- g) Mempercepat perluasan jangkauan siaran Lembaga Penyiaran Publik dengan mendorong pemanfaatan dan pengembangan

Dalam kebijakan dan strategi restrukturisasi sektor penyiaran posisi Lembaga Penyiaran memperoleh perhatian khusus melalui strategi memperkuat lembaga penyiaran publik baik TVRI dan RRI, serta revitalisasi prasarana dan perluasan jangkauan siaran. Dengan adanya perhatian khusus ini maka LPP TVRI perlu merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi restrukturisasi sektor penyiaran di Indonesia, sehingga dapat memberikan benefit bagi masyarakat.

2. Model Bisnis Penyiaran dan Struktur Penyelenggaraan Penyiaran Digital

Saat ini siaran Terrestrial *Free to Air* TVRI dijalankan dengan dua system yaitu dengan Analog UHF dan VHF Terrestrial di 248 lokasi dan *Digital Terrestrial Format* DVBT2 di 63 lokasi. Dari 248 lokasi Pemancar Analog terdapat 54 Pemancar dengan sistem *Dual Cast* (Analog & Digital DVBT2) namun karena belum dilengkapi dengan *Head End* maka Pemancar tersebut dioperasikan dengan sistem Analog. Di tahun 2019 ada rencana bantuan dari Kominfo untuk mendigitalkan 10 lokasi dari 54 pemancar *Dual Cast* tersebut. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa untuk menuju ke era Digital Terrestrial, TVRI saat ini adalah Station yang paling siap dibandingkan dengan TV Station nasional lainnya. Walaupun TVRI harus tetap mempersiapkan diri untuk menjadi Mux Operator

handal dan secara professional yang dapat memberikan *Services Level Guarantee* sesuai kebutuhan sekaligus dapat meyakinkan para mitra kerja. Untuk menuju menjadi Stasiun Televisi berkelas Dunia dari aspek teknologi dan infrastruktur tentunya TVRI harus melalui tahapan-tahapan yang harus dicapai antara lain:

2018 Mayoritas fokus pada pemulihan dan peningkatan kualitas tampilan layar *greater Jakarta* yang memiliki potensial *audience share* 59% dari total viewer seluruh Indonesia menurut data survei Nielsen di 11 kota besar. Dalam hal ini telah dilakukan perbaikan pemancar analog *Great Jakarta* dengan kekuatan power dari 30kW menjadi 80 – 100kW. Disamping itu telah dilakukan digitalisasi di 3 Studio di kantor pusat (Studio 5; 7; dan Auditorium) dengan kualitas Digital HD. Mempersiapkan fasilitas untuk mendigitalkan semua *file* yang ada dengan menyempurnakan MAM system (*Media Asset Management system*) dengan melakukan *upgrade capacity archiving* dari 30G menjadi 375G.

2019 Meningkatkan kualitas tampilan layar di Kota besar diluar *Greater Jakarta* dan melakukan digitalisasi di beberapa kota tertentu, Hal ini juga bertujuan menghadapi ASO yang sewaktu-waktu akan diputuskan oleh Pemerintah. Disamping itu juga mempersiapkan TVRI sebagai *Mux Operator Terrestrial* untuk menampung konten dari mitra kerja. Disamping hal tersebut diatas, TVRI akan mempersiapkan *platform* dan infrastruktur terkait kebutuhan distribusi konten melalui IP / OTT dengan menyewa CDN (*Content Delivery Network*). Dengan demikian di tahun 2019 TVRI sudah siap dalam mengakomodir kebutuhan *multi platform* dan *multi device* dalam hal konten distribusi. Tidak hanya distribusi secara konvensional tetapi dapat diakses melalui *gadget* atau *smart phone*. Kebutuhan akan sarana peningkatan kompetensi juga akan dilakukan di 2019 yaitu adanya rencana peremajaan peralatan di Pusdiklat dengan menggunakan sistem peralatan berteknologi 4K. Tujuannya adalah agar TVRI dapat menjadi *benchmark* bagi stasiun televisi lain dalam hal fasilitas pengembangan dan peningkatan kompetensi karyawannya.

International Telecommunication Union (ITU) melalui The Geneva 2006 *Frequency Plan (GE06) Agreement* telah menetapkan bahwa tanggal 17 Juni 2015 merupakan batas waktu bagi negara-negara untuk melakukan migrasi dari penyiaran TV analog ke penyiaran TV digital. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi ketentuan tersebut, namun hal ini menjadi acuan para pabrikan televisi untuk mengurangi produksi perangkat penyiaran analog, sehingga akan menjadi langka, sehingga sulit ditemukan dipasaran dalam beberapa tahun yang akan datang. Teknologi penyiaran analog akan semakin mahal dan secara bertahap akan menjadi usang.

Dilain pihak spektrum frekuensi yang merupakan barang publik dan memiliki sumber daya yang terbatas, penggunaannya menjadi sangat kritikal dalam penyiaran analog. Oleh karena itu solusinya tidak lain adalah dengan mengimplementasikan penyiaran digital di Indonesia. Dalam penyiaran digital penggunaan frekuensi akan lebih efisien, sehingga terjadi penghematan penggunaan frekuensi yang cukup besar.

Indonesia sudah memulai program migrasi analog ke TV digital sejak tahun 2003, sehingga sudah lebih dari sepuluh tahun melakukan uji coba siaran digital melalui TVRI. Saat ini banyak permohonan izin baru penyelenggara siaran, namun kanal frekuensi tidak tersedia, sehingga penyiaran digital menjadi solusi untuk mengakomodir permohonan izin baru tersebut.

Jika pemerintah tidak mengimplementasikan penyiaran digital, potensi keuntungan yang hilang akan sangat besar dan potensi kerugian yang timbul di masyarakat juga akan jauh lebih besar karena masyarakat tidak dapat menerima informasi dengan kualitas yang lebih baik. Bahkan jika pabrikan tidak lagi memproduksi perangkat penyiaran analog, masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan

transisi penyiaran analog ke digital, sehingga pada saat terjadi *analog switch off*, maka Indonesia sudah siap untuk memasuki era digital.

Transisi sistem penyiaran dari analog ke digital menimbulkan perubahan model bisnis penyiaran yang berbeda baik secara vertikal maupun horisontal. Dalam penyiaran analog Lembaga Penyiaran melaksanakan seluruh kegiatan penyiaran, sebagai penyelenggara program siaran, pemegang hak penggunaan frekuensi, penyelenggara infrastruktur dan penyedia menara. Dalam sistem digital terdapat pemisahan kegiatan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran. Penyelenggaraan program siaran diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPS), sedangkan dalam penyelenggaraan penyiaran multipleksing dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPM), sebagai penyedia menara, pemegang hak pemanfaatan frekuensi dan penyelenggaraan infrastruktur multipleksing.

Prinsip dasar dari migrasi analog ke digital adalah sebagai berikut:

- a) Jaminan penyaluran informasi melalui penyiaran televisi ke pemirsa tidak terputus.
- b) Jaminan kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tentang tidak terganggunya kegiatan penyiaran walau dalam masa transisi (*simulcast*)
- c) Pada masa transisi LPP dan LPS yang sudah beroperasi memiliki prioritas awal untuk bersiaran di era digital.
- d) Pemerintah mengkaji kebijakan subsidi *Set Top Box* ke masyarakat agar tepat sasaran.

Didalam merumuskan model bisnis TVRI perlu juga memperhatikan transisi model bisnis dari analog ke digital terutama terkait dengan prinsip-prinsip migrasi penyiaran analog ke digital. Hal ini penting sehingga tidak terjadi kekosongan informasi kepada masyarakat pada saat terjadi *analog switch off*

secara total diseluruh Indonesia. Sedangkan dalam struktur organisasi penyelenggara multipleksing dapat mengelola 1 sampai 12 saluran digital, termasuk TVRI.

3. Analisa Teknik Dan Kajian Teknologi

A. Analisa jaringan Penyiaran Terrestrial, Satelit (Eksisting)

Kondisi jaringan penyiaran Terrestrial, dan *Microwave link* (eksisting) TVRI digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.8: Jumlah Pemancar TVRI Tahun 2018

NO	Jenis Pemancar	Jumlah	Persentase
1	Total Lokasi Satuan Transmisi + Microwave (EKSISTING)	375	-
2	Toal Lokasi Satuan Transmisi	361	
3	Total Pemancar (Analog +Dualcast+Digital)	360	-
4	Pemancar VHF	185	-
5	Pemancar UHF	58	-
6	Pemancar UHF Dualcast	54	-
7	Pemancar DVB-T2	63	

Infrastruktur jaringan penyiaran TVRI terdiri dari 29 Stasiun Produksi dan 375 lokasi (361 Satuan Transmisi dan 14 Lokasi *Microwave/STL*) serta jaringan IT, VPN-IP di 28 Stasiun Daerah. Dari Jumlah 360 unit pemancar TVRI yang ada, sejumlah 286 (79%) pemancar tersebut saat ini beroperasi. Kekuatan daya pancaran untuk pemancar DVB-T2 dan dualcast rata-rata mencapai 90% namun untuk pemancar UHF dan VHF hanya dengan kekuatan daya pancaran rata-rata sebesar 37%, dan sejumlah 74 unit pemancar (21%) tidak beroperasi karena rusak. Dan dari jumlah satuan transmisi yang ada 185 unit pemancar (51%) beroperasi pada saluran VHF dan 58 unit pemancar (16%) beroperasi pada saluran UHF Analog termasuk pemancar analog Joglo untuk layanan JABODETABEK, dan terdapat 63 unit pemancar DVB-T2 dan 54 unit pemancar dualcast ready to digital yang memerlukan *headend* yang tersebar di 29 Provinsi di Indonesia.

B. Pengembangan Jaringan Penyiaran Tahap Pertama

Untuk menyalurkan 4 konten program melalui *satellite* pada tahap I (pertama) yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Dengan tanpa menambah sewa Xpdr (memanfaatkan *bandwidth* 9MHz yang disewa saat ini), untuk mendistribusikan konten program (1 SD MPEG 2 + 3 SD MPEG 4), sementara untuk mendistribusikan konten HD MPEG 4 direncanakan pada tahap II karena membutuhkan *Band width Transponder* minimal sebesar 6,5 MHz.
- b. Melakukan penambahan/*Upgrade* peralatan UP LINK *eksisting* dengan cara penambahan *Head-End* pada peralatan UP LINK di Senayan dan peralatan *Head-End* di 54 Lokasi Pemancar DVB-T2 *eksisting*, sehingga peralatan *Down Link /IRD eksisting* di 361 lokasi Pemancar Analog diseluruh Indonesia yang saat ini masih menggunakan IRD (*Integrated Receiver Decoder*) format SD-MPEG-2 masih dapat digunakan dan hanya melakukan *setting* ulang *Frequency Carrier* dan *Symbol Rate* pada IRD tersebut.

C. Pengembangan Jaringan Penyiaran Tahap Kedua

Pengembangan/*Upgrade* UPLINK tahap selanjutnya (tahap kedua) adalah dengan mengganti IRD (*Integrated Receiver Decoder*) di 361 lokasi Pemancar yang saat ini masih menggunakan IRD dengan format MPEG 2. Disamping itu untuk menyalurkan Program Nasional dengan Format HD MPEG 4, diperlukan tambahan sewa $\frac{1}{4}$ Transponder (Xpdr) sebesar 9 MHz.

D. Pengembangan Jaringan Transmisi ITTS II (Improvement on TV Transmitter Project Phase-II)

ITTS merupakan pinjaman lunak luar negeri yang diperlukan untuk pengembangan sarana dan prasarana penyiaran dalam mendukung kegiatan penyiaran TV Publik di Indonesia, baik untuk Studio maupun transmisi. Saat ini TVRI memiliki transmisi yang tersebar diseluruh Indonesia namun tidak semua

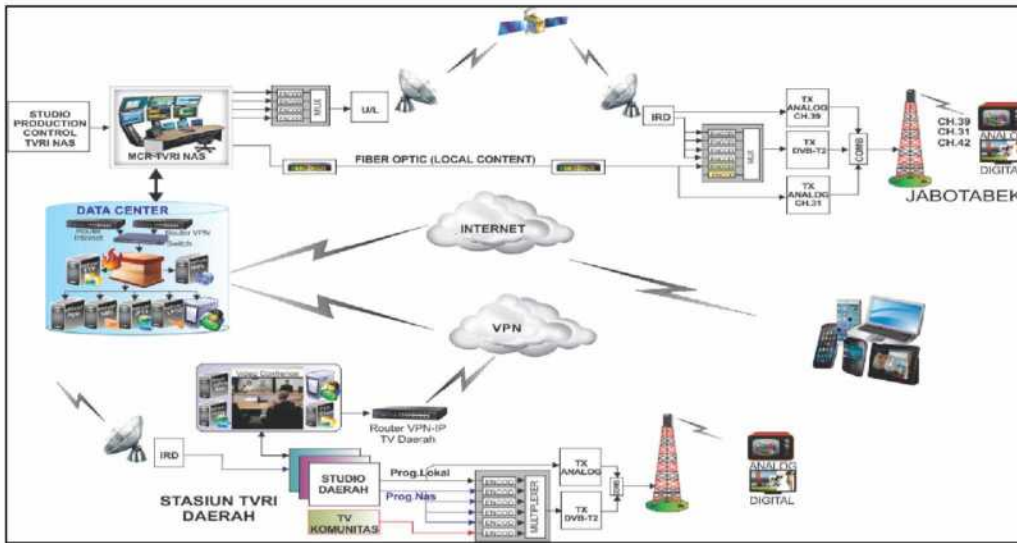
berfungsi dengan baik. Proyek ITTS II terdiri atas pemancar dengan daya 2kW sebanyak 32 lokasi, 5 kW sebanyak 18 lokasi dan 10 kW sebanyak 8 lokasi dan 20 kW sebanyak 2 lokasi. Sehingga jumlah keseluruhan 60 lokasi, yang berlokasi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTB, Maluku, dan Papua.

E. Analisis Jaringan IT TVRI (Eksisting)

1. Pengembangan Jaringan IT Tahap Pertama

Pengembangan Jaringan IT perlu dilakukan karena terjadi konvergensi antara *broadcasting* dengan internet. Oleh karena itu TVRI perlu memperkuat jaringan IT, baik untuk IT *broadcast* maupun IT *back office*. Pengembangan jaringan IT dalam jangka pendek adalah peningkatan pembuatan dan penggunaan aplikasi untuk memanfaatkan jaringan yang telah ada, yaitu: membangun *Data Center* yang memenuhi standar keamanan sebagai antisipasi terhadap penggunaan IT yang semakin meningkat di era siaran digital. Termasuk didalamnya adalah pembangunan backup system. Meningkatkan penggunaan aplikasi *back office*. Bekerjasama dengan penyedia jasa CDN (*content delivery network*). Mengembangkan aplikasi VOD untuk mendukung TVRI *streaming*. Pemanfaatan VPN-IP dan internet untuk *video conference*, *call center*, *social media* dan keperluan komunikasi lainnya.

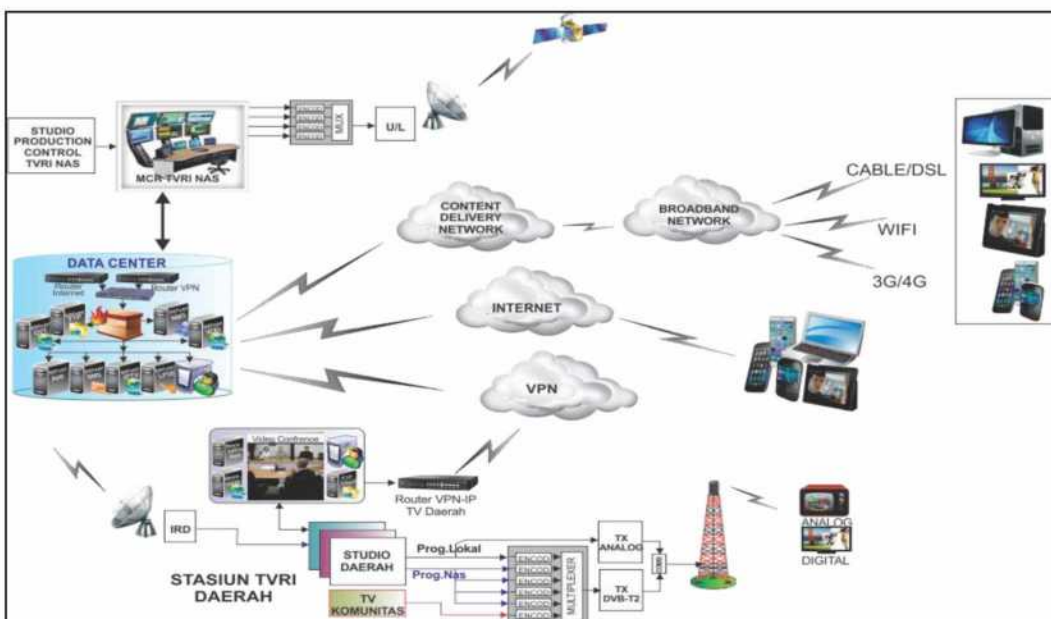
Gambar 3.5: Perkembangan Jaringan IT TVRI Tahap I



2. Pengembangan Jaringan IT Tahap Kedua

Pengembangan jaringan IT tahap I fokus pada pengembangan data center, infrastruktur yang terkait dengan IT broadcast dan IT Back Office. Sedangkan pada tahap kedua fokus pada infrastruktur yang terkait dengan pengembangan model bisnis TVRI kedepan. Pengembangan pada tahap ini adalah: pembangunan Multi Media Asset Management (MAM) dan penambahan storage. Pembangunan infrastruktur untuk IPTV dan OTT termasuk aplikasi mobile. Pembangunan Disaster Recovery Center (DRC) dan cloud server.

Gambar 3.6: Perkembangan Jaringan IT Tahap II



F. Analisis Jaringan Produksi & Penyiaran (Eksisting)

Infrastruktur pada system Produksi dan penyiaran di kantor pusat terdiri dari 8 Studio Produksi dan *Master Control* yang mengelola 4 Kanal yaitu 1 Kanal Analog Nasional dan 4 Kanal Digital terdiri dari 3 kanal SD dan 1 kanal HD *dedicated* untuk kanal TVRI Sport HD. Dari 8 Studio tersebut 4 diantaranya sudah menggunakan peralatan dengan teknologi Digital HD yaitu Studio 4 *dedicated* untuk Program Berita. Sistem ini juga dilengkapi dengan *News Automation System I News*; Studio 5 ; 7 ; dan Auditorium sejak bulan Desember 2018 juga telah di lakukan peremajaan dengan menggunakan peralatan berteknologi HD. Untuk mendukung kegiatan program produksi agar lebih mudah cepat dan berkualitas maka pada akhir bulan Desember 2019 telah kami siapkan MAM sistem dengan kapasitas *archiving* sebesar 375 T. Dengan fasilitas Produksi diatas maka TVRI telah memiliki keleluasaan dalam hal meng-*create* program dan mengelola *library* yang menjadi kekayaan TVRI.

Sedangkan sistem Produksi dan Penyiaran di beberapa daerah masih menggunakan peralatan berteknologi analog dan sederhana. Beberapa daerah sudah menggunakan peralatan digital SD tetapi masih campur bawur dengan teknologi Analog sehingga hasil akhir kualitas *output* dari sistem penyiaran di daerah masih perlu mendapat perhatian.

Jaringan Sistem produksi dan penyiaran antara kantor pusat dan daerah dihubungkan dengan VPN (*Virtual Privat Network*) dengan *band width* masing-masing koneksi 5Mbps. Adapun untuk kepentingan *live News outdoors* di beberapa daerah sudah dilengkapi dengan 3G *Bonding* yang memiliki keleluasaan dalam operasional dengan dukungan tersedianya jaringan cellular yang stabil.

G. Pengembangan Sistem Produksi dan Penyiaran

Dalam pengembangan Sistem Produksi dan Penyiaran, TVRI sebagai TV publik harus menggunakan peralatan berkualitas *High End*, sistem peralatan dikonfigurasi dalam *Full Interated System* HD & 4K, konfigurasi menggunakan koneksi *Base band* HD-SDI dan IP- NDI. Dengan Video Format minimal menggunakan XDCAM HD 422 (50Mbps).

Sistem Penyiaran kantor pusat dapat mengakomodir *Live program* dari semua Studio, *Live program* dari luar studio dengan SNG (*Satellie News Gathering*) dan juga dengan *Live Streaming* menggunakan *3G Bonding* secara *real time* atau *live* dari daerah dengan fasilitas *Virtual Private Network*.

Semua sistem peralatan Studio terintegrasi dengan *Master Control* melalui *Router Matrix* berkapasitas 128 x 128. Dengan integrase ini maka TVRI memiliki kemampuan secara operasional dalam hal menyampaikan berita terupdate lebih cepat dibandingkan dengan station nasional yang lain. *Monitoring system* dan *quality control* juga dapat dilakukan pada setiap *stage*. Sehingga bila terjadi masalah maka akan lebih cepat dalam melakukan *trouble shooting* dan *problem solving*.

H. Peran Saluran Pemersatu Bangsa

Tidak ada televisi di Indonesia yang lahir dengan peran strategis sebagai media utama pemersatu bangsa kecuali TVRI. Peran itu diterjemahkan dengan kebijakan merekatkan semangat dan jiwa persatuan dari semua elemen bangsa, dalam semangat menemukan persamaan dari keanekaragaman bukan sebaliknya mencari perbedaan. Presiden Soekarno saat menghadirkan TVRI tahun 1962 menyebutkan TVRI sebagai sarana *nation character building*, membangun karakter bangsa.

Ada dua hal penting dalam memandang peran itu yakni pertama terkait keutuhan NKRI. Pengelolaan informasi melalui siaran televisi diorientasikan untuk meningkatkan kualitas persatuan dan kesatuan bangsa dan kedua, adalah pada ketahanan informasi nasional. Salah satu yang sangat jelas terlihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari saat ini adalah ancaman perang informasi yang semakin dahsyat, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Diakui atau tidak, perang informasi ini telah membawa dampak yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Mengacu pada pengertian ketahanan nasional, maka ketahanan informasi ini dapat dimaknai sebagai sebuah keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia baik secara infrastruktur, suprastruktur, maupun karakter masyarakat dalam mengelola dan menyikapi perkembangan teknologi informasi agar tidak membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketiga aspek tersebut perlu dibangun secara kuat agar mampu menjadi salah satu komponen ketahanan nasional baru yang bisa mendukung tegak kukuhnya NKRI, *“Pada saat Hari Pers Nasional 2016 di Lombok, Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya peran media bagi masyarakat karena media dan pers menjadi pembentukan moral, karakter, mentalitas, dan moralitas”*.

I. Aksesibilitas Publik Dan Jangkauan Program 3T

Roh UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 adalah pada demokratisasi penyiaran. Konsep demokratisasi penyiaran itu bermakna pada keanekaragaman siaran dan keanekaragaman kepemilikan. TV Publik harus patuh kepada keduanya. Karena itu aksesibilitas publik terhadap isi siaran TVRI harus dibuka dan terbuka dengan persyaratan

- a. Aksesibilitas publik itu dibuka dan terbuka untuk menjaga keutuhan NKRI
- b. Aksesibilitas publik itu dibuka dan terbuka untuk meningkatkan kesatuan bangsa
- c. Aksesibilitas publik itu dibuka dan terbuka untuk memotivasi dan memberdayakan masyarakat menuju kemandirian ekonomi, informasi dan politik.

Masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal atau sering disebut wilayah 3T juga berhak mendapatkan informasi, pendidikan, hiburan melalui lembaga penyiaran Indonesia. Namun faktanya, di wilayah perbatasan, sampai saat ini eksistensi lembaga penyiaran asing lebih dominan ketimbang lembaga penyiaran Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah kongkret untuk melakukan penetrasi penyiaran di daerah perbatasan NKRI. Penyediaan Infrastruktur penyiaran daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar merupakan langkah nyata yang sangat mendesak agar kebutuhan masyarakat di wilayah itu, akan informasi yang mendidik, mencerahkan dan memberdayakan dapat terpenuhi.

Beberapa hal berikut yang perlu mendapatkan penekanan dalam menentukan arah kebijakan dalam melibatkan publik dalam meningkatkan kualitas persatuan dan kesatuan bangsa adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke Kawasan 3T menyebabkan masuknya paham ideologi lain seperti radikalisme, komunisme dan liberal kapitalisme yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Kehidupan sosial ekonomi di kawasan perbatasan umumnya dipengaruhi oleh negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi perbatasan sangat tergantung pada negara tetangga, Hal ini pun selain

dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Selain itu situasi politik yang terjadi di negara tetangga akan turut mempengaruhi situasi keamanan daerah perbatasan.

- c. Daerah perbatasan yang merupakan wilayah berkategori 3T disebabkan oleh lokasi yang relative terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. Rendah dalam tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Rendah dalam tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dan langka nya informasi pembangunan karena keterbatasan cakupan area siaran (*blank spot*).

3.3. Pentahapan Peta Jalan (Roadmap)

Peta Jalan adalah *destination statement* apa yang akan dilakukan TVRI ke depan. Tema besar pada peta jalan ini adalah pengembangan konten dan penyiaran sebagai *core business*, SDM, bisnis, pengembangan sumber-sumber pembiayaan baru dan infrastruktur. Berikut gambar dan narasi Road Map TVRI dalam 5 tahun ke depan:

Gambar 3.7: Peta Jalan TVRI Tahun 2018-2022



A. Arah Dan Kebijakan Tahun 2018

1. Reformasi Birokrasi

Program reformasi birokrasi TVRI diawali dengan adanya Surat Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor : 258/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tertanggal 18 Desember 2017 tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi LPP TVRI. Tim Percepatan juga dibantu oleh sub tim (kelompok Kerja) percepatan RB sebagai motor dukungan arus informasi dan dokumen yaitu:

- a. Pokja Manajemen Perubahan
- b. Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi
- c. Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan
- d. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- e. Pokja Penguatan Pengawasan
- f. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Tim percepatan RB ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan menyiapkan dokumen persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan LPP TVRI. Dengan pelaksanaan reformasi Birokrasi di LPP TVRI maka diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi LPP TVRI di bidang penyiaran (*broad casting*) akan menunjukkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Tim RB telah berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan telah berhasil menyusun rencana kerja dan menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan RB di LPP TVRI. Sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, terdapat 8 area perubahan yang harus dilakukan yaitu:

- a. Melakukan manajemen perubahan
- b. Penataan peraturan dan kebijakan
- c. Penataan dan penguatan organisasi

- d. Penataan tata laksana
- e. Penataan system manajemen SDM aparatur
- f. Penguatan pengawasan
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja

Lebih lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dilakukan perubahan adalah sebagai berikut:

a. Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, LPP TVRI fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

b. Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Sistem Pengendalian Intern di lingkungan LPP TVRI selalu dilakukan perbaikan sistem pengawasan dan memperkuat peran Satuan Pengawasan Intern, melalui pembinaan yang dilakukan oleh instansi BPKP.

c. Akuntabilitas

TVRI telah memperbaiki sistem penilaian kinerja dengan menerapkan *Key Performance Indicator* (KPI) dan Penilaian sasaran Kinerja Perorangan (SKP). KPI dan SKI ditetapkan diawal tahun untuk dasar menilai keberhasilan dan kinerja masing-masing unit kerja dan individu pegawai. Tahun 2018 TVRI juga telah melakukan revisi Renstra untuk menyesuaikan target-target yang akan dicapai TVRI sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dewan Pengawas LPP TVRI.

d. Kelembagaan

Kelembagaan LPP TVRI saat ini dipandang kurang sesuai dengan *business process* TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Kelemahan-kelemahan kelembagaan dan struktur organisasi TVRI yang telah menghambat pencapaian tujuan dan operasional TVRI. Untuk itu dalam tahun 2018 telah dibentuk Tim Revisi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Hal ini diperlukan agar kelembagaan TVRI mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik secara efektif dan efisien. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

e. Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur. Reformasi di Bidang keuangan telah dilakukan dengan sistem *cash less* dan Aplikasi Sistem

Informasi Keuangan (ASIK) dimana dengan aplikasi tersebut akan memudahkan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan.

f. SDM Aparatur

Jumlah pegawai LPP TVRI saat ini adalah sebanyak 4.758 orang, terdiri dari PNS sebanyak 3.426 orang dan PBPNS sebanyak 1.332 orang menyebar di Kantor Pusat dan 29 Stasiun Penyiaran serta 365 kantor transmisi di seluruh Indonesia. Rata-rata usia PNS LPP TVRI saat ini berada di atas 50 tahun, yakni sebanyak 1.475 orang (43.05%). Jumlah pegawai tersebut sangat dirasakan kurang sesuai kompetensi yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPP TVRI dan sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan penambahan untuk menggantikan pegawai yang pensiun sebanyak 1.155 orang yang sejak tahun 2011 sampai tahun 2018 tidak pernah dilakukan penambahan pegawai dan akan terus susut dalam 2 (dua) tahun ke depan menjadi 1.694 orang yang pensiun.

Untuk itu Direksi LPP TVRI telah menyampaikan surat permohonan pengadaan PNS kepada Kementerian Komunikasi dan Informastika sesuai surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor 310/l.1/TVRI/2018 Tanggal 2 April 2018, namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan dan persetujuan. Sistem manajemen SDM sebagaimana di tetapkan dalam PP nomor 11 Tahun 2017 telah mengatur manajemen ASN yang harus diikuti Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian sehingga menghasilkan SDM yang kompeten. Rekrutmen pejabat struktural eselon IIB (Kepala Stasiun Type A) dilakukan melalui lelang jabatan, sehingga diharapkan pejabat yang diangkat adalah orang yang kompeten, cakap dan mampu memimpin suatu unit kerja.

Tabel 3.9: Hasil yang diharapkan dari 8 Areal Perubahan

NO	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
1	Mental Aparatur	<p>Meningkatnya penerapan/ internalisasi asas, nilai dasar, aturan perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan;</p> <p>Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap unit organisasi;</p> <p>Meningkatnya integritas aparatur;</p> <p>Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat; dan</p> <p>Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan.</p>
2	Pengawasan	<p>Meningkatnya kapasitas APIP;</p> <p>Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;</p> <p>Meningkatnya penerapan lembaga LPP TVRI yang bersih dan bebas KKN;</p> <p>Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi;</p> <p>Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur; dan</p> <p>Meningkatnya hasil penilaian opini oleh BPK, dan secara konsisten mempertahankan opini WTP.</p>
3	Akuntabilitas	<p>Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi;</p> <p>Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional;</p> <p>Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja; dan</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas aparatur.</p>
4	Kelembagaan	<p>Tidak terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi;</p> <p>Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan diantara unit kerja di kantor pusat maupun dengan kantor Stasiun Daerah;</p> <p>Meningkatnya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi dan sinergisme (KISS) kelembagaan antara Kantor Pusat dengan Kantor Stasiun di seluruh Indonesia; dan</p> <p>Meningkatnya kinerja aparatur.</p>

Tabel 3.10 : Lanjutan Hasil yang diharapkan dari 8 Areal Perubahan

5	Tata Laksana	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government;
		Meningkatnya kualitas tata hubungan antara Kantor Pusat dengan kantor Stasiun di seluruh Indonesia;
		Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
6	Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif;
		Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit;
		Meningkatnya penerapan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur;
		Membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungan organisasi;
		Mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi;
		Meningkatnya profesionalisme aparatur.
7	Akuntabilitas	Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;
		Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
8	Pelayanan Publik	Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
		Meningkatnyakua litas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

g. Peraturan Perundang-Undangan

TVRI telah melakukan inventarisasi produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Dewan Direksi LPP TVRI. Diakui bahwa masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan.

h. Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan

penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan. Penilaian pelayanan akan dilakukan setiap akhir tahun untuk menilai mana-mana pelayanan yang masih memberikan pelayanan buruk. Dengan demikian Direksi dapat mengetahui dan mencari pola yang tepat dalam meningkatkan pelayanan publik. Lebih jelasnya yang harus dicapai setiap area perubahan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN RB

Atas pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, LPP TVRI telah mengajukan usulan penilaian RB di lingkungan LPP TVRI sesuai surat Direktur Utama LPP TVRI. Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) dan penilaian oleh Kementerian PAN RB, sesuai Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor R/03/RB.05/2018 Tanggal 17 Mei 2018 bahwa TVRI telah memberikan nilai pelaksanaan RB dengan nilai 47%. Atas nilai tersebut maka pegawai LPP TVRI berhak diberikan remunerasi yang saat ini sedang proses penetapan *grading* Tunjangan Kinerja (Tunkin).

2. Rebranding TVRI

New TVRI adalah *beyond television*. TVRI tidak saja akan fokus pada penyiaran tapi pada apa yang kelak disebut Triple M 2 yakni *Media, Market* dan *Measurement*. Tahun 2018 pentahapan itu meletakkan dulu pada unsur-unsur *branding* TVRI seperti logo, *on air look presentation* dan identitas korporasi. Selanjutnya penataan media, yang lebih multiplatform dan konvergensi dengan *e-commerce*. Terakhir adalah pengukuran secara *realtime* dan *realcount*. *Media measurement* yang sudah tidak tergantung pada pihak ketiga ini memungkinkan validitas data media yang lebih terukur, teratur dan *fair* kepada masyarakat.

3. Penataan Program Dan Kanal Digital

Sejak 2018 potensi *rerun* di TVRI sudah mulai dikurangi dengan membuka lebar-lebar kerjasama dengan pihak ketiga terutama dari luar negeri. Membuka kerjasama dengan luar negeri telah menambah *fresh* program sebanyak 10 %. Dengan perancangan atau *planning* yang lebih baik, efisiensi dan *management* produksi membuat umur program baru lebih panjang, yang tadinya hanya sampai 4 bulan, saat ini diperkirakan dengan keterbatasan anggaran bisa mencapai 6 – 8 bulan. Dan angka *rerun* program yang tadinya 40% bisa ditekan sampai 20% per tahun, di bawah rata-rata industri yang saat ini 10% per tahun. Penataan digital diarahkan pada penataan konten dan kualitas penerimaan di rumah. Saat ini 4 kanal digital TVRI masih bersiaran SD 510i. Keempat kanal itu adalah TVRI-1 untuk siaran nasional, TVRI-2 untuk siaran lokal Jakarta, TVRI Kanal 3 untuk acara kebudayaan dan TVRI 4 untuk siaran Olahraga. Per 1 Mei 2018, TVRI 4 sudah direbranding menjadi TVRI SPORT-HD, dimana siaran untuk Jakarta sudah full HD 1080i dan konten diisi 6 jam diisi oleh pihak ketiga yakni Super Soccer TV. Pada akhir tahun 2018 target penataan Kanal 1 nasional diharapkan sudah bersiaran full HD nasional.

4. Peningkatan Pendapatan Melalui PNBP

Melalui PP 33 Tahun 2017, TVRI berada pada rezim Penerimaan Bukan Pajak atau PNBP. Aturan ini sangat ketat mengatur tarif jasa siaran dan non siaran bagi TVRI. Dengan segala keterbatasan tarif dan aturan yang amat ketat, pada awal tahun ini diharapkan hasil PNBP ditargetkan mencapai Rp 213 Miliar per tahun. 140 miliar ditargetkan untuk kantor pusat, 73,25 miliar untuk stasiun daerah. 140 kantor pusat, 100 miliar target iklan (siaran) dan 40 miliar non siaran.

5. Peningkatan Kualitas Penerimaan Jakarta Dan Surabaya

Jumlah penonton Greater Jakarta dan Greater Surabaya sebagai sampel responden Nielsen mencapai 70% dari total pemirsa Televisi seluruh Indonesia menurut data Survei Nielsen di 11 kota besar. Untuk Greater Jakarta telah dilakukan perbaikan kekuatan pemancar analog di Kanal 39 UHF yang sebelumnya hanya running dengan kekuatan 30kW, pada awal Desember 2018 sudah dapat running dengan kekuatan 80 – 100kW. Sedangkan di Greater Surabaya ada masalah yang kita hadapi lebih kompleks, adanya obstacle pada bangunan bertingkat dan posisi tower yang tidak berada di lokasi pemancar station TV nasional lainnya. Kualitas penerimaan/RQP (*Reception Quality Perception*) di Surabaya 80% dari penduduk Greater Surabaya tidak dapat menonton TVRI sama sekali. Oleh karena itulah maka mulai tahun 2019 akan kami lakukan kajian untuk pemindahan ke lokasi yang tepat serta kemungkinan meningkatkan kapasitas Pemancar sesuai kebutuhan greater Surabaya dengan cara mengganti perangkat baru.

B. Arah Dan Kebijakan Tahun 2019

1. Digitalisasi Pemancar dan Peralatan

Secara mandiri melalui APBN target kerja Direktorat Teknik di tahun 2019 adalah melakukan restrukturisasi sistem produksi siaran di kantor pusat dan 5 kota besar berdasarkan survei Nielsen dengan fully digital integrated system berbasis siaran berdefinisi tinggi (HD) dan digitalisasi transmisi di 5 kota. Sementara melalui kerjasama bantuan pihak ketiga TVRI mengharapkan dapat segera diputuskan implementasi proyek ITTS phase 3 yaitu: Digitalisasi transmisi di 250 lokasi, Digitalisasi Studio di 29 kota provinsi, distribusi konten melalui ICT berbasis multi platform serta melakukan capacity building untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme karyawan. Sehingga pada akhir tahun 2022 TVRI sudah memiliki sistem Peralatan modern menuju TV station berkelas Dunia.

2. Optimalisasi Aset/ Barang Milik Negara

Aset berupa lahan dan bangunan yang dimiliki oleh TVRI baik di kantor Pusat maupun 29 Stasiun Penyiaran sangat potensial dalam arti memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, namun pemanfaatannya belum optimal. Salah satu cara optimalisasi aset adalah dengan menciptakan nilai tambah (*value added*), dengan pengelolaan yang baik mengupgrade, memperbaiki, menambah fasilitas, merawat, dan atau melakukan kerjasama pemanfaatan aset, Tujuannya selain untuk meningkatkan nilai aset TVRI juga dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan TUSI TVRI dalam rangka mewujudkan visi sebagai *World Class Broadcaster*. Selain itu, optimalisasi aset lahan dan bangunan TVRI bertujuan untuk: Meningkatkan nilai aset TVRI dan TVRI mempunyai gedung baru yang lebih representatif, tertata dan modern baik untuk kegiatan produksi dan penyiaran maupun kegiatan perkantoran. Dimulai sejak 2018, diharapkan di tahun 2019 sejumlah kerjasama yang dimungkinkan aturan sudah bisa dilaksanakan.

3. Sistem MAM yang Terintegrasi Penuh (*Fully Integrated MAM System*)

Sebuah prakondisi yang mutlak untuk memasuki *era cross media*, multimedia, multiplatform dan *multichannel* adalah tersedianya *fully integrated media asset management*. Sistem *hardware* dan *software* ini nanti akan mampu melakukan komputasi aset dan media yang terintegrasi mulai dari *ingest*, pra produksi, produksi, pasca produksi sampai ke penyimpanan. Pada sisi penyimpanan atau *archiving system* ini lah kelak *value added* dari seluruh konten TVRI bisa dikelola untuk berbagai kebutuhan media baru, mulai dari alih media, linear dan non linear TV sampai ke level aplikasi atau OTT.

Akan ada investasi yang cukup besar jika melihat jutaan inventori TVRI yang bernilai tinggi itu kelak akan dikelola. Sistem ini akan menggantikan sistem manual yang puluhan tahun berlangsung di TVRI. Sebuah data *heart MAM*

(*Media Asset Management*) kelak akan menjadi jantung dari perjalanan hulu dan hilir konten TVRI terintegrasi dengan sistem produksi, siaran dan penyimpanan.

4. Kelembagaan Baru TVRI Melalui Revisi UUPenyiaran

Sejak berdiri tahun 1962 TVRI mengalami berkali-kali perubahan status kelembagaan, mulai dari Yayasan (1963), Direktorat (1974), Perusahaan Jawatan (2001), lalu menjadi LPP berdasarkan UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 dan PP 13 Tahun 2005. Justru pada saat menjadi LPP status kelembagaan TVRI menjadi tidak jelas terutama atas tiga hal: Pendanaan, Otonomi dan ketangkasan pengambilan keputusan, dan perekrutan SDM. Penangan isu-isu ini akan membantu TVRI menuntaskan Batasan struktur hukum saat ini serta potensi struktur baru yang akan dipertimbangkan TVRI. Penanganan terhadap isu-isu ini akan membantu TVRI untuk meraih kembali pangsa pasar dan keuntungan daya saingnya sebagai saluran FTA pertama di Indonesia. Bentuk yang lebih tegas akan didorong pada revisi UU Penyiaran yang baru. Setidaknya di RUU baru nanti TVRI akan menjadi lembaga negara di bawah Presiden, dipimpin pejabat setingkat Menteri, memiliki otonomi dalam pendanaan dan perekrutan SDM.

5. Diversifikasi Konten Melalui Penataan Kanal Digital

Tahun 2018, kanal 4 sudah dikelola dengan meningkatkan kualitas hingga mencapai full HD 1080i berikut kerjama konten dengan Super Soccer TV untuk 6 jam siaran per hari. Brand TVRI 4 kini sudah diubah menjadi TVRI Sport HD. Selanjutnya tahun 2019, kanal 3 yang sekarang menjadi kanal budaya nantinya akan dikelola menjadi kanal parlemen paling sedikit 3 jam. Kanal 2 nantinya akan menjadi TVRI World-HD, sebuah siaran dengan konten berbahasa Inggris. Nanti nya TVRI World-HD ini akan menjadi jalan bagi TVRI ini untuk melakukan penetrasi market terutama di negara-negara yang diaspora Indonesia cukup banyak, antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Australia, Timur Tengah dan Amerika Serikat.

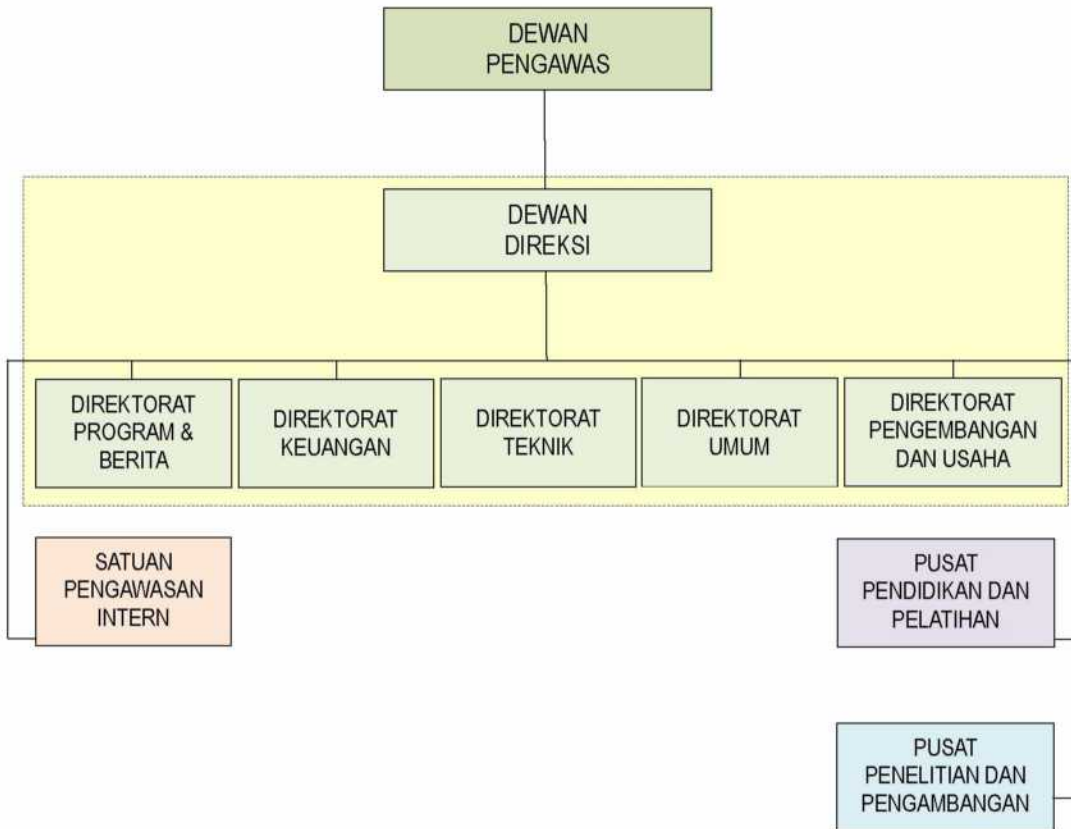
3.4 Kerangka Kelembagaan

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pembangunan yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar-organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar-organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pasal 6, Organisasi TVRI terdiri atas:

- a. dewan pengawas;
- b. dewan direksi;
- c. stasiun penyiaran;
- d. satuan pengawasan intern; dan
- e. pusat dan perwakilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), TVRI menyusun kerangka kelembagaan yang dituangkan dalam Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nomor 154/PRTR/Direksi-TVRI/2006 Tanggal 29 Desember 2006 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang, sebagai berikut:

Gambar 3.8:
Struktur Organisasi TVRI



A. Susunan Direksi

2. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas menjabarkan Visi, Misi, Kebijakan Umum Kebijakan Penyiaran, dan Kebijakan Penyiaran TVRI dalam Rencana Induk, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- pengaturan dan pengkoordinasian tugas-tugas para anggota Dewan Direksi dalam menjalankan tugas sesuai dengan Visi, Misi, Kebijakan Umum, dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang/substansi masing-masing;
- pengektifan tugas Dewan Direksi untuk mencapai target dan tujuan;

- c. pengkoordinasian telaahan-pertimbangan dan bantuan hukum, hubungan kelembagaan, dan pengurusan atau legitimasi Hak Siar, Hak Cipta, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Lisensi dan Royalti serta aspek legal lainnya;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan/atau atas permintaan Dewan Pengawas;
- e. penyiapan bahan-bahan laporan Dewan Pengawas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan TVRI.

3. Direktorat Program dan Berita

Direktorat Program dan Berita mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan Umum Kebijakan Penyiaran, dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang program, produksi, siaran berita, dan non berita serta pendokumentasian.

(1) Bidang Program

Bidang Program mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang program serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan program-ming;
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan operasional siaran;
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan akuisisi;
- d. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan produksi program.

(2) Bidang Berita

Bidang Berita mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang berita serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan siaran berita;
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan current affair;
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan siaran olahraga;
- d. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan produksi berita.

(3) Bidang Penunjang Program dan Berita

Bidang Penunjang Program dan Berita mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang penunjang program dan berita serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi promosi acara;
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi kerjasama produksi dan siaran luar negeri;
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi pendokumentasian dan perpustakaan;
- d. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi kreativitas dan pemandu bakat.

3. Direktorat Keuangan

Direktorat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan Umum Kebijakan Penyiaran, dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang keuangan, serta akuntansi dan perpajakan. Direktorat Keuangan terdiri atas tiga bidang adalah sebagai berikut:

(1) Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan, dan Kinerja

Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan, dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang perencanaan, evaluasi keuangan dan kinerja, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan perencanaan keuangan dan kinerja
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan evaluasi keuangan dan kinerja
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pengelolaan dan evaluasi hutang-piutang

(2) Bagian Anggaran

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang anggaran serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan penerimaan
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pengeluaran
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan perbendaharaan dan verifikasi

(3) Bagian Akuntansi dan Perpajakan

Bagian Akuntansi dan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang akuntansi dan perpajakan, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan akuntansi keuangan
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan akuntansi manajemen
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan perpajakan

4. Direktorat Teknik

Direktorat Teknik mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan Umum Kebijakan Penyiaran, dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang teknik, meliputi transmisi, teknik produksi dan penyiaran, teknologi informatika dan kerjasama teknik. Direktorat Teknik terdiri atas tiga bidang, sembilan seksi, dan kelompok fungsional. Tugas dan fungsi dari masing-masing Bidang, adalah sebagai berikut:

(1) Bidang Transmisi

Bidang Transmisi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang transmisi, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan teknologi transmisi
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan jaringan transmisi
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pengendalian mutu dan standardisasi transmisi

(2) Bidang Teknik Produksi dan Penyiaran

Bidang Teknik Produksi dan Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang teknik produksi dan penyiaran, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan teknologi peralatan studio dan penyiaran
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan teknologi peralatan luar studio
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pengendalian mutu dan standardisasi teknik produksi dan penyiaran

(3) Bidang Teknologi Informatika dan Kerjasama Teknik

Bidang Teknologi Informatika dan Kerjasama Teknik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang teknologi informatika dan kerjasama teknik, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan teknologi informatika
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kerjasama teknik
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan fasilitas teknik

5. Direktorat Umum

Direktorat Umum mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan Umum Kebijakan Penyiaran, dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang umum, asset, sumber daya manusia, kelembagaan, organisasi, dan ketatalaksanaan. Direktorat Umum terdiri atas empat bagian, duabelas seksi, dan kelompok fungsional. Tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

(1) Bagian Pengadaan dan Inventarisasi

Bagian Pengadaan dan Inventarisasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang pengadaan dan inventarisasi, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pengadaan barang umum dan jasa
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pengadaan barang teknik dan program
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan inventarisasi aset dan distribusi.

(2) Bagian Sarana dan Prasarana

Bagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang sarana dan prasarana, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan gedung, kantor, dan lingkungan
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan mekanikal dan elektrikal
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan rumah-tangga, transportasi, dan keamanan

(3) Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang sumber daya manusia, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan data, evaluasi, dan pengembangan sumber daya manusia
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan mutasi kepegawaian
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kesejahteraan

(4) Bagian Kesekretariatan dan Kelembagaan

Bagian Kesekretariatan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang kesekretariatan dan kelembagaan, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kesekretariatan Dewan Pengawas
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kesekretariatan Dewan Direksi
- c. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kelembagaan, hukum, dan hubungan masyarakat

6. Direktorat Pengembangan dan Usaha

Direktorat Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan Umum Kebijakan Penyiaran, dan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang Pengembangan dan Usaha. Direktorat Pengembangan Usaha terdiri atas tiga bidang dan tujuh seksi. Tugas dan fungsi dari masing-masing Bidang, adalah sebagai berikut:

(1) Bidang Penjualan, Pemasaran dan Lalu Lintas Usaha

Bidang Penjualan, Pemasaran dan Lalu Lintas Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan, pemasaran siaran dan lalu lintas usaha serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan penjualan dan pemasaran siaran.
- b. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan lalu lintas usaha (*traffic*)

(2) Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik

Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik mempunyai tugas melakukan perencanaan, pemasaran di bidang teknik dan non teknik serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan penjualan dan pemasaran teknik.
- b. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan penjualan dan pemasaran non teknik

(3) Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi

Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang strategi pengembangan usaha dan evaluasi serta mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan siaran dan non siaran.
- b. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan produk dan *non website*.
- c. perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan evaluasi dan pelaporan.

B. Susunan SPI dan Pusat-Pusat

1. Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan langsung bertanggungjawab kepada Dewan Direksi. Satuan Pengawasan Intern terdiri atas tiga bidang mempunyai tugas melakukan pengawasan intern keuangan dan operasional lainnya, serta melaporkan temuannya kepada Dewan Direksi, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan
- b. pelaksanaan pengawasan operasional
- c. pelaksanaan pengawasan pengelolaan umum dan sumber daya manusia

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pusat Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala. Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan langsung bertanggungjawab kepada Dewan Direksi. Pusat Penelitian dan Pengembangan terdiri atas empat bidang dan kelompok fungsional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan di bidang program dan berita, teknologi, kelembagaan, dan pengembangan usaha, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksana pengkajian di bidang program dan berita
- b. pelaksana pengkajian di bidang teknologi
- c. pelaksana pengkajian di bidang kelembagaan
- d. pelaksana pengkajian di bidang pengembangan usaha

3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang kepala. Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan langsung bertanggungjawab kepada Dewan Direksi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas tiga bidang dan kelompok fungsional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan di bidang program dan berita, teknologi, kelembagaan, dan pengembangan usaha, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksana perencanaan program dan evaluasi
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- c. pelaksana urusan fasilitas dan sarana pendidikan dan pelatihan

3.5. Kerangka Regulasi dan Mandatori

A. Regulasi

Penyelenggaraan kegiatan penyiaran televisi di Indonesia saat ini berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan pengaturan turunannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Ketentuan terakhir inilah yang menetapkan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. Ketentuan itu juga mengatur tugas pokok dan fungsi TVRI. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, TVRI sebagai media masuk dalam ranah komunikasi massa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJM 2005-2025 menekankan bahwa pembangunan di bidang komunikasi massa ditujukan untuk mencerdaskan masyarakat. TVRI sendiri difungsikan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amanat peraturan perundang-undangan kepada TVRI belum dapat dijalankan dengan baik, termasuk perkembangan teknologi terkini dan dinamika sosial budaya masyarakat belum dapat diresponse secara memadai karena berbagai kendala, baik dari internal maupun eksternal. Kendala internal, antara lain: (1) Anggaran (2) Kelembagaan, (3) Infrastruktur, (4) Manajemen, (5) Kreativitas, dan (6) Sumber Daya Manusia. Sedangkan secara eksternal, antara lain: (1) Peraturan yang ada belum dapat memayungi segala kepentingan penyiaran publik, (2) Persaingan dengan TV Swasta untuk memperoleh perhatian pemirsa, (3) Belum adanya kesamaan pemaknaan terhadap TVRI sebagai TV Publik dari setiap level pemangku kepentingan. Untuk itu, agar TVRI dapat menjalankan fungsinya secara optimal guna mendukung pencapaian tujuan agenda pembangunan nasional perlu ada

kebijakan afirmatif yang mendukung proses transformasi TVRI menjadi TV Publik, yaitu Televisi milik Bangsa dan Negara yang diposisikan sebagai Pemersatu Bangsa dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Kerangka regulasi TVRI terbagi atas :

a. TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik

1. UU No. 32 Tahun 2002 Ttg Penyiaran
2. PP No. 11 Tahun 2005 Ttg Penyelenggaraan Penyiaran Publik
3. PP No. 13 Tahun 2005 Ttg LPP TVRI

b. TVRI dalam pengelolaan Anggaran, Aset, SDM dan Operasional Siaran

1. UU No.17 Tahun 2003 Ttg Keuangan Negara
2. UU No.1 Tahun 2004 Ttg Perbendaharaan Negara
3. UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN
4. UU No. 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik
5. UU No. 15 Tahun 2004 Ttg Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan
6. UU No. 9 Tahun 2018 Ttg PNPB
7. UU No. 25 Tahun 2009 Ttg Pelayanan Publik
8. UU No. 28 Tahun 2014 Ttg Hak Cipta
9. UU No. 31 Tahun 1999 Ttg Tipikor
10. UU No. 33 Tahun 2009 Ttg Perfilman
11. UU No. 30 Tahun 2002 Ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12. UU No. 13 Tahun 2003 Tt Ketenagakerjaan
13. PP No. 10 Tahun 2018 Ttg BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
14. PP No. 11 Tahun 2017 Ttg Management PNS
15. PP No. 27 Tahun 2014 Ttg Pengelolaan BMN
16. PP No. 33 Tahun 2017 Ttg Jenis & Tarif Di LPP TVRI
17. PP No.53 Tahun 2010 Ttg Disiplin PNS
18. PP No. 60 Tahun 2008 Ttg SPIP
19. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2012 Ttg Pedoman Perilaku Penyiaran
20. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

B. Mandatori

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, maka sesungguhnya ada mandat yang wajib dilaksanakan oleh TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, di antaranya adalah:

- 1) Menyelenggarakan program-program penyiaran umum yang bermutu dan berdayasaing dengan memerhatikan sekaligus melindungi hak-hak publik.
- 2) Melaksanakan program-program penyiaran yang berkualitas untuk mempersatukan bangsa dan mengutamakan kepentingan nasional.
- 3) Menjamin diperolehnya akses informasi secara berkeadilan bagi seluruh komponen bangsa di mana pun dia berada melalui berbagai perangkat teknologi yang mengikuti perkembangan.
- 4) Menyelenggarakan program-program penyiaran yang mendorong terciptanya stabilitas social dan politik, peningkatan jati diri, peningkatan citra bangsa dan negara di mata internasional.
- 5) Membina dan bekerjasama dengan stasiun televisi publik lokal dan televisi komunitas utamanya dalam mendorong tumbuh kembangnya industri penyiaran yang sehat.

Merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik TVRI dengan tegas menyatakan bahwa TVRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Hingga saat ini masih belum ada kesamaan pemahaman dari setiap level pemangku kepentingan terhadap kelembagaan TVRI sebagai TV Publik. Dampak yang ditimbulkan cukup kompleks dan serius, yaitu terhadap penganggaran, pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan Sumber Daya, baik SDM maupun aset sesuai peraturan perundangan yang berlaku organisasi atau

lembaga pemerintah terdiri dari:

1. Lembaga-lembaga Negara;
2. Kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian;
3. Lembaga Non Struktural; dan
4. Pemerintah Daerah beserta satuan kerja perangkat daerah.

C. Tujuan Lembaga

Keberadaan Televisi Republik Indonesia dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pada Bab II pasal 2 dengan tegas menyebutkan bahwa penyiaran TVRI sebagai Lembaga Peyiaran Publik adalah berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa penyelenggaraan penyiaran bertujuan: *“untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”*.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Bab I pasal 1, butir 2 menyatakan bahwa: *“Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat”*.

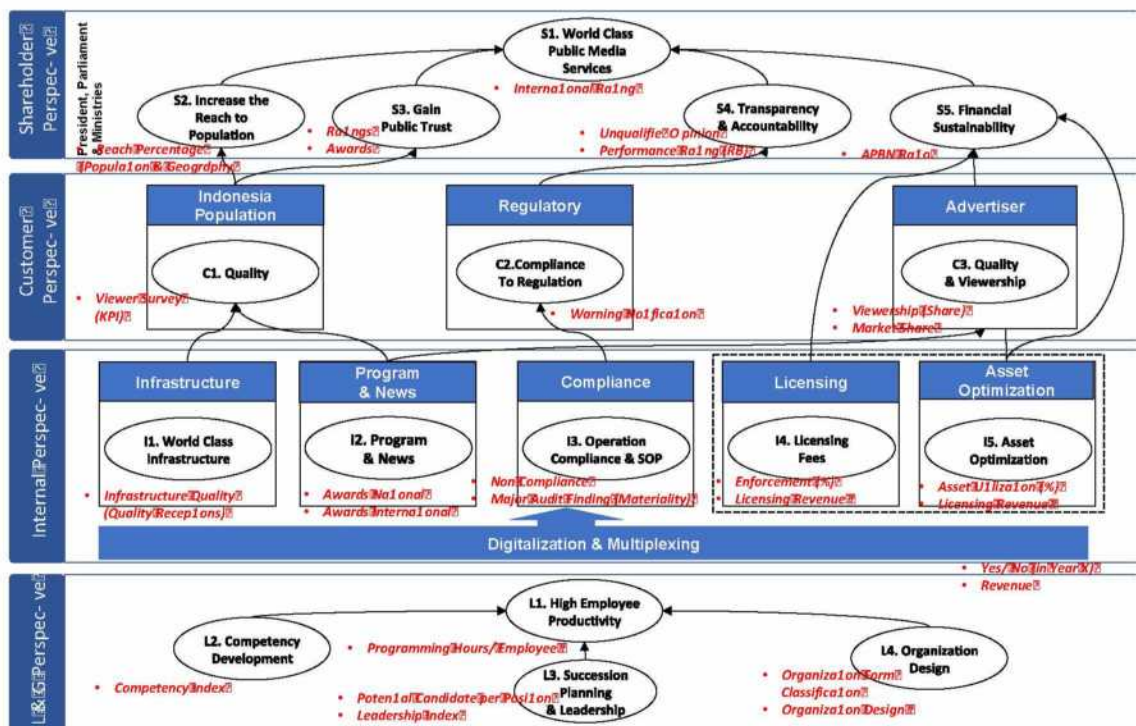
Pasal 1 butir 3 berbunyi: *“Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat”*. Sedangkan menurut PP 11 tahun 2005, pasal 4,

TVRI dalam menjalankan kegiatan operasional bertujuan untuk “menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa”

3.6 Pemetaan Strategi TVRI

Untuk mencapai Visi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Kelas dunia diperlukan adanya pemetaan strategi. Tujuan pemetaan strategi adalah untuk mengetahui secara tepat strategi yang akan digunakan dan sebagai pedoman didalam menetapkan berbagai kebijakan strategis dan program prioritas untuk mencapai visi tersebut. Pemetaan strategi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.9 : Pemetaan Strategi TVRI



Untuk mencapai Lembaga Penyiaran Publik berkelas dunia diperlukan indikator *coverage population (increase to reach population)* yang bisa menjangkau sebagian besar penduduk Indonesia. Untuk itu perlu didukung konten siaran yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan publik. Sehingga menciptakan penonton yang berkualitas (*quality dan viewership*). Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik akan mendapat kepercayaan publik yang tinggi (*gain public trust*).

Untuk mencapai *World Class PublicService Media* perlu didukung dengan infrastruktur berkelas dunia (*World Class Infrastructure*).

Kepatuhan terhadap aturan (*Compliance to Regulation*) juga menjadi bagian penting dalam menuju *World Class Public Service Media*, sehingga akan menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi (*Transparency and Accountibility*) yang disertai dengan implementasi peraturan yang tepat (*Operation Compliance*) dan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang jelas.

Dukungan keuangan yang berkelanjutan (*Financial Sustainability*) diperlukan pembiayaan publik (*licensing fees*), optimalisasi aset (*Asset Optimization*) baik teknik maupun non teknik dan pemanfaatan aset untuk properti melalui skema pendanaan Kerjasama Pemanfaatan Aset (KSP), Bangun Serah Guna (BSG) dan Bangun Guna Serah (BGS).

Untuk menciptakan SDM yang memiliki produktifitas tinggi (*High Employee Productivity*) diperlukan pengembangan kompetensi SDM (*Competency Development*), kaderisasi pemimpin (*Succesion Planning*) dan kepemimpinan (*Leadership*) serta desain organisasi (*Organizationional Design*) yang sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Semua proses baik kebijakan strategis maupun infrastruktur untuk mencapai *World Class PublicService Media* harus mengarah dan menggunakan sistem digitalisasi dan multipleksing.

BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis TVRI, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi TVRI, maka dirumuskan target kinerja TVRI periode 2018-2019 dan 2020-2024. Dalam bab sebelumnya telah diuraikan tentang Visi, Misi dan Tujuan strategis yang pencapaiannya diukur dengan sasaran strategis, target kinerja dan kerangka pendanaan. Ada 3 (tiga) kinerja yang perlu diukur antara lain :

- a. Kinerja sasaran strategis berupa *outcome* (*Impact*) yang memberikan dampak terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan
- b. Kinerja sasaran program berupa *outcome* yang memberikan dampak terhadap pencapaian target kinerja organisasi
- c. Kinerja sasaran kegiatan, berupa *output* yang memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja organisasi

Pengukuran kinerja berdasarkan pada pencapaian visi, misi dan tujuan strategis diukur terhadap pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan LPP TVRI dalam pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan strategis sangat ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana kemampuan TVRI dalam mencapai target-target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra TVRI 2018-2019. Faktor-faktor apa saja yang memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja, bahkan dapat juga diketahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pencapaian target kinerja, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan dalam kebijakan maupun pengambilan keputusan yang tepat bagi kemajuan TVRI kedepan. Pencapaian sasaran strategis merupakan cerminan

dari dampak yang ditimbulkan oleh pemanfaatan suatu program atau capaian *outcome* program yang diselenggarakan oleh Televisi Republik Indonesia. Untuk dapat dinilai keberhasilan atau kegagalan suatu program maka ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja secara jelas sesuai dengan kondisi riil yang terjadi pada TVRI dan pengembangan kedepan. Ada 30 sasaran strategis yaitu :

1. SS1: Peningkatan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan siaran TV publik dengan 19 indikator kinerja.
2. SS2: Peningkatan efektifitas penyelenggaraan stasiun penyiaran TV publik dengan 3 indikator kinerja.
3. SS3: Terlaksana pengkajian dan penelitian yang efektif untuk meningkatkan daya saing TVRI dengan 5 indikator kinerja.
4. SS4: Terlaksana pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan 3 indikator kinerja.
5. SS5: Terlaksana koordinasi dan pembinaan sisten pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan 1 indikator kinerja.
6. SS6: Terlaksana pengawasan dan pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan LPP TVRI dengan 1 indikator kinerja.
7. SS7: Sumber Pembiayaan Baru dengan 5 Indikator kinerja.
8. SS8: Peningkatan jangkauan siaran terhadap wilayah dan jumlah penduduk dengan 2 indikator kinerja.
9. SS9: Digitalisasi Pemancar dan studio digital dengan 7 indikator kinerja.
10. SS10: Pengembangan early Warning System dengan 1 indikator kinerja.
11. SS11: Penguatan Signal Penerimaan Siaran dengan 3 indikator kinerja.
12. SS12: Taging Program Prioritas Nasional untuk Teknik dengan 1 indikator kinerja.
13. SS13: Terlaksananya pengembangan ICT *Office* dan ICT *Broadcasting* yang terintegrasi dengan 3 indikator kinerja.
14. SS14: Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan 4 indikator kinerja.
15. SS15: Tatakelola organisasi yang akuntabel, bersih dan berkinerja tinggi

dengan 2 indikator kinerja.

16. SS16: Meningkatnya kapasitas layanan publik dengan 1 indikator kinerja.
17. SS17: Peningkatan kompetensi profesi dengan 1 indikator kinerja.
18. SS18: Kepemimpinan dalam Organisasi dengan 1 indikator kinerja.
19. SS19: Penambahan SDM dan Lelang Jabatan sesuai kebutuhan dengan 1 indikator.
20. SS20: Penguatan kelembagaan dengan 9 indikator kinerja.
21. SS21: Melaksanakan Rebranding TVRI dengan 2 indikator kinerja.
22. SS22: Terwujudnya pengelolaan barang dan jasa milik Negara yang efektif dengan 2 indikator kinerja.
23. SS23: Terwujudnya pembentukan stasiun penyiaran baru dengan 1 indikator kinerja.
24. SS24: Terwujudnya Pembangunan Balai Diklat di daerah dengan 1 indikator kinerja.
25. SS25: Terwujudnya rumah dinas pejabat dengan 1 indikator kinerja.
26. SS26: terwujudnya Asrama/mess pusdiklat dengan 1 indikator kinerja.
27. SS27: Terwujudnya Pembangunan kantor TVRI Stasiun Penyiaran dengan 1 indikator kinerja.
28. SS28: Terwujudnya layanan dalam pengembangan usaha yang prima terhadap mitra dengan 1 indikator kinerja
29. SS29: Terwujudnya optimalisasi aset TVRI dengan 2 indikator kinerja.
30. SS30: Melakukan revisi Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2017 tentang Jenis dan tarif PNBK TVRI dengan 1 indikator kinerja.

Target dari setiap Indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 : Indikator Kinerja, Target Kinerja

IK	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	
		2018	2019
IK1	% Siaran Informasi, Pendidikan dan Hiburan masing-masing	56 %	56 %
		24%	24%
		20%	20%
IK2	% Audience Share	1	1,2
IK3	Jam Siaran Nasional (Analog dan Digital)	26.000 Jam	28.000 Jam
IK4	% Biaya Hak Siar	10%	15%
IK5	% Penataan Kanal Digital	10%	15%
IK6	Indeks Survei Eksternal (KPI)	3	3
IK7	Jumlah Penghargaan Eksternal (TVRI Nasional)	4	4
IK8	Jumlah Penghargaan Eksternal (TVRI Sta. Penyiaran)	50	50
IK9	Penghargaan Internasional	4	4
IK10	% Penataan Program	60%	70%
IK11	% Kerjasama Program Internasional	5%	10%
IK12	% Kerjasama Program Nasional	5%	10%
IK13	Jumlah Taging Program Nasional	0	1
IK14	% Diversifikasi Konten digital	10%	30%
IK15	% Distribusi konten melalui media baru	20%	30%
IK16	% Pusat-Pusat Produksi Program di daerah	0	0
IK17	% Distribusi konten ke market regional	0	0
IK18	% Distrubisi konten ke Market global	0	0
IK19	International Rating	0	0
IK20	Surat Teguran KPI (kepatuhan terhadap regulasi)	2	1
IK21	% Siaran Muatan Lokal	80%	90%
IK22	Jam siaran lokal (analog dan digital)	60.000 Jam	64.000 Jam
IK23	% Audience share lokal	1	1,2

Tabel 4.2 : Indikator dan Target Kinerja LPP TVRI.

IK	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
		2018	2019
IK24	Jumlah wilayah Survei <i>audience share</i> diluar Nielsen	3	3
IK25	% Langganan Data Nielsen	70%	75%
IK26	Indeks survei kepuasan mitra pada stasiun penyiaran	2	2,5
IK27	Indeks survei Kepuasan Pegawai pada stasiun penyiaran	2,5	2,5
IK28	Jumlah survei teknik pada stasiun penyiaran	3	3
IK29	Opini BPK	WDP	WTP
IK30	Penyelesaian Akun-Akun Terisoliasi	50%	60%
IK31	Indeks SPIP	2	3
IK32	Jumlah Stasiun Penyiaran yang memperoleh pembinaan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	5	5
IK33	Indeks APIP	2	3
IK34	% proses peraturan tentang implementasi iuran penyiaran.	0	20%
IK35	% Proses peraturan tentang pajak media Televisi.	0	20%
IK36	% PSO (<i>Public service Obligation</i>) untuk wilayah Perbatasan	0	2%
IK37	% PSA dari biaya promosi Kementerian/Lembaga/BUMN dipusat dan daerah.	0	2%
IK38	% Biaya USO untuk TVRI	0	2%
IK39	% <i>Coverage Area</i>	53,5%	72,0%
IK40	% <i>Coverage Population</i>	68%	75%
IK41	Jumlah pemancar digital	63	68
IK42	Jumlah studio digital	3	5
IK43	Jumlah Kanal Digital	4	5
IK44	% Fully Integrated digital MAM	20%	50%
IK45	% peralatan produksi dan penyiaran yang dimodernisasi	10%	30%
IK46	% persiapan TVRI sebagai operator multipleksing	10%	30%

Tabel 4.3: Indikator dan Target Kinerja LPP TVRI.

IK	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
		2018	2019
IK47	Layanan <i>Multiplatform</i>	4	4
IK48	% <i>Early Warning system (EMS)</i>	0	10%
IK49	% penguatan kualitas signal penerimaan Jakarta.	80%	83%
IK50	% Penguatan kualitas signal Penerimaan Surabaya.	10%	50%
IK51	Indeks <i>quality reception</i> (Sangat Tajam dan Tajam)	30%	36%
IK52	Jumlah Program prioritas nasional untuk teknik	0	1
IK53	Jumlah program ICT Office	10%	30%
IK54	Jumlah program ICT penyiaran	10%	30%
IK55	Indeks E-Government	0.7	1
IK56	Nilai Reformasi Birokrasi	C	B
IK57	Jumlah Stasiun Penyiaran yang telah melaksanakan reformasi birokrasi	1	10
IK58	% Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional	30%	40%
IK59	% Pegawai yang menerapkan kinerja individu	10%	20%
IK60	Indeks Akuntabilitas Kinerja	50	60
IK61	Jumlah Unit kerja yang menerapkan WBK (wilayah Bebas Korupsi) /WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)	2	5
IK62	Indeks Pelayanan Publik	3	3,2
IK63	Jumlah pegawai TVRI yang memperoleh sertifikasi profesi	10%	30%

Tabel 4.4: Indikator dan Target Kinerja LPP TVRI.

IK	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
		2018	2019
IK64	Indeks Kompetensi Profesi	2	2.5
IK65	Indeks Leadership	0	0
IK66	% Potensi Kandidat Pemimpin	0	10%
IK67	% Rekrutment SDM dan seleksi terbuka	80%	83%
IK68	% Pegawai yang memperoleh pendidikan digitalisasi	10%	20%
IK69	Jumlah stasiun penyiaran yang merumuskan Renstra Stasiun yang diturunkan dari Renstra Pusat	0	5
IK70	% Perubahan Struktur Organisasi.	30%	50%
IK71	% Pembentukan Stasiun Nasional	0	20%
IK72	% Pembentukan Stasiun Internasional	0	0
IK73	% Pembentukan Saluran Internasional	10%	40%
IK74	% Pembentukan Saluran Parlemen	0	10%
IK75	Jumlah stasiun penyiaran yang naik tipe klasifikasi.	0	10
IK76	% persiapan Kelembagaan baru melalui revisi UU penyiaran dan RUU RTRI	0	10%
IK77	% Revisi Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI	0	30%
IK78	% Rebranding TVRI	80%	83%
IK79	% Implementasi Rebranding	0	30%
IK80	% Pengelolaan aset	10%	30%
IK81	% Distribusi Aset	10%	30%
IK82	Jumlah stasiun penyiaran baru	0	2
IK83	Jumlah balai diklat yang dibangun di daerah	0	2
IK84	Jumlah rumah dinas pejabat yang dibangun	0	5
IK85	Jumlah mess/asrama Pusdiklat	0	1
IK86	Jumlah pembangunan Kantor TVRI Stasiun Penyiaran	0	1
IK87	% Pembangunan Pusdiklat di Studio Alam	0	20%
IK88	Peningkatan PNBP (Rp)	127.396.008.000	127.496.008.000
IK89	Jumlah optimalisasi Aset TVRI	0	1
IK90	% Optimalisasi Aset dan <i>Ground Breaking</i> TVRI Super block dengan <i>Digital Hub</i> melalui Kerjasama Pemanfaatan Aset (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) dan kerjasama lain sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku	0	30%
IK91	% Revisi PP 33 tahun 2017 tentang PNBP	10%	20%

4.2. Program TV Publik

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis TVRI, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi TVRI, implementasinya dilaksanakan melalui program teknis dan program generik. Program teknis meliputi Program Pengelolaan dan Pengembangan Siaran TV Publik TVRI dan Perencanaan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran Daerah. Sedangkan program generik meliputi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya TVRI.

Gambar 4.1: Program TVRI berdasarkan Program Generik dan Teknik



A. Program Teknis Pengelolaan TV Publik

Program Pengelolaan dan Pengembangan Siaran TV Publik TVRI terdiri dari kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik TVRI
- 2) Perencanaan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik TVRI
- 3) Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik, dan
- 4) Perencanaan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran Daerah.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Siaran TV Publik TVRI dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan sebagai implementasi pelaksanaan misi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang diposisikan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sisi informasi. Untuk itu arah pelaksanaan program Pengelolaan dan Pengembangan Siaran TV Publik TVRI adalah “menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.”

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban TVRI. Arah pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya TVRI adalah semakin meningkatnya kualitas pelayanan TVRI kepada masyarakat dan menjadi lembaga kebanggaan bagi karyawannya.

Outcome yang diharapkan dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya TVRI adalah: (1) terwujudnya tatakelola yang baik dan kualitas layanan serta dukungan yang tinggi terhadap unit kerja di lingkungan TVRI dan (2) tingkat kepercayaan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang tinggi.

4.3 Kerangka Pendanaan

Rencana Strategis Tahun 2018-2019 dengan memperhitungkan kerangka makro dan mikro dari situasi dan kondisi global, baik yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal Lembaga. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan eksternal adalah perkembangan teknologi pertelevisian menuju ke era konvergensi. Oleh karena itu di dalam rencana strategis 2018-2019 migrasi sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital perlu memperoleh dukungan anggaran yang cukup. Berdasarkan perhitungan atas semua komponen tujuan strategis, sasaran strategis, program serta rencana kegiatan maka dibutuhkan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan TVRI untuk memantapkan posisinya sebagai Lembaga Penyiaran Publik kelas dunia.

Kerangka pendanaan Renstra TVRI 2018-2019 diuraikan berdasarkan :

- a. Pencapaian tujuan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi TVRI yang terdiri dari 6 tujuan organisasi.
- b. Pencapaian program yang merupakan implementasi dari setiap program direktorat dan satuan kerja yang meliputi :
 - Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik.
 - Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis TVRI lainnya.

A. Alokasi Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis

Alokasi anggaran berdasarkan tujuan dan sasaran strategis dimaksudkan agar ada kepastian anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Hal ini penting agar tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5: Alokasi Anggaran berdasarkan tujuan dan sasaran strategis (dalam milyar rupiah)

NO	SS	Sasaran Strategis	PIC	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah (Rp)
				2018 (Rp)	2019 (Rp)	
TS1		Tujuan Strategis 1	Direktur Program dan Berita, Kepala Stasiun Penyiaran dan Kepala Puslitbang (Opex)	524.84	1,007.57	1.532,41
	SS1	Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan siaran TV publik				
	SS2	Peningkatan Efektifvitas Penyelenggaraan Stasiun Penyiaran TV Publik				
	SS3	Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian yang efektif untuk meningkatkan daya saing TVRI				

Tabel 4.6: Alokasi Anggaran Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis (dalam milyar rupiah)

NO	SS	Sasaran Strategis	PIC	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah (Rp)
				2018 (Rp)	2019 (Rp)	
TS2		Tujuan Strategis 2	Direktur Keuangan dan Kepala SPI Opex	186,99	318,30	505,29
	SS4	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel				
	SS5	Terlaksana Koordinasi dan Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel				
	SS6	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian yang efektif terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP TVRI				
	SS7	Sumber Pembiayaan Baru				

Tabel 4.7: Alokasi Anggaran Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis (dalam milyar rupiah)

NO	SS	Sasaran Strategis	PIC	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah (Rp)
				2018 (Rp)	2019 (Rp)	
TS3	Tujuan Strategis 3		Direktur Teknik	76,69	347,79	424,48
			Opex	1,60	4,08	5,68
			Capex	75,09	343,71	418,80
	SS8	Peningkatan Jangkauan Siaran Terhadap Wilayah dan Jumlah Penduduk				
	SS9	Peningkatan Pemancar dan studio Digital				
	SS10	Pengembangan <i>Early Warning System</i>				
	SS11	Penguatan Signal Penerimaan Siaran				
	SS12	Taging Program Prioritas Nasional untuk Teknik				
	SS13	Terlaksananya Pengembangan ICT <i>Office</i> dan <i>Broadcasting</i> yang terintegrasi				

Tabel 4.8 : Alokasi Anggaran berdasarkan tujuan dan sasaran strategis (dalam milyar rupiah)

NO	SS	Sasaran Strategis	PIC	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah (Rp)
				2018 (Rp)	2019 (Rp)	
TS4		Tujuan Strategis 4	Direktur Umum dan Kepala Pusdiklat	26,50	61,57	88,07
	SS14	Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi Birokrasi				
	SS15	Tata Kelola Organisasi yang akuntabel, bersih dan berkinerja tinggi				
	SS16	Meningkatnya kapasitas pelayanan publik				
	SS17	Peningkatan Kompetensi Profesi				
	SS18	Kepemimpinan Dalam Organisasi				
	SS19	Penambahan Sumber Daya Manusia sesuai Kebutuhan				

Tabel 4.9 : Alokasi Anggaran berdasarkan tujuan dan sasaran strategis (dalam milyar rupiah)

NO	SS	Sasaran Strategis	PIC	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah (Rp)
				2018 (Rp)	2019 (Rp)	
TS5		Tujuan Strategis 5	Direktur Umum	19,67	222,72	240,39
			Opex	2,87	165,81	166,68
			Capex	16,80	56,91	73,71
	SS20	Penguatan Kelembagaan				
	SS21	Melakukan <i>Rebranding</i> TVRI				
	SS22	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara				
	SS23	Terwujudnya Stasiun Penyiaran Baru				
	SS24	Terwujudnya Pembangunan Balai Diklat di daerah				
	SS25	Terwujudnya Pembangunan Rumah Dinas Pejabat				
	SS26	Terwujudnya Mess/Asrama Pusdiklat				
	SS27	Terwujudnya Pembangunan Kantor TVRI Stasiun Penyiaran				

Tabel 4.10: Alokasi Anggaran berdasarkan tujuan dan sasaran strategis (dalam milyar rupiah)

NO	SS	Sasaran Strategis	PIC	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah (Rp)
				2018 (Rp)	2019 (Rp)	
TS6		Tujuan Strategis 6	Direktur Pengembangan Usaha Opex	4,21	14.70	106.80
	SS28	Terwujudnya layanan pengembangan usaha terhadap mitra				
	SS29	Terwujudnya optimalisasi aset TVRI				
	SS30	Melakukan Revisi Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				

B. Alokasi Anggaran Program teknis dan Generik Renstra TVRI Tahun 2018-2019.

Program TVRI terbagi dua yaitu program teknis dan program generik. Program teknis meliputi program pengelolaan dan penyelenggaraan siaran TV Publik serta perencanaan dan pengembangan stasiun penyiaran, sedangkan program generik meliputi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Alokasi anggaran untuk program teknis tahun 2018 s/d 2019 diproyeksikan mencapai Rp. 1,967 triliun yang meliputi Direktorat Program dan Berita, Stasiun Penyiaran, Pengembangan Usaha dan teknik. Sedangkan untuk program generik tahun 2018 s/d 2019 mencapai Rp.843,89 milyar. Total proyeksi kebutuhan anggaran mencapai Rp. 2,811 triliun.

Tabel 4.11: Alokasi Anggaran Renstra TVRI Tahun 2018-2019
(dalam milyar rupiah)

NO	PROGRAM	URAIAN	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah (Rp)
			2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	PROGRAM TEKNIS (Pengelolaan dan Pengembangan Siaran TV Publik, dan Perencanaan Pengembangan Stasiun Penyiaran Daerah)	1. Program dan Berita	520.77	1,003.50	1,524.27
		2. Stasiun Penyiaran			
		3. Pengembangan Usaha	4.21	14.70	18.91
		4. Teknik	76.69	347.79	424.48
		Jumlah	601.67	1,365.99	1,967.66
2	PROGRAM GENERIK (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya)	1. Keuangan	186.99	318.30	505.29
		2. SPI			
		3. Umum	46.17	284.29	330.46
		4. Pusklat			
		6. Puslitbang	4.07	4.07	8.14
		Jumlah	237.23	606.66	843.89
		Total	838.90	1,972.65	2,811.55

Khusus untuk tahun 2019 terjadi kenaikan proyeksi kebutuhan anggaran dibandingkan dengan tahun 2018 disebabkan :

- a. Tagging program prioritas nasional terkait pemilihan umum tahun 2019
Rp. 15.200.000.000.
- b. Penataan program dan kanal digital Rp. 501.995.863.300.
- c. Diversifikasi dan penetrasi konten digital Rp. 55.790.000.000
- d. Pengadaan peralatan produksi dan penyiaran untuk modernisasi peralatan TVRI Rp.39.890.242.000
- e. Pengadaan peralatan transmisi Rp. 11.764.758.000.
- f. Pengadaan Peralatan Teknologi Informatika dan Kerjasama Teknik
Rp. 16.334.000.000
- g. Program Tagging Prioritas Nasional untuk Belanja Modal teknik berupa Peralatan Studio, Transmisi dan ICT menghadapi Pemilu 2019 sebesar
Rp. 74,800,000,000
- h. Peningkatan kualitas studio dan pemancar tahun 2019 sebesar
Rp. 143,300,000,000
- i. Terlaksananya peningkatan program prioritas TVRI sebesar
Rp. 8,000,000,000
- j. Pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan Tahun 2019
Rp. 201,491,493,750

Secara grafis alokasi proyeksi kebutuhan anggaran TVRI setiap tahun memperlihatkan trend yang meningkat secara signifikan. Peningkatan kebutuhan TVRI tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 4.1: Perkembangan kebutuhan Anggaran TVRI
Tahun 2018 s/d 2019



Proyeksi kebutuhan anggaran tahun 2018-2019 belum mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya, bila dikaitkan dengan digitalisasi sektor penyiaran yang ditandai dengan adanya migrasi sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital. Untuk itu diperlukan terobosan dalam memenuhi kebutuhan TVRI secara keseluruhan.

4.4. Kerangka Pendanaan Mengurangi Beban APBN

Kebutuhan anggaran tersebut belum sebanding dengan kebutuhan TVRI terutama menghadapi migrasi penyiaran analog ke sistem penyiaran digital. Untuk melakukan migrasi teknologi dan memenuhi kebutuhan pendanaan TVRI memerlukan kerangka pendanaan yang jelas. Kerangka Pendanaan yang diperlukan agar TVRI dapat optimal menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pendanaan digitalisasi system penyiaran televisi bersumber dari pendanaan yang berasal dari rupiah murni.

2. Pendanaan terhadap sejumlah isu strategis dapat berasal dari kerjasama dengan mitra, optimalisasi aset, sebagai pelengkap dari Renstra TVRI 2018-2019.
3. Pendanaan juga bisa dibangun melalui kerangka bantuan berbagai pihak untuk melakukan kegiatan-kegiatan dukungan demokrasi dan stabilitas politik.

Pengembangan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk menjadi lembaga penyiaran kelas dunia bila hanya mengandalkan anggaran APBN semata sangatlah tidak mungkin. Oleh karena itu diperlukan alternatif kerangka pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip TV publik. Negara dan masyarakat merupakan pemilik TV publik dunia. Untuk itu perlu adanya investasi negara dan pembiayaan publik agar TV publik di Indonesia dapat berkembang sejajar dengan TV Publik Internasional di dunia. Untuk itu beberapa alternatif pendanaan adalah :

- a. Investasi Baru dari Negara
- b. Pembiayaan publik melalui iuran televisi yang disatukan dengan rekening listrik.

Bila ada investasi baru dari Negara dan pembiayaan publik melalui iuran televisi maka secara bertahap, dapat mengurangi beban APBN dalam membiayai penyelenggaraan TV Publik di Indonesia.

A. Reinvestasi Negara Dan Publik Sebagai Pemilik TVRI

1. Operasional, Realisasi Anggaran dan Aset LPP TVRI

Negara sebagai pemilik TV Publik memiliki kepentingan untuk menyampaikan program-program hiburan, berita, pendidikan dan budaya kepada masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Media yang mempunyai daya jangkauan dan pengaruh yang sangat luas untuk melakukan semua hal tersebut adalah Televisi. Sampai saat ini (2017) TVRI, sebagai media yang dimiliki oleh negara baru

menjangkau 68% populasi dan 53% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewajiban menjangkau seluruh populasi dan wilayah NKRI menjadi tanggung jawab TVRI sebagai TV Publik dan sekaligus sebagai salah satu fungsi sebagai pilar demokrasi di negara ini. Untuk itu, masih diperlukan investasi yang cukup besar dari negara untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dalam bentuk *Operating Expenditure* (Opex) dan *Capital Expenditure* (Capex).

Negara telah melakukan investasi terhadap TV Publik melalui APBN, terakhir di tahun 2018 mencapai jumlah Rp 838,895 milyar dengan peruntukan Belanja Pegawai sebesar Rp 283,012 milyar, Belanja Operasional sebesar Rp 245,200 milyar, Belanja Non Operasional Rp 218,095 dan Belanja Modal sebesar Rp 92,588 milyar. Sumber lain penerimaan TVRI berasal dari Jasinonsi/ PNBPN, yang pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 126 milyar. Jumlah investasi dan suntikan dana APBN dan Jasinonsi/ PNBPN tersebut untuk saat ini belum mencukupi untuk mendukung operasional TVRI dalam rangka mengemban peran sebagai TV Publik. Sebagai gambaran sumber pembiayaan selama kurun 3 tahun terakhir, operasional TVRI selalu dalam kondisi defisit sebagai berikut:

Tabel 4.12: Investasi Negara tahun 2015-2017

Laporan Operasional	TAHUN		
	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
Kegiatan Operasional			
Pendapatan	161.370.636.949	138.944.685.076	150.969.364.821
Beban	996.799.682.811	982.316.226.688	919.757.770.943
Surplus/ (Defisit) Operasional	(835.429.045.862)	(843.371.541.612)	(768.788.406.122)
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan	4.335.627.138	3.621.353.729	8.159.550.389
Beban	458.780.252	2.255.249.540	6.255.676.687
Surplus/ (Defisit) Non Operasional	3.876.846.886	1.366.104.189	1.903.873.702
Total Surplus/ (Defisit)	(831.552.198.976)	(842.005.437.423)	(766.884.532.420)

Defisit TVRI dalam 3 tahun terakhir tercatat masing-masing sebesar Rp 831,552 milyar tahun 2015, Rp 842,005 milyar tahun 2016 dan Rp 760,884 milyar pada tahun 2017. Meskipun telah terjadi penurunan defisit pada tahun 2017 sebesar Rp 75,120 milyar atau 8,92% dari tahun sebelumnya, namun penurunan ini belum menyentuh substansi bahwa TVRI sebagai TV Publik mempunyai kemandirian dalam menghimpun sumber-sumber penerimaan untuk membiayai operasinya. Sehingga yang terjadi adalah ketergantungan TVRI kepada APBN yang pada akhirnya berpengaruh kepada kualitas siaran dan kemampuan menjaga independensi kepada pemerintah sebagai penyandang dana utama.

Disisi lain kemampuan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menggunakan dana pemerintah (APBN) dalam mengeksekusi anggaran pun belum menggembirakan, terlihat selama 2 tahun terakhir (tahun 2015 dan tahun 2016) serapan anggaran belum maksimal, masih dibawah 95%, baru di tahun 2017 serapan anggaran mencapai 95,18%.

Rendahnya serapan anggaran menyebabkan pemerintah semakin mengurangi pagu anggaran yang diberikan. Angka serapan tahun 2015 s.d. 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.13: Belanja LPP TVRI Tahun 2015-2017

APBN LPP TVRI	Tahun		
	2015	2016	2017
Pagu	901.310.530.000	872.737.402.000	767.156.186.000
Belanja Pegawai	270.767.215.000	281.309.918.000	295.392.895.000
Belanja Operasional	513.394.151.000	485.653.135.000	390.528.680.000
Belanja Modal	117.149.164.000	105.774.349.000	81.244.511.000
Realisasi	831.145.673.059	746.584.122.461	730.191.496.915
Belanja Pegawai	261.033.016.750	276.299.757.709	290.924.622.481
Belanja Operasional	461.584.025.103	412.649.829.348	364.596.126.502
Belanja Modal	108.528.631.206	57.634.535.404	74.670.747.932
% Serapan APBN	92,22%	85,55%	95,18%

Inilah sebabnya sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 pagu anggaran semakin menurun. Disamping serapan yang rendah, permasalahan lain yang dihadapi oleh LPP TVRI adalah kualitas belanja yang rendah. Hal ini tercermin dari laporan keuangan LPP TVRI dalam 3 tahun terakhir (tahun 2015, 2016 dan 2017) mendapat opini BPK 'Disclaimer.' Baru di tahun 2018, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan LPP TVRI tahun 2017.

Opini tersebut mempunyai arti bahwa belanja yang dilakukan oleh TVRI sepanjang tahun 2014 s.d. 2016 belum menunjukkan kualitas seperti yang diharapkan. Belanja modal tidak menjadi aset seluruhnya, karena terjadi kekurangan volume, kemahalan harga dan berbagai bentuk inefisiensi lainnya, yang menurunkan kualitas belanja tersebut.

Pengaruh selanjutnya atas kualitas belanja tersebut adalah, tidak terdapat penambahan yang signifikan dalam Neraca LPP TVRI. Gambaran perkembangan Neraca LPP TVRI tahun 2015 s.d. 2017 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.14: Neraca TVRI tahun 2015-2017

Neraca Aktiva	Tahun		
	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
Aset	3.938.544.278.160	4.037.002.894.072	4.378.025.771.514
Passiva			
Kewajiban	203.070.837.268	199.809.436.245	180.619.880.079
Ekuitas	3.735.473.440.892	3.837.193.457.827	4.197.405.891.435
Total Kewajiban dan Ekuitas	3.938.544.278.160	4.037.002.894.072	4.378.025.771.514

Aset yang tersaji dalam neraca LPP TVRI berupa nilai buku (harga perolehan dikurangi depresiasi). Terdapat informasi yang belum disajikan secara fair, yakni nilai pasar (fair market value) aset LPP TVRI jauh lebih tinggi dari harga bukunya, karena sebagian besar aset LPP TVRI berupa tanah dan bangunan berada pada tempat yang strategis sehingga mempunyai nilai pasar yang lebih tinggi dari nilai bukunya.

Seluruh kondisi tersebut diatas menyebabkan LPP TVRI tidak mampu melakukan *Opex* dan *Capex* yang diperlukan untuk mendukung fungsinya sebagai TV Publik. Besaran *Opex* dan *Capex* yang ada, hanya mampu untuk melakukan tambal sulam peralatan studio atau pemancar yang rusak. Akibat lebih lanjut adalah kondisi studio dalam mendukung siaran kurang dari 50% (terutama kamera) yang dimiliki LPP TVRI tercatat terakhir dilakukan pembelian pada tahun 2002, demikian juga kondisi pemancar sebagian besar 251 pemancar dari 368 pemancar (pengadaan tahun 1982 s.d. 2008) kurang dari 35%, selama ini hanya melakukan perbaikan minor, selebihnya bergantung kepada Kominfo dan BP3TI melalui Proyek ITTS I dan II.

2. Opex dan Capex

Secara keseluruhan anggaran Opex (*Operational Expenditure*) dan Capex (*Capital Expenditure*) tahun 2018-2019 sebesar 2,811.55. Sumber pembiayaan utama LPP TVRI saat ini adalah APBN dan PNBPN. Pada tahun 2018 besaran APBN Rp 838,90 milyar dan PNBPN sebesar Rp 96,00 milyar, yang artinya porsi APBN terhadap operasional LPP TVRI masih berada pada angka 89,72% dan PNBPN sebesar 10,28%. Dalam kondisi seperti ini, maka LPP TVRI sangat bergantung kepada pemerintah dalam hal pembiayaan, sebuah kondisi yang kurang baik bagi lembaga publik yang diharapkan independen dalam menyampaikan programnya.

Oleh karena itu peningkatan PNBPN menjadi suatu keniscayaan untuk memperkecil ketergantungan kepada pemerintah. PP 33/2017 tentang Jenis dan tarif atas PNBPN TVRI mengatur tentang PNBPN Fungsional yang bersumber dari usaha jasa siaran (Kerjasama Produksi dan Penyiaran Program, kerjasama penyiaran iklan layanan masyarakat dan kerjasama penyiaran iklan komersial). Opex dan Capex tahun 2019 telah mendapat dukungan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh LPP TVRI dengan Komisi I DPR RI pada tanggal 30 Mei 2018. Alokasi anggaran untuk opex dan capex LPP TVRI tahun 2018-2019 dan 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.15: Alokasi anggaran Opex dan Capex Tahun 2018-2019

NO	TUJUAN	PIC	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah
			2018	2019	
1	Terselenggaranya program siaran informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat serta siaran bermuatan lokal berbasis hasil penelitian untuk mencerdaskan bangsa dan memperkuat persatuan dan keberagaman.	Direktur Program dan Berita, Kepala TVRI Stasiun Penyiaran dan Kepala Puslitbang (Opex)	524.84	1,007.57	1,532.41
2	Terselenggaranya pengelolaan dan Pengawasan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan kredibel secara profesional dan modern, berbasis teknologi informasi	Direktur Keuangan Kepala SPI (Opex)	186.99	318.30	505.29
3	Terselenggaranya penyiaran berbasis digital dalam bentuk layanan multiplatform, multikanal dan multiplexing dengan menggunakan teknologi terkini yang dapat diakses secara global	Direktur Teknik (Opex)	1.60	4.08	5.68
		Direktur Teknik (Capex)	75.09	343.71	418.80
4	Terselenggaranya reformasi birokrasi, tata kelola dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif, profesional dan beretika serta memiliki budaya kerja dan loyalitas berbasis meritokrasi.	Direktur Umum, Kepala Pusdiklat (Opex)	26.50	61.57	88.07
5	Terselenggaranya tatakelola kelembagaan yang dinamis, efektif, efisien dan berkelanjutan serta pengelolaan aset berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Direktur Umum (Opex)	2.87	165.81	168.68
		Direktur Umum (Capex)	16.80	56.91	73.71
6	Terselenggaranya optimalisasi pemanfaatan aset, usaha jasa siaran dan jasa non siaran untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan	Direktur Pengembangan Usaha (Opex)	4.21	14.70	18.91
	Jumlah	Opex	747.01	1,572.03	2,319.04
		Capex	91.89	400.62	492.51
		Total	838.90	1,972.650	2,811.55

3. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan utama LPP TVRI saat ini adalah APBN dan PNBP. Pada tahun 2018 besaran APBN Rp 838,90 milyar dan PNBP sebesar Rp 96,00 milyar, yang artinya porsi APBN terhadap operasional LPP TVRI masih berada pada angka 89,72% dan PNBP sebesar 10,28%. Dalam kondisi seperti ini, maka LPP TVRI sangat bergantung kepada pemerintah dalam hal pembiayaan, sebuah kondisi yang kurang baik bagi lembaga publik yang diharapkan independen dalam menyampaikan programnya. Oleh karena itu peningkatan PNBP menjadi suatu keniscayaan untuk memperkecil ketergantungan kepada pemerintah. PP 33/2017 tentang Jenis dan tarif atas PNBP TVRI mengatur tentang PNBP Fungsional yang bersumber dari usaha jasa siaran (Kerjasama Produksi dan Penyiaran Program, kerjasama penyiaran iklan layanan masyarakat dan kerjasama penyiaran iklan komersial). Seiring perkembangan teknologi digital beserta layanan turunannya yang berintegrasi dalam dunia penyiaran, maka jenis layanan dan tarif yang ada dalam PP nomor 33/2017 perlu penyesuaian.

4. Peningkatan PNBP dapat dilakukan dengan dua cara

a. Intensifikasi PNBP

Intensifikasi PNBP dapat dilakukan dengan mengubah struktur tarif yang ada dalam PP Nomor 33 tahun 2017 tanggal 11 September 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada LPP TVRI. Tarif yang berlaku saat ini belum sesuai dengan kondisi dunia penyiaran, sebagai contoh tarif iklan untuk 1 spot selama 30 detik ditetapkan sebesar Rp 2 juta, tanpa membedakan jam tayang atau zonasi waktu. Hal ini tidak lazim bagi dunia per-televisian, karena penayangan iklan pada saat prime time seperti kurva normal di mana pada peak hour penonton atau prime time akan dikenakan harga yang lebih mahal dibanding waktu lainnya. Kenaikan tarif ini juga akan berpengaruh pada besaran *discount* yang bisa diberikan oleh TVRI, agency akan tertarik untuk menggunakan jasa LPP TVRI dengan imbalan *discount* yang sepadan seperti yang diberikan stasiun

televisi lainnya. Potensi kenaikan PNBP melalui intensifikasi ini diperkirakan akan mencapai 70% s.d. 200%. Intensifikasi penerimaan PNBP mengharuskan revisi PP 33 tahun 2017. Oleh karena itu perlu dipersiapkan kajian akademis revisi PP 33 tahun 2017 dan ijin prinsip dari kementerian keuangan untuk melakukan perubahan.

b. Ekstensifikasi PNBP

Ekstensifikasi PNBP dapat dilakukan dengan menambah jumlah jenis penerimaan PNBP yang secara potensial dapat diterima oleh LPP TVRI, sebagai contoh kegiatan *Special Event*. Terdapat banyak jenis penerimaan ini (*special event*) dan turunannya (sebagai contoh *public viewing right* atau nonton bareng secara komersial) sekaligus.

Oleh karena sudah disebut dalam PP, jenis penerimaan ini dapat secara langsung di eksekusi di lapangan tanpa perlu merevisi PP, namun demikian untuk pelaksanaannya harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan terlebih dahulu. LPP TVRI harus menyiapkan permohonan yang berisi penjelasan mengenai kegiatan *special event* beserta turunannya untuk mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

Ekstensifikasi juga dapat dilakukan dengan meminta kepada K/L/P dan BUMN/D dalam melakukan sosialisasi program melalui LPP TVRI. Pemerintah dalam hal ini dapat menerbitkan Perpres tentang pengalokasian belanja iklan/ sosialisasi/ PSA melalui LPP TVRI. Potensi penerimaan dari ekstensifikasi PNBP ini diperkirakan mencapai kumulatif Rp 650 milyar dalam 5 tahun ke depan.

Potensi intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.16: Intensifikasi dan Extensifikasi PNBPN tahun 2018-2019

NO	PNBPN	Tahun		Jumlah (Rp)
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	Intensifikasi	96.00	255.90	351.90
2	Ekstensifikasi		50.00	50.00
	Jumlah	96.00	305.90	401.90

5. Diversifikasi Penerimaan

Peraturan perundangan yang ada mengamankan bahwa dalam rangka menjalankan misi guna mewujudkan visi TVRI dan menyelenggarakan program-program penyiaran yang mendorong terciptanya stabilitas sosial dan politik, peningkatan jati diri, peningkatan citra bangsa dan negara di mata internasional, pendanaan TVRI dapat dapat berasal dari:

- iuran penyiaran;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- sumbangan masyarakat;
- siaran iklan;
- usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Dari aturan yang masih berlaku tersebut LPP TVRI mempunyai peluang mendapatkan sumber pembiayaan berikut ini:

a. Iuran Penyiaran/ Iuran Televisi

Pendanaan televisi publik di dunia sebagian dibiayai oleh masyarakat melalui iuran penyiaran atau iuran televisi (dikenakan kepada pemilik televisi). Tujuannya untuk meningkatkan justifikasi kepemilikan TV Publik oleh masyarakat yang berkonsekuensi terhadap netralitas dan independensi lembaga. Untuk

mengimplementasikan iuran penyiaran sebagai salah satu sumber pendanaan bagi TVRI perlu dukungan peraturan yang lebih teknis. Implementasinya dapat dilakukan melalui beberapa skema, misalnya iuran penyiaran digabung dengan pembayaran listrik (konvensional dan token), atau telepon (telepon konvensional dan atau pra bayar).

Pelanggan listrik pada tahun 2017 tercatat kurang lebih 66 juta, dengan asumsi bahwa pelanggan listrik 1.200 watt ke atas mencapai 40%, maka dengan menggunakan tarif Rp 5.000,- per bulan akan terkumpul iuran televisi sebesar Rp $5.000 \times (40\% \times 66.000.000) = \text{Rp } 132 \text{ milyar per bulan}$, atau Rp 1.584 milyar per tahun. Pelanggan telepon fix dan genggam (seluler) lebih banyak lagi. Jika dibebankan pada pulsa telepon pra bayar, aplikasi untuk menonton TVRI diinjeksikan ke perangkat seluler. Hal ini harus menjadi kebijakan pemerintah sehingga masyarakat Indonesia dapat menyaksikan TVRI kapan pun dan dimanapun sepanjang ada koneksi internet.

B. Penyelenggara Multiplexing/Common Integrated Infrastructure Provider [CIIP]

Pemerintah telah menetapkan TVRI sebagai penyelenggara *multiplexing* pada era penyiaran televisi digital. Sebagai penyelenggara multiplexing, TVRI dapat memanfaatkan slot yang tidak terpakai oleh TVRI sebagai sumber pendanaan. Potensi penerimaan dari penyelenggara multiplexing ini sangat besar, dan akan dimulai saat *digital switch on* pada tahun 2020, atau lebih cepat seiring dengan disahkannya Undang-undang penyiaran yang baru.

Apapun keputusan yang diambil oleh parlemen dalam penyelenggaraan multiplexing ini, TVRI akan menjadi salah satu penyedia MUX. Potensi yang akan diterima oleh TVRI diperkirakan sebesar Rp 1.200 milyar setahun dan akan meningkat 20% s.d. 30% per tahun seiring dengan penambahan luasan wilayah cakupan layanan. Beberapa wilayah yang berada di remote area diperkirakan akan menjadi kekuatan layanan TVRI dan ini akan menjadi *captive market* untuk TVRI.

C. Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Aset lahan dan bangunan TVRI sangat potensial namun pemanfaatannya belum optimal. Salah satu cara optimalisasi aset adalah dengan menciptakan nilai tambah (*value added*), dengan pengelolaan yang baik meng-*upgrade*, memperbaiki, menambah fasilitas, merawat, dan atau melakukan kerjasama pemanfaatan aset, tujuannya selain untuk meningkatkan nilai aset TVRI juga dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan TUSI TVRI dalam rangka mewujudkan visi sebagai *World Class Broadcaster*.

Nilai aset TVRI yang sangat besar serta letaknya yang strategis merupakan kekuatan dalam upaya menggandeng mitra dalam melakukan kerjasama pemanfaatan aset. Potensi penerimaan aset ini diperkirakan mencapai Rp 800 milyar per tahun yang berasal dari *upfront payment* atas kerjasama pemanfaatan aset dan ditargetkan akan meningkat 10% per tahun,

D. Public Service Obligation [PSO]

TVRI melayani informasi penyebarluasan program dan kebijakan pemerintah ke seluruh tanah air. Untuk meng-*cover* daerah-daerah di luar kota survei Nielsen dan daerah 3 T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) TVRI dalam rangka memberikan keadilan penyebaran informasi, TVRI membutuhkan tambahan anggaran yang bersumber dari PSO. TVRI memang bukan BUMN yang mempunyai kewajiban memberikan PSO yang tujuan utamanya meringankan beban masyarakat atas biaya-biaya tertentu. Kewajiban TVRI adalah menyebarluaskan informasi pembangunan secara berimbang ke seluruh pelosok negeri. Dalam rangka itu perlu ada kerangka pendanaan yang lebih jelas yang bersumber dari PSO. Potensi PSO ini diperkirakan sebesar Rp 200 milyar pada tahun 2019 dan ditargetkan akan meningkat 15% s.d. 25% per tahun.

Tabel 4.17: Diversifikasi Penerimaan Tahun 2018-2019

NO	Diversifikasi Penerimaan	Rencana Penerimaan		Jumlah
		2018	2019	
1	Iuran Televisi	0.00	0.00	-
2	MUX/ (CIIP)	0.00	0.00	-
3	Optimalisasi Aset	0.00	0.00	-
4	PSO/ CSR	0.00	200.00	200.0

4.5 . Mengurangi Peran APBN

Apabila TVRI dapat memperoleh pendanaan dari sumber-sumber tersebut di atas, maka tidak menutup kemungkinan beban pemerintah (APBN) pun berkurang. APBN hanya untuk meng-cover biaya pegawai dan pemeliharaan. Defisit LPP TVRI masih akan terjadi dalam 3 tahun ke depan, mulai tahun 2021 LPP TVRI diharapkan dapat mengalami surplus dengan sumber penerimaan baru berupa iuran televisi, operator *multiplexing*, optimalisasi aset, PSO disamping tetap ada penerimaan yang berasal dari PNBP.

Tabel 4.18: Pengurangan Peran APBN

NO	Peran APBN	Tahun		Jumlah
		2018	2019	
1	Opex/ Capex	838.90	1,972.65	2,811.55
2	PNBP	96.00	305.90	401.90
3	Diversifikasi Penerimaan	0	200.00	200.00
4	Jumlah Penerimaan	96.00	505.90	601.90
5	APBN	838.90	866.00	1,704.90
6	Surplus/ (Defisit)	(742.90)	(360.10)	(1,103.00)
7	% APBN terhadap Opex dan Capex	100.00%	43.90%	
8	% APBN terhadap Penerimaan	873.85%	171.18%	

Penurunan peran APBN terhadap Opex dan Capex dapat digambarkan dalam tabel diatas, secara berangsur-angsur dari 100% di tahun 2018 menjadi 43,90% pada tahun 2019. Secara total % APBN terhadap Opex dan Capex sampai tahun 2019 sekitar 143,9%. Sedangkan porsi APBN terhadap penerimaan juga secara berangsur-angsur turun dari 873,85% di tahun 2018 menjadi 171,18% pada tahun 2019, dan diharapkan semakin menurun pada tahun tahun berikutnya.

D. Pembiayaan (Financing)

Sekarang adalah saatnya negara dan publik secara bersama berperan dalam mendukung TVRI menjalankan fungsinya kembali sebagai TV Publik. TVRI memerlukan re-investasi negara dan publik untuk dapat mewujudkan perannya sebagai TV Publik. Tujuan re-investasi negara dan publik adalah agar TVRI mampu memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reinvestasi ini juga diperlukan agar:

- a. Anggaran operasional LPP TVRI tidak berada dibawah rata-rata Industri
- b. Estimasi *re-run* Program sebanyak 30–40% turun menjadi sebesar toleransi industri maksimal 10%
- c. Target TVRI untuk mensejajarkan diri dengan industri bisa diwujudkan

Besaran angka re-investasi yang diperlukan oleh TVRI dari pemerintah adalah untuk menutup defisit di 3 tahun pertama operasi LPP TVRI (2018,2019 dan 2020) sebesar kurang lebih Rp 1.400 milyar dan menghidupkan kembali iuran televisi yang akan dibebankan pada publik mulai tahun 2020. Dalam upaya untuk mewujudkan re-investasi pemerintah ke TVRI, skema yang memungkinkan untuk dilakukan adalah:

- a. Melalui mekanisme APBN, berupa tambahan anggaran pada tahun 2019 dan 2020
- b. Melalui mekanisme *Public Private Partnership* dengan *availability payment*, TVRI bekerja sama dengan *partner* (Swasta/ BUMN) dalam menyediakan infrastruktur dengan pembayaran melalui PNBP yang akan diterima TVRI di masa mendatang
- c. Pengembangan infrastruktur digital diharapkan dapat mendukung LPP TVRI menjadi lembaga penyiaran kelas dunia.

Peran publik yang juga sebagai pemilik TVRI tidak bisa diabaikan. Kembali menghidupkan iuran televisi adalah salah satu cara agar masyarakat bisa mendapatkan acara yang berkualitas dan sampai ke pelosok tanah air. Oleh karena itu pemerintah dan TVRI harus secara gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat timbul rasa memiliki TV publik sehingga timbul kesadaran untuk menghidupkan kembali TV publik melalui iuran televisi. Dukungan pemerintah lainnya diperlukan dalam rangka:

- a. Percepatan pengesahan undang-undang penyiaran sehingga peran TVRI sebagai operator mux segera bisa diwujudkan
- b. Sosialisasi/ Iklan/ PSA Kementerian/ Lembaga/ Pemda dan termasuk BUMN dan BUMD agar melalui LPP TVRI
- c. Penerbitan aturan yang memberi kewenangan TVRI dalam melakukan kerjasama optimalisasi aset
- d. PSO untuk menjangkau wilayah 3 T

Dengan adanya dukungan pemerintah tersebut, diharapkan LPP TVRI pada tahun ke-4 telah mampu *self sustain* dan berdiri sejajar dengan lembaga penyiaran swasta lainnya dan akan memiliki landasan untuk bangkit menjadi lembaga penyiaran publik kelas dunia.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis TVRI Tahun 2018-2019 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019). Renstra TVRI ini sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh TVRI. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi unit-unit kerja dalam menyusun Rencana Strategis Stasiun Penyiaran Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor bidang informasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2018-2019.

Untuk mengimplementasikan Rencana Strategis TVRI 2018-2019 beserta tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Renstra 2018-2019 ini dijadikan acuan dalam penetapan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja masing-masing direktorat dan unit kerja baik di Pusat maupun stasiun penyiaran.
2. Renstra 2018-2019 ini dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing stasiun penyiaran dengan menyusun dan merumuskan Rencana Strategis Stasiun Penyiaran yang merupakan turunan dari Renstra 2018-2019 ini, dan direvisi oleh Satuan Pengawasan Internal serta mendapat persetujuan Dewan Direksi.
3. Terkait dengan konvergensi teknologi, khususnya migrasi analog ke digital yang bermuara kepada *analog switch off* (ASO), maka TVRI harus melaksanakannya secara penuh. Biaya untuk proses ini, khususnya menyangkut penggantian infrastruktur produksi dan penyiaran dari analog ke digital didanai oleh negara.

4. Pendanaan ASO oleh negara menyangkut infrastruktur produksi dan penyiaran TVRI dikarenakan secara akumulatif dana yang dibutuhkan TVRI untuk memantapkan posisinya sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang modern dan memberi layanan optimal dalam kurun waktu tahun 2018-2019.
5. Terkait dengan konvergensi teknologi, TVRI juga mengembangkan jenis layanannya multiplatform, sehingga tidak lagi terbatas pada layanan tv linier, tetapi juga layanan media baru dalam rangka mewujudkan TVRI sebagai *World Class Public Services Media* pada akhir tahun 2022.

Rencana Strategis TVRI Tahun 2018-2019 sebagai amanah peraturan perundangan dilaksanakan dalam masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam rangka mencapai Visi sebagai lembaga penyiaran kelas dunia. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2019 adalah suatu kegiatan yang sangat penting. Terlebih lagi pada saat ini sistem penyiaran televisi sedang mengalami migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital.

Selain itu tidak *apply*-nya Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kepegawaian juga berpotensi menjadi penghambat upaya pencapaian Renstra TVRI 2018-2019. Bersamaan dengan itu, bentuk kelembagaan TVRI pun perlu dikaji kembali, sebab Lembaga Penyiaran Publik tidak terdapat dalam struktur kelembagaan negara.

Terlepas dari persoalan di atas, penyusunan Renstra 2018-2019 merupakan revisi terhadap Renstra TVRI 2015-2019. Revisi Renstra ini sesungguhnya dilakukan dengan mengacu pada capaian Sasaran Strategis dan kondisi dinamis lingkungan global. Rencana Kegiatan TVRI yang terdapat di dalam Renstra

Tahun 2018-2019 dan anggaran yang dibutuhkan telah disusun dan dengan dilengkapi prognosis. Dengan demikian menjadi jelas bahwa setiap Sasaran Strategis sudah ada kegiatan dan pelaksanaannya.

Agar pelaksanaan kegiatan berada pada jalur yang sesuai dan benar, maka pelaksanaan Renstra perlu dimonitoring dan dievaluasi secara periodik. Rapat Kerja evaluasi pencapaian target-target akan dilakukan pada triwulan, semesteran dan tahunan yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Pengawas maupun pemangku kepentingan yaitu Pemerintah dan DPR-RI.

Lampiran I : Alokasi Anggaran Berdasarkan Tujuan Strategis Tahun 2018-2019

NO	TUJUAN	PIC	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah (Rp)
			2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	Terselenggaranya program siaran informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat serta siaran bermuatan lokal berbasis hasil penelitian untuk mencerdaskan bangsa dan memperkuat persatuan dan keberagaman.	Direktur Program dan Berita, Kepala TVRI Stasiun Penyiaran dan Kepala Puslitbang (Opex)	524.84	1,007.57	1,532.41
2	Terselenggaranya pengelolaan dan Pengawasan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan kredibel secara profesional dan modern, berbasis teknologi informasi	Direktur Keuangan Kepala SPI (Opex)	186.99	318.30	505.29
3	Terselenggaranya penyiaran berbasis digital dalam bentuk layanan multiplatform, multikanal dan multiplexing dengan menggunakan teknologi terkini yang dapat diakses secara global	Direktur Teknik (Opex)	1.60	4.08	5.68
		Direktur Teknik (Capex)	75.09	343.71	418.80
4	Terselenggaranya reformasi birokrasi , tata kelola dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif, profesional dan beretika serta memiliki budaya kerja dan loyalitas berbasis meritokrasi.	Direktur Umum, Kepala Pusdiklat (Opex)	26.50	61.57	88.07

NO	TUJUAN	PIC	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah (Rp)
			2018 (Rp)	2019 (Rp)	
5	Terselenggaranya tatakelola kelembagaan yang dinamis, efektif, efisien dan berkelanjutan serta pengelolaan aset berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Direktur Umum (Opex)	2.87	165.81	168.68
		Direktur Umum (Capex)	16.80	56.91	73.71
6	Terselenggaranya optimalisasi pemanfaatan aset, usaha jasa siaran dan jasa non siaran untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan	Direktur Pengembangan Usaha (Opex)	4.21	14.70	18.91
	Jumlah	Opex	747.01	1,572.03	2,319.04
		Capex	91.89	400.62	492.51
		Total	838.90	1,972.650	2,811.55

Lampiran II: Ekstensifikasi dan Intensifikasi PNBП Tahun 2018-2019

NO	PNBP	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah (Rp)
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	Intensifikasi	96.00	255.90	351.90
2	Ekstensifikasi		50.00	50.00
	Jumlah	96.00	305.90	401.90

Lampiran III: Diversifikasi Penerimaan Tahun 2018-2019

NO	Diversifikasi Penerimaan	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah (Rp)
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	Iuran Televisi	0.00	0.00	-
2	MUX/ (CIIP)	0.00	0.00	-
3	Optimalisasi Aset	0.00	0.00	-
4	PSO/ CSR	0.00	200.00	200.00
5	Jumlah	-	200.00	200.00

Lampiran IV: Pengurangan Beban APBN Tahun 2018-2019

NO	Peran APBN	Alokasi Anggaran (Milyar)		Jumlah (Rp)
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	Opex/ Capex	838.90	1,972.65	2,811.55
2	PNBP	96.00	305.90	401.90
3	Diversifikasi Penerimaan	-	200.00	200.00
4	Jumlah Penerimaan	96.00	505.90	601.90
5	APBN	838.90	866.00	1,704.90
6	Surplus/ (Defisit)	(742.90)	(360.10)	(1,103.00)
7	% APBN terhadap Opex dan Capex	100.00%	43.90%	
8	% APBN terhadap Penerimaan	873.85%	171.18%	

Lampiran V: Kebutuhan SDM Tahun 2018-2019

NO	Uraian	Penambahan SDM		Jumlah (Orang)
		2018 (Orang)	2019 (Orang)	
1	Pensiun	243	296	539
2	Kekurangan SDM berdasarkan ABK dikurangi SDM Transmisi (1003-910=93)	18	19	37
3	Jumlah	261	315	576
4	Rekrutmen	145	49	194
5	Kekurangan Rekrutmen	116	266	382
6	Kekurangan rekrutmen 2018 299 dipenuhi dalam 4 tahun =116/4	0	29	29
7	Penambahan SDM		295	295

Lampiran VI
Logical Framework Renstra LPP TVRI (2018-2019)

No		Input	Output	Outcome	Impact	Visi / Misi
						Menjadi Lembaga Penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa
1		DIPA TVRI				
	A	Tahun 2018 Rp. 838.896 Milyar Anggaran Program dan Berita Rp. 93.813.001.000	Siaran Berita dan Siaran Current Affair = 41 % (Berita, Talkshow, Features (siaran gender, difable, daerah perbatasan (3T), Kelompok Termarginal, bencana) Siaran Olahraga = 7% (Informasi Olahraga, Event Olahraga) Siaran Program = 29,20% (musik, pendidikan, anak, gender, difable, hiburan dan budaya) Siaran Agama = 9% (Agama yang diakui Negara) Siaran Program Internasional = 10% (co-production, exchange program) Siaran Akuisisi dan PKS = 4% (canned product)	Banyaknya masyarakat yang menggelorakan kesadaran berbangsa dan bernegara, memperkokoh integrasi nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	Rasa Kebangsaan meningkat yang mendorong Persatuan yang Kuat	Menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi dan memberdayakan, yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa;

No		Input	Output	Outcome	Impact	Visi / Misi
	B	Tahun 2019 Rp. 951.021 Milyar Anggaran Program dan Berita Rp. 95.134.620.000	Siaran Berita dan Current Affair = 41 % (Berita, Talkshow, Features (siaran gender, difable, daerah perbatasan (3T), Kelompok Termarginal, bencana, Siaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif) Siaran Olahraga = 7% (Informasi Olahraga, Event Olahraga) Siaran Program = 29,20% (musik, pendidikan, anak, gender, difable, hiburan dan budaya) Siaran Agama = 9% (Agama yang diakui Negara) Siaran Program Internasional = 10% (co-production, exchange program) Siaran Akuisisi dan PKS = 4% (canned product)	Kesadaran Masyarakat dalam Pendidikan Meningkat . Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tinggi. Perilaku dan Budaya Masyarakat untuk hidup sehat jasmani dan rohani. Memperkokoh integrasi nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan semakin paham terhadap informasi yang benar	Masyarakat cerdas, berkarakter , berbudaya, berbudipekerti, sehat jasmani dan rohani, dan demokrasi semakin baik, serta rasa kebangsaan dan kesatuan semakin kokoh. Masyarakat tidak terpengaruh dengan berita hoax dan fake news	Menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi dan memberdayakan, yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa;
2		Sumber Daya Manusia				
	A	Tahun 2018 Jumlah SDM : 4639 PNS 3312 PBPNS 1327 Pensiun243 Kompetensi SDM Kompetensi Profesi	Jumlah SDM yang telah mengikuti pendidikan Profesi di bidang penyiaran sebanyak 630 orang Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis Dalam Negeri sebanyak 539 Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Luar Negeri sebanyak 0 (nol) orang	Sumber Daya Manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika. Transparan, beretika, tangguh dan berbasis meritokrasi.	Masyarakat merasa puas dalam layanan siaran publik yang dilakukan oleh TVRI, dan menjadikan siaran TVRI sebagai referensi publik	Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi serta mencerminkan keberagaman;

No		Input	Output	Outcome	Impact	Visi / Misi
			Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Struktural 16 orang			
	B	Tahun 2019 Jumlah SDM : 4.369 PNS 3183 PBPNS 1327 Pensiun 296	Jumlah SDM Profesional di bidang penyiaran sebanyak 693 orang Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis Dalam Negeri sebanyak 422 Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Luar Negeri sebanyak 21 orang Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Struktural 90 orang	Sumber Daya Manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika, serta tidak berpihak dan professional dalam melaksanakan tugas	Masyarakat merasa puas dalam layanan siaran publik yang dilakukan oleh TVRI, khususnya siaran Pemilu, dan menjadikan siaran TVRI sebagai referensi publik	Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi serta mencerminkan keberagaman;
3		Peralatan				
	A	Tahun 2018				
		Peralatan Produksi	29 Stasiun Produksi di seluruh Indonesia (58 studio) dan 1 (satu) Siaran Nasional di Kantor Pusat Jakarta (12 studio) 5 SNG Van (Kantor Pusat 3, Bali 1, Aceh 1) 11 OB Van (Kantor Pusat 5, Sulawesi Selatan 1, Jawa Timur 1, Aceh 1, Yogyakarta 1, Sulawesi Utara 1, Kaltim 1) 6 OB mini van (DKI, Jawa Barat, Gorontalo, Kendari, Ambon, Palangkaraya, Kantor pusat, Yogyakarta, Banjarmasin, Jawa Tengah, Kalimantan Timur) 5 Fly away (Kantor Pusat 2, Sulsel 1, Sumsel 1, Jatim 1)	Terimplementasikannya teknologi digital konverensi dan multiplatform dalam kegiatan produksi dan penyiaran serta mengoptimalkan jangkauan dan kualitas siaran	Masyarakat dapat mengakses dan merasa puas terhadap siaran TVRI dengan menggunakan berbagai perangkat penerima siaran untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara	Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam menggunakan teknologi terkini yang dikelola secara modern dan tepat guna serta dapat diakses secara digital

No		Input	Output	Outcome	Impact	Visi / Misi
			20 unit 3G Bounding (Kantor Pusat 6, Sulteng 1, NTB 1, Lampung 1, Riau 1, Bengkulu 1, Sumut 1, Jabar 1, Medan 1, Kaltim 1, Jatim 1, Kalsel 1, Kalteng 1, DKI 2)			
		Peralatan Penyiaran (Transmisi)	361 satuan transmisi di seluruh Indonesia, terdiri dari: 60 UHF 183 VHF 55 dualcast (Ready to Digital) 63 Digital 29 alat VPN-IP Media Asset Management /Network Attached Storage	Terimplementasikannya teknologi digital konverensi dan multiplatform dalam kegiatan produksi dan penyiaran serta mengoptimalkan jangkauan dan kualitas siaran	Masyarakat dapat mengakses dan merasa puas terhadap siaran TVRI dengan menggunakan berbagai perangkat penerima siaran untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara	Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam menggunakan teknologi terkini yang dikelola secara modern dan tepat guna serta dapat diakses secara digital
		Kanal Digital	TVRI 1 : Siaran Nasional Digital TVRI 2 : Siaran Lokal Digital TVRI 3 : Siaran Pariwisata dan Budaya TVRI 4 : Siaran Olahraga Digital (Sport HD)	Siaran TVRI semakin berkualitas dengan siaran digital	Masyarakat semakin puas menonton siaran TVRI dengan kualitas baik	Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam menggunakan teknologi terkini yang dikelola secara modern dan tepat guna serta dapat diakses secara digital
		Sarana dan Prasarana	Kantor TVRI di 29 Provinsi 1 (satu) Kantor Pusat 1 (satu) Studio Alam 361 Gedung dan Menara Satuan Transmisi Penataan sarana dan prasarana Pengelolaan dan distribusi aset	Kantor, lingkungan dan penataan aset TVRI semakin baik	Masyarakat percaya dan nyaman bekerjasama dengan TVRI	Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran serta pengembangan bisnis

No		Input	Output	Outcome	Impact	Visi / Misi
						sesuai peraturan perundang-undangan.
	B	Tahun 2019				
		Peralatan Produksi	29 Stasiun Produksi di seluruh Indonesia (58 studio) dan 1 (satu) Siaran Nasional di Kantor Pusat Jakarta (12 studio) 29 OB Van di Stasiun Penyiaran	Terimplementasikannya teknologi digital konverensi dan multiplatform dalam kegiatan produksi dan penyiaran serta mengoptimalkan jangkauan dan kualitas siaran, terutama Siaran Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif	Masyarakat dapat mengakses dan merasa puas terhadap siaran TVRI dengan menggunakan berbagai perangkat penerima siaran untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif	Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam menggunakan teknologi terkini yang dikelola secara modern dan tepat guna serta dapat diakses secara digital
		Peralatan Penyiaran (Transmisi)	361 satuan transmisi di seluruh Indonesia, terdiri dari: 60 UHF 180 VHF 58 dualcast (Ready to Digital) 63 Digital 29 alat VPN-IP Media Asset Management /Network Attached Storage	Terimplementasikannya teknologi digital konverensi dan multiplatform dalam kegiatan produksi dan penyiaran serta mengoptimalkan jangkauan dan kualitas siaran, terutama Siaran Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif	Masyarakat dapat mengakses dan merasa puas terhadap siaran TVRI dengan menggunakan berbagai perangkat penerima siaran untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif	Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam menggunakan teknologi terkini yang dikelola secara modern dan tepat guna serta dapat diakses secara digital
		Kanal Digital	TVRI 1 : Siaran Nasional Digital TVRI 2 : Siaran Lokal Digital TVRI 3 : Siaran Pariwisata dan Budaya TVRI 4 : Siaran Olahraga Digital (Sport HD) TVRI 5 : Siaran Internasional TVRI 6 : TV Parlemen	Siaran TVRI semakin berkualitas, termasuk siaran Pemilu dan menjangkau masyarakat internasional	Masyarakat semakin puas menonton siaran TVRI termasuk siaran Pemilu dengan kualitas baik dan dapat diterima oleh masyarakat di luar wilayah Indonesia melalui siaran multi platform	Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam menggunakan teknologi terkini yang dikelola secara modern dan tepat guna serta dapat diakses secara digital

No		Input	Output	Outcome	Impact	Visi / Misi
		Sarana dan Prasaran	Kantor TVRI di 29 Provinsi 1 (satu) Kantor Pusat 1 (satu) Studio Alam 361 Gedung dan Menara Satuan Transmisi Optimalisasi Aset dalam bentuk kerjasama pemanfaatan aset untuk property.	Kantor, lingkungan dan penataan aset TVRI semakin baik berstandar internasional	Masyarakat percaya dan nyaman bekerjasama dengan TVRI	Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan.
4		Regulasi				
		TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik				
			4. UU No. 32 Tahun 2002 Ttg Penyiaran 5. PP No. 11 Tahun 2005 Ttg Penyelenggaraan Penyiaran Publik 6. PP No. 13 Tahun 2005 Ttg LPP TVRI	Tatakelola Lembaga Penyiaran Publik TVRI belum optimal	Masyarakat belum dapat terlayani secara maksimal oleh LPP TVRI	Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		TVRI dalam pengelolaan Anggaran, Aset, SDM dan Operasional Siaran:				
			21. UU No.17 Tahun 2003 Ttg Keuangan Negara 22. UU No.1 Tahun 2004 Ttg Perbendaharaan Negara 23. UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN 24. UU No. 14 Tahun 2008 Ttg Keterbukaan Informasi Publik	Tatakelola lembaga menuju Good Governance	Kepercayaan publik dan stakeholder terhadap LPP TVRI meningkat	Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

No		Input	Output	Outcome	Impact	Visi / Misi
			25. UU No. 15 Tahun 2004 Ttg Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan			
			26. UU No. 9 Tahun 2018 Ttg PNBPN			
			27. UU No. 25 Tahun 2009 Ttg Pelayanan Publik			
			28. UU No. 28 Tahun 2014 Ttg Hak Cipta			
			29. UU No. 31 Tahun 1999 Ttg Tipikor			
			30. UU No. 33 Tahun 2009 Ttg Perfilman			
			31. UU No. 30 Tahun 2002 Ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi			
			32. UU No. 13 Tahun 2003 Tt Ketenagakerjaan			
			33. PP No. 10 Tahun 2018 Ttg BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)			
			34. PP No. 11 Tahun 2017 Ttg Management PNS			
			35. PP No. 27 Tahun 2014 Ttg Pengelolaan BMN			
			36. PP No. 33 Tahun 2017 Ttg Jenis & Tarif Di LPP TVRI			
			37. PP No.53 Tahun 2010 Ttg Disiplin PNS			
			38. PP No. 60 Tahun 2008 Ttg SPIP			

No		Input	Output	Outcome	Impact	Visi / Misi
			39. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2012 Ttg Pedoman Perilaku Penyiaran 40. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah			
		Peraturan Internal				
			1. Peraturan Dewan Pengawas LPP TVRI 2. Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI 3. Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI sebanyak 49 4. Surat Keputusan Direktur Utama sebanyak 75	Tatakelola organisasi LPP TVRI, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien	Masyarakat menerima pelayanan publik dengan baik	Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		SOP				
		Proses Bisnis Level 0				
5		Proses Bisnis Level 0 1. Pengelolaan Program Berita 2. Pengelolaan Teknik Penyiaran 3. Pengembangan dan Usaha 4. Pengelolaan Teknik Produksi 5. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 6. Penelitian dan Pengembangan Produk Penyiaran Publik 7. Pelayanan Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum	SOP: 1. Direktorat Program dan Berita sebanyak 16 2. Direktorat Keuangan sebanyak 6 3. Direktorat Teknik sebanyak 17 4. Direktorat Pengembangan dan Usaha sebanyak 8 5. Direktorat Umum sebanyak 44 6. Satuan Pengawasan Intern sebanyak 13	Tata laksana organisasi transparan, akuntabel, efektif, dan efisien	Masyarakat menerima pelayanan publik dengan baik	Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

No		Input	Output	Outcome	Impact	Visi / Misi
		8. Pelayanan Hubungan Masyarakat 9. Pelayanan Teknologi Informasi 10. Perencanaan Strategis 11. Pengelolaan Sarana Prasarana dan Aset 12. Manajemen Aparatur Sipil Negara 13. Pelayanan Administrasi dan Umum 14. Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana Pengelolaan Barang Milik Negara Pengawasan dan Pengendalian Internal	7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 10 8. Pusat Penelitian dan Pengembangan sebanyak 5 9. TVRI Stasiun Penyiaran sebanyak 174			
		Proses Bisnis Level 1 disesuaikan dengan tugas dan fungsi Direktorat dan Satuan Kerja Kantor Pusat dan Stasiun Penyiaran	Total SOP 293	Tata laksana organisasi transparan, akuntabel, efektif, dan efisien	Masyarakat menerima pelayanan publik dengan baik	Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DAFTAR STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI)

Direktorat Umum

A. SDM :

- a. Subbag Mutasi:
 1. Izin Perceraian
 2. Permintaan Cuti
 3. Permintaan Taspen dan Karpeg
 4. Usul Pensiun
 5. Kenaikan Pangkat
 6. Pindah Antar Instansi
 7. Permohonan Pindah Internal
- b. Subbag Kesra
 1. SPPD Dalam Negeri dan Luar Negeri
 2. Tunjangan Keluarga
 3. Pengadaan Konsumsi
 4. Pelayanan Kesehatan Poli Klinik
 5. Pengadaan Bahan Minuman dan Ekstra Fooding
- c. Subbag Data Evaluasi dan Pengembangan
 1. Pengolahan Data Pegawai
 2. Pengangkatan, Pembebasan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional
 3. Pengusulan Angka Kredit
 4. Prosedur Permintaan Data
 5. Pengurusan Administrasi Diklat
 6. Pengoperasian Sistem Kehadiran
 7. Pengolah Surat Masuk dan Keluar
 8. Perencanaan dan Pengembangan SDM

B. Pengadaan dan Inventarisasi :

- a. Pengadaan Barang / Jasa Terdiri dari:

1. Pengadaan langsung (sampai dengan 200jt)
 2. Pengadaan lelang (lebih dari 200jt)
 3. Swakelola
 4. Sewa (2019)
- b. Pengelolaan BMN, terdiri dari:
1. Penghapusan BMN
 2. Penetapan Status Penggunaan
 3. Hibah BMN
 4. Alih Status
- c. Pengelolaan Barang Persediaan
- d. SIMAK BMN (2019)

C. Sarana dan Prasarana:

1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas
2. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3. Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal
4. Pengamanan dan Keamanan
5. Perpustakaan

D. Kelembagaan (10 SOP):

1. 1/I.5/SOP/TVRI/2018 tentang Penyusunan Peraturan Dewan Direksi
2. 2/I.5/SOP/TVRI/2018 tentang Pengelolaan Surat Keluar
3. 3/I.5/SOP/TVRI/2018 tentang Penerimaan Kunjungan dari Sekolah/Universitas
4. 4/I.5/SOP/TVRI/2018 tentang Pengelolaan Surat Masuk
5. 5/I.5/SOP/TVRI/2018 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan
6. 6/I.5/SOP/TVRI/2018 tentang Penerimaan PKL
7. 8/I.5/SOP/TVRI/2018 tentang Pengaduan Pelayanan
8. 9/I.5/SOP/TVRI/2018 tentang Penerbitan Buletin Monitor
9. 10/I.5/SOP/TVRI/2018 tentang Keberatan Informasi

Direktorat Keuangan:

1. Laporan Kinerja
2. Penagihan Piutang
3. Penyusunan Anggaran
4. Penagihan Denda Piutang Kepada Pihak Ketiga
5. Pencairan Anggaran
6. Proses Revisi Anggaran

Direktorat Program dan Berita :

1. Operasional Siaran
2. Programming
3. Produksi Program/Berita
4. Akuisisi/Quality Control
5. Dokumentasi dan Kepustakaan
6. Program Continuity (PC)
7. Evaluasi Program
8. Program Tanggap Darurat
9. Kerjasama Siaran/Program
10. Promosi Program
11. Kreatifitas dan Panduan Bakat
12. Liputan Berita
13. Dialog/Talk Show
14. Siaran Langsung
15. Siaran Tunda
16. Redaksi

Direktorat Pengembangan dan Usaha:

1. 01/I.6/SOP/TVRI/2018 tentang Pengelolaan Surat Masuk (di Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik)
2. 06/I.6/SOP/TVRI/2018 tentang Pengelolaan Surat Masuk (di Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi)
3. 03/I.6/SOP/TVRI/2018 tentang Pengelolaan Surat Keluar (di Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik)
4. 04/I.6/SOP/TVRI/2018 tentang Perpanjangan Kerjasama Penyewaan Lahan dan Menara
5. 02/I.6/SOP/TVRI/2018 tentang Pengelolaan Surat Keluar (di Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik)
6. 07/I.6/SOP/TVRI/2018 tentang Pengelolaan Surat Masuk (di Bidang Penjualan dan pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha)

7. 08/I.6/SOP/TVRI/2018 tentang Pengelolaan Surat Masuk (untuk Direktur Pengembangan dan Usaha)
8. 05/I.6/SOP/TVRI/2018 tentang Kerjasama Sewa Lahan dan Bangunan di Kantor Pusat

Direktorat Teknik:

1. Engine – Generator
2. Penyiaran Teknik Transmisi
3. Pemeliharaan Peralatan TX
4. Permintaan Pengadaan Peralatan/Fasilitas TX
5. Penyiaran Jika Terjadi Keadaan Darurat/Marabahaya
6. Pra Produksi OB Dengan Microwave/FPU/SNG/Video Streaming
7. Produksi OB Dengan SNG
8. Produksi OB Live Dengan Microwave/FPU
9. Produksi OB Dengan Portable Uplink Video Streaming
10. Pelaksanaan Live Streaming Dari Stasiun Daerah
11. Standar Peralatan Produksi
12. Penyiaran Rutin
13. Pengadaan Peralatan
14. Kegiatan Produksi Dalam Studio Dan Luar Studio
15. Emergency Peyiaran
16. IT Support Untuk Sistem Penyiaran LPP TVRI
17. Kendala dan Hambatan Yang Terjadi Dalam Aktifitas Live Streaming

Satuan Pengawasan Intern:

1. Audit Rutin
2. Audit Khusus
3. Reviu Laporan Keuangan
4. Reviu RKA K/L
5. Reviu RKBMN (Rencana Kebutuhan BMN)
6. Reviu Penghapusan BMN
7. Reviu Hutang diatas 200jt – 2M
8. Reviu Panjar Kerja
9. Penyelesaian Kerugian Negara
10. Penyelesaian Tindak Lanjut BPK

11. Hak Akses Audit
12. Penolakan Pemberian Data/Dokumen
13. Penanganan Penolakan Audit

Pusat Penelitian dan Pengembangan:

1. Perjalanan Dinas
2. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja/FGD/Konsinyering
3. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/Pengkajian Mandiri
4. Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dengan Nilai Lebih Dari 200jt
5. Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dengan Nilai Kurang/Sampai Dengan 200jt

Pusat Pendidikan dan Pelatihan:

1. Monitoring dan Evaluasi Diklat
2. Perencanaan Program Diklat
3. Penyusunan Kurikulum
4. Penyelenggaraan Diklat Non Reguler (Masyarakat Umum)
5. Penyelenggaraan Diklat dengan Pihak Eksternal (dalam dan luar negeri)
6. Pengelolaan Surat Masuk
7. Pelaksanaan Penyelenggaraan Diklat Untuk Pegawai
8. Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat
9. Fasilitas dan Saran Perencanaan Program Diklat
10. Fasilitas dan Saran Diklat Penyelenggaraan Program Diklat

Lampiran VII

Matrix Program dan Indikator Kegiatan Renstra TVRI Tahun 2018-2019

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
117	I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SIARAN TV PUBLIK							838.9	1,972.65	2,811.55
	1	Pengembangan Program dan Produksi siaran TV Publik					Direktur Program dan Berita				
			1.1	Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan program dan produksi siaran TV publik					21	22	
					1	Jumlah Program Siaran		Paket Layanan	1	1	
					2	Program untuk Peningkatan Audience Share		Paket Layanan	1	1	
					3	Jam Siaran Nasional (Analog dan Digital)		Paket Layanan Jam Siar	1	1	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				4	Program yang menggunakan Biaya Hak Siar		Paket Layanan	1	1	
				5	Jumlah Program Penataan Kanal Digital		Paket Layanan	1	1	
				6	Jumlah Survei Eksternal		Paket Layanan	1	1	
				7	Jumlah Penghargaan Nasional dan lokal		Paket Layanan	1	1	
				8	Jumlah Penghargaan Internasional		Paket Layanan	1	1	
				9	Penataan Program		Paket Layanan	1	1	
				10	Kerjasama Program Internasional		Paket Layanan	1	1	
				11	Kerjasama Program Nasional		Paket Layanan	1	1	
				12	Jumlah Taging Program Nasional		Paket Layanan	1	1	
				13	Diversifikasi Konten digital		Paket Layanan	1	1	
				14	Distribusi konten melalui media baru		Paket Layanan	1	1	
				15	Pusat-Pusat Produksi Program di daerah		Paket Layanan	0	1	
				16	Distribusi konten ke market regional		Paket Layanan	0	0	
				17	Distribusi konten ke Market global		Paket Layanan	0	0	
				18	Jumlah program untuk mencapai International Rating		Paket Layanan	0	0	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				19	Jumlah surat Teguran KPI (Kepatuhan terhadap regulasi)		Paket Layanan	1	1	
				21	Jumlah Program Siaran Berita'		Paket Layanan	1	1	
				22	Jumlah Program siaran hiburan		Paket Layanan	1	1	
				23	Jumlah program siaran spesial		Paket Layanan	1	1	
				24	Jumlah Program Siaran Musik		Paket Layanan	1	1	
				25	Jumlah Program siaran drama		Paket Layanan	1	1	
				26	Jumlah Program pendidikan dan agama		Paket Layanan	1	1	
			2		Terlaksananya Layanan Pendukung Siaran Nasional			9	9	
				27	Jumlah program penunjang siaran Satker promo		Paket Layanan	1	1	
				28	Jumlah Program penunjang siaran satker kerjasama produksi siaran luar negeri		Paket Layanan	1	1	
				9	Jumlah Program Penunjang siaran satker dokumentasi dan kepustakaan		Paket Layanan	1	1	
				10	Jumlah Program Penunjang siaran Satker Kreativitas dan Pemandu Bakat		Paket Layanan	1	1	
				11	Jumlah Program penunjang siaran satker programming		Paket Layanan	1	1	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				12	Jumlah Program penunjang siaran satker akuisisi		Paket Layanan	1	1	
				13	Jumlah Program penunjang operasional siaran		Paket Layanan	1	1	
				14	Jumlah Program layanan kerjasama pihak asing		Paket Layanan	1	1	
				15	Jumlah Program rapat kerja pemberitaan		Paket Layanan	1	1	
			3		Terlaksananya Program Tagging Prioritas Nasional 2019				1	
				16	Jumlah Belanja Operasional program berita berupa berita Pemilu 2019		Paket Layanan		1	
			4		Terlaksananya penataan Program dan Kanal Digital (2019)				5	
				17	Jumlah Program Siaran Berita		Paket Layanan		1	
				18	Jumlah Program Penunjang Program dan Berita		Paket Layanan		1	
				19	Jumlah Program Current Affairs		Paket Layanan		1	
				20	Jumlah Program Olah raga		Paket Layanan		1	
				21	Jumlah Program untuk Akuisisi		Paket Layanan		1	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
			5	Terlaksananya Diversifikasi dan Penetrasi Konten Digital				Paket Layanan		1	
117					22	Jumlah Program Diversifikasi Konten melalui kanal digital (2019)		Paket Layanan		1	
					23	Jumlah Program Distribusi Konten melalui media baru (2020)		Paket Layanan			
					24	Jumlah Program Pengembangan Pusat Pusat Produksi di daerah (2021)		Paket Layanan			
					25	Jumlah Program Distribusi Konten ke Regional Market(2021)		Paket Layanan			
					26	Jumlah Program TVRI sebagai Pemimpin Konvergensi Media (2021)		Paket Layanan			
					27	Jumlah Program Penetrasi Konten ke Market Global (2022)		Paket Layanan			

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
	2	Terselenggaranya optimalisasi pemanfaatan aset, usaha jasa siaran dan jasa non siaran untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan						Paket Layanan	5	9	
			6.1	Terwujudnya layanan dalam pengembangan usaha yang prima terhadap mitra	127	Program Peningkatan PNBP		Paket Layanan	1	1	
			6.2	Terwujudnya optimalisasi aset TVRI	128	Jumlah optimalisasi Aset TVRI dengan digital Hub.		Paket Layanan	0	1	
					129	Program Ground Breaking TVRI Super block dengan Digital Hub		Paket Layanan	0	1	
			6.3	Melakukan Revisi Peraturan pemerintah Nomor 33 tentang Jenis dan tarif PNBP TVRI	130	Program Revisi PP 33 tahun 2017 tentang PNBP		Paket Layanan	0	1	
			6.4	Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha	131	Jumlah Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha		Paket Layanan	1	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
			6.5	Terlaksananya Layanan Kerjasama Usaha Siaran dan Non Siaran	132	Jumlah program Layanan Kerjasama Usaha Siaran dan Non Siaran		Paket Layanan	1	1	
			6.6	Terwujudnya Peningkatan Layanan Penerimaan Negara Bukan pajak dari jasa siaran dan non siaran	133	Jumlah program Peningkatan Layanan Penerimaan Negara Bukan pajak dari jasa siaran dan non siaran		Paket Layanan	1	1	
			6.7	Terwujudnya Peningkatan Layanan Publik LPP TVRI	134	Jumlah program Peningkatan Layanan Publik LPP TVRI		Paket Layanan	1	1	
			6.8	Terwujudnya Peningkatan Layanan optimalisasi aset dan promosi pemasaran dan penjualan (2019)	135	Jumlah program Peningkatan Layanan optimalisasi aset dan promosi pemasaran dan penjualan (2019)		Paket Layanan	0	1	
	3	Layanan Pengembangan Usaha TV Publik						Paket Layanan			
117			1	Terlaksananya Layanan Kerjasama Usaha Siaran dan Non Siaran			Direktur Pengembangan dan Usaha	Paket Layanan	6	6	
					1	Jumlah Program Pemasaran dan peningkatan kemitraan		Paket Layanan	2	2	
					2	Jumlah Program Promosi dan Publikasi		Paket Layanan	3	3	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				3	Jumlah Program Diversifikasi pengembangan Usaha		Paket Layanan	1	1	
			2		Terwujudnya Peningkatan Layanan Penerimaan Negara Bukan pajak dari jasa siaran dan non siaran		Paket Layanan	4	4	
				4	Jumlah program evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha		Paket Layanan	4	4	
			3		Terwujudnya Peningkatan Layanan Publik LPP TVRI		Paket Layanan	3	4	
				5	Jumlah program layanan publik secara langsung		Paket Layanan	3	4	
			4		Terwujudnya Peningkatan Layanan optimalisasi aset dan promosi pemasaran dan penjualan (2019)		Paket Layanan		3	
				6	Jumlah optimalisasi Aset TVRI		Paket Layanan		1	
				7	Jumlah Program Pemasaran dan Penjualan (2019)		Paket Layanan		1	
				8	Branding dan Promosi Penjualan (2019)		Paket Layanan		1	
				9	Jumlah Program Optimalisasi Aset		Paket Layanan			

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
						dan Ground Breaking TVRI Superblock (BTO)-2020 melalui Kerjasama Pemanfaatan Aset (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) dan kerjasama lain sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku					
	4	Perencanaan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik						Paket Layanan	17	17	
			3.1	Peningkatan Jangkauan Siaran terhadap Wilayah dan jumlah penduduk				Paket Layanan	1	1	
			3.2	Peningkatan Jangkauan Siaran Terhadap Wilayah dan Jumlah Penduduk	55	Program untuk meningkatkan Coverage Area		Paket Layanan	1	1	
					56	Program untuk meningkatkan Coverage Population		Paket Layanan	1	1	
			3.3	Digitalisasi Pemancar, studio dan peralatan	57	Jumlah pemancar digital		Paket Layanan	1	1	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				58	Jumlah studio digital		Paket Layanan	1	1	
				59	Prohgram Fully Integrated digital MAM		Paket Layanan	1	1	
				60	Program peralatan produksi dan penyiaran yang dimodernisasi		Paket Layanan	1	1	
				61	Program persiapan TVRI sebagai operator multipleksing		Paket Layanan	1	1	
				62	Program Persiapan <i>Analog Switch Off</i>		Paket Layanan	1	1	
			3.4	Pengembangan <i>Early Warning Syastem</i>	63	<i>Program untuk Early Warning system (EMS)</i>		Paket Layanan	1	1
			3.5	Penguatan signal penerimaan Siaran	64	Program penguatan kualitas signal penerimaan Jakarta.		Paket Layanan	1	1
					65	Program Penguatan kualitas signal Penerimaan Surabaya.		Paket Layanan	1	1
					66	Indeks quality receptions		Paket Layanan	1	1
			3.6	Taging program prioritas nasional untuk Teknik	67	Jumlah Program prioritas nasional untuk teknik		Paket Layanan	1	1
			3.7	Terlaksananya pengembangan ICT office dan broadcasting yang terintegrasi	68	Jumlah program ICT Office		Paket Layanan	1	1
					69	Jumlah program ICT penyiaran		Paket Layanan	1	1

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				70	Indeks E-Government		Paket Layanan	1	1	
			1 Terlaksananya Peningkatan Layanan Dukungan Kegiatan teknik			Direktur Teknik	Paket Layanan	10	10	
				1	Jumlah Program Rencana Program Teknik		Paket Layanan	2	2	
				2	Jumlah Program pelaksanaan dan Pemantauan Teknik		Paket Layanan	5	5	
				3	Jumlah Program Laporan Evaluasi teknik		Paket Layanan	3	3	
	5	Layanan Internal Teknik					Paket Layanan			
			2 Terlaksananya pengadaan Peralatan teknik produksi dan penyiaran 2018				Paket Layanan	27		
				5	Jumlah Pengadaan Peralatan Camera HD Studio 7		Paket Layanan	1		
				6	Jumlah Pengadaan Peralatan MAM Archiving Sistem Penyiaran Kantor Pusat		Paket Layanan	1		
				7	Jumlah Pengadaan Peralatan Studio Auditorium TVRI Kantor Pusat		Paket Layanan	1		

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				8	Jumlah Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional Penyiaran dan Produksi		Paket Layanan	10		
				9	Jumlah Pengadaan Peralatan Non Linear Editing Kantor Pusat		Paket Layanan	10		
				10	Jumlah Pengadaan Peralatan EFP HD Camera Studio 5		Paket Layanan	1		
				11	Jumlah Pengadaan Peralatan Newsroom System Kantor Pusat		Paket Layanan	1		
				12	Jumlah Pengadaan Peralatan Video Conference Kantor Pusat		Paket Layanan	1		
				13	Jumlah program Rehabilitas Penyiaran CH 3 dan CH 4 digital Kantor Pusat		Paket Layanan	1		
			3		Terlaksananya pengadaan peralatan Teknik Produksi dan Penyiaran tahun 2019		Paket Layanan		47	
				14	Jumlah Program Upgrade Master Control		Paket Layanan		1	
				15	Jumlah program Fly Away System 5 kamera		Paket Layanan		1	
				16	Jumlah program Pengadaan kamera Studio 6		Paket Layanan		1	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				17	Jumlah program Pengadaan kamera Studio 8		Paket Layanan		1	
				18	Jumlah progam Pengadaan Peralatan Pendukung Produksi Luar dan dalam Studio		Paket Layanan		10	
				19	Jumlah program Upgrade Lighting Studio 5		Paket Layanan		1	
				20	Jumlah program 3G Bounding		Paket Layanan		32	
			4		Terlaksananya Pengadaan Peralatan Teknik Transmisi tahun 2018		Paket Layanan	13		
				21	Jumlah Program Teknik Transmisi Digital		Paket Layanan	1		
				22	Jumlah Pengadaan multiplexer kapasitas 12 input ASI dan 2 port IP		Paket Layanan	1		
				23	Jumlah Pengadaan HPA 100 watt untuk SNG		Paket Layanan	2		
				24	Jumlah Pengadaan Spectrum Monitor C-Band		Paket Layanan	1		
				25	Jumlah Pengadaan encoder MPEG-4		Paket Layanan	2		
				26	Jumlah Peralatan pendukung operasional transmisi		Paket Layanan	3		

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				27	Jumlah Pengadaan HPA & Audio Processor untuk uplink		Paket Layanan	1		
				28	Jumlah Perbaikan sistem pemancar kanal 39 UHF di Satuan Transmisi Joglo		Paket Layanan	1		
				29	Jumlah program Lanjutan pekerjaan pengadaan UPS di TVRI Satuan Transmisi Joglo		Paket Layanan	1		
			5		Terlaksananya Pengadaan Peralatan Teknik Transmisi tahun 2019		Paket Layanan		15	
				30	Jumlah Pengadaan Pemancar Digital 2 KW DVBT2 dan kelengkapannya di Balikpapan		Paket Layanan		1	
				31	Jumlah Pengadaan Genset 33 KVA		Paket Layanan		1	
				32	Jumlah Pengadaan Tower 65 m Tri angle dan bangunan di Balikpapan		Paket Layanan		1	
				33	Jumlah pengadaan Multiplexer (MUX) Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan Medan		Paket Layanan		4	
				34	Jumlah Pengadaan Microwave 3 lokasi Ambon, Padang, Lampung		Paket Layanan		3	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				35	Jumlah Pengadaan Peralatan Pendukung Transmisi		Paket Layanan		5	
			6		Terlaksananya Pengadaan Teknologi Informatika dan Kerjasama Teknik		Paket Layanan	1	1	
				36	Jumlah Program teknologi Informatika dan kerjasama teknik		Paket Layanan	1	1	
			7		Terlaksananya Peningkatann kapasitas data center dan network system 2018		Paket Layanan	10		
				37	Jumlah Program Peningkatan kapasitas Data Center		Paket Layanan	1		
				38	Jumlah Program Pengembangan Jaringan IT Broadcast		Paket Layanan	1		
				39	Jumlah Program Alat ukur dan Tools IT		Paket Layanan	1		
				40	Jumlah Program Network Monitoring System		Paket Layanan	1		
				41	Jumlah Program Pengadaan Peralatan Pendukung Fasilitas Teknik		Paket Layanan	5		

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
			8		Terlaksananya pengadaan Peralatan Teknologi Informatika dan Kerjasama Teknik 2019		Paket Layanan		66	
				42	Pengembangan pembuatan aplikasi back office /e-government		Paket Layanan		1	
				43	Pengadaan server database aplikasi back office / e-government		Paket Layanan		1	
				44	Pembangunan jaringan LAN kantor TVRI Pusat		Paket Layanan		1	
				45	Pengadaan peralatan pendukung fasilitas Teknik		Paket Layanan		33	
				46	Jaringan Internet		Paket Layanan		29	
			9		Terlaksananya Program Tagging Prioritas Nasional 2019		Paket Layanan		1	
				47	Jumlah Program Belanja Modal teknik berupa Peralatan Studio, Transmisi dan ICT		Paket Layanan		1	
			10		Terlaksananya Peningkatan kualitas studio dan pemancar tahun 2019		Paket Layanan		71	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				48	Jumlah Program Pengadaan peralatan studio 15 Daerah		Paket Layanan		15	
				49	Jumlah Program Pengadaan Automation 15 Stasiun Daerah		Paket Layanan		15	
				50	Jumlah Program UP Grade Pemancar Jawa Timur		Paket Layanan		1	
				51	Jumlah Program IRD 29 Ibu Kota Provinsi		Paket Layanan		29	
				52	Jumlah Program Parabola 6 meter		Paket Layanan		1	
			11		Terlaksananya peningkatan program prioritas TVRI		Paket Layanan		3	
				53	Jumlah Program Pengembangan Media Asset Management (MAM) yang terintegrasi		Paket Layanan		1	
				54	Jumlah Program Invetasi Baru Negara sebagai pemilik TVRI		Paket Layanan		1	
				55	Jumlah Program Pengembangan TVRI sebagai Operator Multipleksing		Paket Layanan		1	
				56	Jumlah program digitalisasi penyiaran melalui program ITTS III (Loan)		Paket Layanan		-	
				57	Jumlah Program Pendamping ITTS III (2020)		Paket Layanan		-	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
	6	Perencanaan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional						Paket Layanan			
			1	Terlaksananya Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional			Kepala Stasiun	Paket Layanan	29	29	
			1.2	Peningkatan Efektivitas Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional				Paket Layanan	29	29	
					25	Program Siaran Muatan Lokal		Paket Layanan	29	29	
					26	Jam siaran lokal (analog dan digital)		Paket Layanan Jam Siar	29	29	
					27	Jumlah Program untuk meningkatkan Audience share lokal		Paket Layanan	29	29	
				penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional				Paket Layanan			

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				1	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Bali		Paket Layanan	1	1	
				2	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Bengkulu		Paket Layanan	1	1	
				3	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Aceh		Paket Layanan	1	1	
				4	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Yogyakarta		Paket Layanan	1	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				5	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran DKI Jakarta		Paket Layanan	1	1	
				6	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Gorontalo+1141		Paket Layanan	1	1	
				7	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Jambi		Paket Layanan	1	1	
				8	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Jawa Barat		Paket Layanan	1	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
					9	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Jawa Tengah		Paket Layanan	1	1	
					10	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Jawa Timur		Paket Layanan	1	1	
					11	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Kalimantan Barat		Paket Layanan	1	1	
					12	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Kalimantan Selatan		Paket Layanan	1	1	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
					13	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Kalimantan Tengah		Paket Layanan	1	1	
					14	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Kalimantan Timur		Paket Layanan	1	1	
					15	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Lampung		Paket Layanan	1	1	
					16	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Maluku		Paket Layanan	1	1	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
					17	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Nusa Tenggara Barat		Paket Layanan	1	1	
					18	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Nusa Tenggara Timur		Paket Layanan	1	1	
					19	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Papua		Paket Layanan	1	1	
					20	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Riau		Paket Layanan	1	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				21	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Sulawesi Selatan		Paket Layanan	1	1	
				22	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Sulawesi Tengah		Paket Layanan	1	1	
				23	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Sulawesi Tenggara		Paket Layanan	1	1	
				24	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Sulawesi Utara		Paket Layanan	1	1	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
					25	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Sumatera Barat		Paket Layanan	1	1	
					26	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Sumatera Selatan		Paket Layanan	1	1	
					27	Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Sumatera Utara		Paket Layanan	1	1	
					28	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Sulawesi Barat		Paket Layanan	1	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
					29	Jumlah Program Penyelenggaraan dan pengembangan stasiun penyiaran TV publik lokal dan regional TVRI Stasiun Penyiaran Bangka Belitung		Paket Layanan	1	1	
	II	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						Paket Layanan			
	1	Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan					Direktur Keuangan	Paket Layanan			
			2.1	Terlaksananya Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan				Paket Layanan	18	7	
			2.2	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	36	Opini BPK		Paket Layanan	1	1	
					37	Penyelesaian Akun-Akun Terisoliasi		Paket Layanan	1	1	
117					38	Indeks SPIP		Paket Layanan	1	1	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
			2.3	Terlaksana Koordinasi dan Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	39	Jumlah Stasiun Penyiaran yang memperoleh pembinaan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel		Paket Layanan	1	1	
			2.4	Sumber pembiayaan baru	40	% proses peraturan tentang implementasi iuran penyiaran.		Paket Layanan	1	1	
					41	% Proses peraturan tentang pajak media bagi TVRI		Paket Layanan	1	1	
					42	% PSO (Public service Obligation) untuk wilayah Perbatasan		Paket Layanan	1	1	
					43	% PSA dari biaya promosi Kementerian/Lembaga/BUMN dipusat dan daerah.		Paket Layanan	1	1	
					44	% Biaya USO untuk TVRI		Paket Layanan	1	1	
					45	Jumlah program Layanan Perencanaan Keuangan		Paket Layanan	12	1	
					46	Jumlah program Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Paket Layanan	1	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				47	Jumlah program Layanan Manajemen Keuangan		Paket Layanan	1	1	
				48	Jumlah program Layanan Perkantoran		Paket Layanan	1	1	
				49	Jumlah Program Operasional dan pemeliharaan Perkantoran		Paket Layanan	1	1	
				50	Jumlah Program pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan		Paket Layanan	1	1	
				51	Terlaksananya Belanja Operasional Comprehensif Planning		Paket Layanan	1	1	
			2.5		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP TVRI		Paket Layanan	1	1	
				52	Indeks APIP		Paket Layanan	1	1	
				53	Jumlah Program Layanan Internal Audit		Paket Layanan	1	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				54	Jumlah Program Layanan peningkatan Reviu Laporan keuangan dan Akuntabilitas Kinerja		Paket Layanan	11	11	
			1		Terlaksananya Layanan Perencanaan Keuangan		Paket Layanan	12	12	
				1	Jumlah Program Penyusunan rencana Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan		Paket Layanan	5	5	
				2	Jumlah Program Penyusunan Anggaran		Paket Layanan	7	7	
			2		Terlaksananya Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Paket Layanan	4	4	
				3	Jumlah Program Pelaksanaan Pamantauan dan Evaluasi		Paket Layanan	1	1	
				4	Jumlah Program Penyusunan laporan Kemajuan Realisasi		Paket Layanan	1	1	
				5	Jumlah Program Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja		Paket Layanan	2	2	
			3		Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan		Paket Layanan	11	11	
				6	Jumlah Program Penyusunan Laporan Keuangan		Paket Layanan	4	4	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				7	Jumlah Program Pengelolaan Perbendaharaan		Paket Layanan	6	6	
				8	Jumlah Program tata Laksana Keuangan		Paket Layanan	1	1	
			4	Terlaksananya Layanan Perkantoran			Paket Layanan	1	1	
				9	Jumlah Program Pembayaran Gaji dan Tunjangan		Paket Layanan	1	1	
			5	Terlaksananya Operasional dan pemeliharaan Perkantoran			Paket Layanan	11	11	
				10	Jumlah Program Operasional dan pemeliharaan kantor		Paket Layanan	11	11	
			6	Terlaksananya pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan			Paket Layanan		2	
				11	Jumlah Kekurangan Gaji		Paket Layanan		1	
				12	Jumlah Belanja Tunjangan Kinerja		Paket Layanan		1	
117.01.01			7	Terlaksananya Belanja Operasional Comprehensif Planning			Paket Layanan		1	
					Jumlah Program Comprehensif Planning		Paket Layanan		1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
					12	Jumlah Program Terlaksananya pengembangan sumber pembiayaan baru melalui iuran televisi (2020)		Paket Layanan			
					13	Jumlah Program Diversifikasi sumber-sumber penerimaan baru. (2021)		Paket Layanan			
	2	Koordinasi Pembinaan Kepegawain Penataan Organisasi dan Pengelolaan Operasional Umum LPP TVRI					Direktur Umum	Paket Layanan	39	38	
			4.1	Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	82	Nilai Reformasi Birokrasi		Paket Layanan	1	1	
					83	Jumlah Stasiun Penyiaran yang telah melaksanakan reformasi birokrasi		Paket Layanan	1	1	
					84	Jmlah Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional		Paket Layanan	1	1	
					85	Jumlah Pegawai yang menerapkan kinerja individu		Paket Layanan	1	1	
			4.2	Tatakelola Organisasi yang akuntabel, bersih dan berkinerja tinggi	86	Indeks Akuntabilitas Kinerja		Paket Layanan	1	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
					87	Jumlah Unit kerja yang menerapkan WBK (wilayah Bebas Korupsi) /WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)		Paket Layanan	1	1	
			4.3	Meningkatnya kapasitas pelayanan publik	88	Indeks Pelayanan Publik		Paket Layanan	1	1	
			4.4	Peningkatan Kompetensi Profesi	89	Jumlah pegawai TVRI yang memperoleh sertifikasi profesi		Paket Layanan	1	1	
					90	Indeks Kompetensi Profesi		Paket Layanan	1	1	
			4.5	Kepemimpinan dalam organisasi	91	Indeks leadership		Paket Layanan	1	1	
					92	Jumlah Potensi Kandidat Pemimpin		Paket Layanan	1	1	
			4.6	Penambahan SDM Sesuai Kebutuhan	93	Jumlah Rekrutment SDM		Paket Layanan	1	1	
			4.7	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi				Paket Layanan	27	26	
				Terlaksananya Layanan Internal (Overhead)	94	Jumlah Program Layanan Internal (Overhead)		Paket Layanan	1	1	
			4.8	Terlaksananya Layanan Managemen SDM	95	Jumlah program Layanan Managemen SDM		Paket Layanan	1	1	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
			4.9	Terlaksananya Program Tagging Prioritas Nasional bidang umum 2019	96	Jumlah Program Tagging Prioritas Nasional bidang umum 2019		Paket Layanan	1	1	
			4.1 0	Terlaksananya Percepatan Reformasi Biroktasi	97	Jumlah program Percepatan Reformasi Biroktasi		Paket Layanan	1	1	
			4.1 1	Terlaksananya Layanan Hukum	98	Jumlah program Layanan Hukum		Paket Layanan	1	1	
			4.1 2	Terlaksananya Layanan Hubungan masyarakat dan Komunikasi	99	Jumlah program Layanan Hubungan masyarakat dan Komunikasi		Paket Layanan	1	1	
			4.1 3	Terlaksananya Layanan Tata Usaha Pimpinan	100	Jumlah program Layanan Tata Usaha Pimpinan		Paket Layanan	1	1	
			5.1	Penguatan Kelembagaan	104	Jumlah stasiun penyiaran yang menyelesaikan proses bisnis.		Paket Layanan	1	1	
					105	Jumlah stasiun penyiaran yang merumuskan Renstra Stasiun yang diturunkan dari Renstra Pusat		Paket Layanan	1	1	
					106	Jumlah Program Perubahan Struktur Organisasi.		Paket Layanan	1	1	
					107	Jumlah Program Pembentukan Stasiun Nasional		Paket Layanan	1	1	
					108	Jumlah Program Pembentukan Stasiun Internasional		Paket Layanan	1	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
					109	Jumlah Program Pembentukan Saluran Internasional		Paket Layanan	1	1	
					110	Program Pembentukan Saluran Parlemen		Paket Layanan	1	1	
					111	Jumlah stasiun penyiaran yang naik tipe klasifikasi.		Paket Layanan	1	1	
117					112	Program persiapan Kelembagaan baru melalui revisi UU penyiaran dan RUU RTRI		Paket Layanan	1	1	
					113	Program Revisi Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI		Paket Layanan	1	1	
			5.2	Melakukan Rebranding TVRI	114	Program Rebranding TVRI		Paket Layanan	1	0	
					115	Program Implementasi Rebranding		Paket Layanan	1	1	
			5.3	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara yang efektif	116	Program Pengelolaan aset		Paket Layanan	1	1	
					117	Program Distribusi aset		Paket Layanan	1	1	
			5.4	Terwujudnya pembentukan stasiun penyiaran baru.	118	Jumlah stasiun penyiaran baru		Paket Layanan	1	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
			5.5	Terwujudnya pembangunan balai diklat di daerah	119	Jumlah balai diklat yang dibangun di daerah		Paket Layanan	1	1	
			5.6	Terwujudnya Rumah Dinas Pejabat	120	Jumlah rumah dinas pejabat yang dibangun		Paket Layanan	1	1	
			5.7	Terwujudnya mess/asrama Pusdiklat	121	Jumlah mess/asrama Pusdiklat		Paket Layanan	1	1	
			5.8	Terwujudnya Pembangunan Kantor TVRI Stasiun Penyiaran	122	Jumlah pembangunan Kantor TVRI Stasiun Penyiaran		Paket Layanan	1	1	
					123	Program Pembangunan Pusdiklat di studio Alam		Paket Layanan	1	1	
			5.9	Terlaksana Tata Kelola kelembagaan dan Aset				Paket Layanan	3	3	
			5.10	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan	124	Jumlah program Pengembangan Kelembagaan		Paket Layanan	1	1	
			5.11	Terlaksananya Kelembagaan Baru TVRI	125	Jumlah program Kelembagaan Baru TVRI		Paket Layanan	1	1	
			5.12	Terlaksananya Layanan Manajemen BMN dan Pengelolaan Umum	126	Jumlah program Layanan Manajemen BMN dan Pengelolaan Umum		Paket Layanan	1	1	
			1	Terlaksananya Layanan Internal (Overhead)				Paket Layanan	5	5	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				1	Jumlah Program Overhead Peralatan dan mesin		Paket Layanan	4	4	
				2	Jumlah Program Overhead Gedung dan Bangunan		Paket Layanan	1	1	
			2		Terlaksananya Layanan Managemen SDM		Paket Layanan	11	11	
				1	Jumlah Program Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai		Paket Layanan	1	1	
				2	Jumlah Program Administrasi Kepegawaian		Paket Layanan	4	4	
				3	Jumlah Program Pembinaan kepegawaian		Paket Layanan	1	1	
				4	Jumlah Program Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pegawai		Paket Layanan	5	5	
			3		Terlaksananya Layanan Manajemen BMN dan Pengelolaan Umum		Paket Layanan	11	11	
				4	Jumlah Program Penatausahaan BMN		Paket Layanan	3	3	
				5	Jumlah Program Penghapusan BMN		Paket Layanan	1	1	
				6	Jumlah Program Monitoring BMN		Paket Layanan	3	3	
				7	Jumlah Program Penilaian BMN (Revaluasi Aset)		Paket Layanan	1	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				8	Jumlah Program Layanan Urusan Rumah Tangga		Paket Layanan	1	1	
				9	Jumlah Program Pelaksanaan Layanan barang dan Jasa		Paket Layanan	2	2	
			4		Terlaksananya Program Tagging Prioritas Nasional 2019 bidang umum		Paket Layanan	0	1	
					Jumlah Program Belanja Umum berupa Kendaraan Pemilu		Paket Layanan	0	1	
			5		Terlaksananya Percepatan Reformasi Biroktasi		Paket Layanan	5	5	
				10	Jumlah Program Percepatan program Reformasi Birokrasi meliputi 8 Areal Perubahan		Paket Layanan	1	1	
				11	Jumlah Program Terlaksananya Remunerasi Berbasis Kinerja		Paket Layanan	1	1	
				12	Jumlah Program Penyusunan dan Penetapan Analisa Jabatan		Paket Layanan	1	1	
				13	Jumlah Program Penyusunan dan Penetapan Evaluasi Jabatan		Paket Layanan	1	1	
				14	Jumlah Program Penyusunan dan Penetapan Analisa beban Kerja		Paket Layanan	1	1	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
			6	Terlaksananya Layanan Hukum				Paket Layanan	6	6	
					15	Jumlah Program Perumusan Produk Hukum		Paket Layanan	1	1	
					16	Jumlah Program Bantuan Hukum dan Percepatan Proses Sertifikat Tanah		Paket Layanan	5	5	
			7	Terlaksananya Layanan Hubungan masyarakat dan Komunikasi				Paket Layanan	5	5	
					17	Jumlah Program Pengembangan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat		Paket Layanan	5	5	
			8	Terlaksananya Layanan Tata Usaha Pimpinan				Paket Layanan	4	4	
					18	Jumlah Program Koordinasi Kebijakan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP TVRI		Paket Layanan	3	3	
					19	Jumlah Program Pelaksanaan Kebijakan dewan Pengawas dan dewan Direksi		Paket Layanan	1	1	
			9	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan				Paket Layanan	3	3	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
					20	Jumlah Program pengembangan kelembagaan		Paket Layanan	1	1	
					21	Jumlah Program Mekanikal Elektrikal		Paket Layanan	1	1	
					22	Jumlah Program bangunan dan Gedung		Paket Layanan	1	1	
			10	TerlaksananyaKelembagaan Baru TVRI				Paket Layanan	3	3	
					23	Jumlah Program Pengusulan Revisi PP 13 tahun 2005		Paket Layanan	1	1	
					24	Jumlah Program penataan dan perubahan struktur organisasi LPP TVRI		Paket Layanan	1	1	
					25	Jumlah Program Re-Branding New TVRI		Paket Layanan	1	1	
	3	Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP TVRI					Kepala SPI	Paket Layanan			
			1					Paket Layanan	46	49	
			2.5	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP TVRI				Paket Layanan	11	11	

KODE KL	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
				52	Indeks APIP		Paket Layanan			
				53	Jumlah Program Layanan Internal Audit		Paket Layanan	0	0	
				54	Jumlah Program Layanan peningkatan Reviu Laporan keuangan dan Akuntabilitas Kinerja		Paket Layanan	11	11	
			Terlaksananya Layanan Internal Audit				Paket Layanan	46	49	
				1	Jumlah Program Penyusunan Kebijakan dan SOP Internal, pencegahan pemberantasan korupsi dan pelaporan		Paket Layanan	2	2	
				2	Jumlah Program Pelaksanaan Audit rutin dan khusus untuk menurunkan jumlah temuan atas penyimpangan peraturan perundang-undangan		Paket Layanan	32	33	
				3	Jumlah Program Tindak Lanjut Hasil Temuan/rekomendasi BPK		Paket Layanan	6	7	
				4	Jumlah Program Peningkatan Kualitas SDM (Kapasita, kapabilitas dan kompetensi) Auditor		Paket Layanan	5	6	
				5	Jumlah Program Pembinaan Pengawasan Kinerja dan keuangan		Paket Layanan	1	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
KL											
			2	Terlaksananya Layanan peningkatan Reviu Laporan keuangan dan Akuntabilitas Kinerja				Paket Layanan	8	11	
					6	Jumlah Program Peningkatan kualitas review Laporan Keuangan dan RKA K/L;		Paket Layanan	7	7	
117					7	Jumlah Program peningkatan kualitas review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		Paket Layanan	1	2	
					8	Jumlah Program Jumlah unit kerja yang memperoleh Wilayah Tertib Administrasi (WTA).		Paket Layanan		2	
	4	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TV Publik					Kepala Pusdiklat	Paket Layanan			
			4.1 4	Jumlah Progrqm sertifikasi Profesi	101			Paket Layanan	0	0	
			4.1 5	Terlaksananya Layanan Pendidikan dan Pelatihan	102	Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Paket Layanan	0	0	
			4.1 6	Terlaksananya Peningkatan tenaga kompetensi	103	Jumlah program Peningkatan tenaga kompetensi		Paket Layanan	0	0	
			1	Terlaksananya Layanan Pendidikan dan Pelatihan				Paket Layanan	24	0	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
117					1	Jumlah Program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan profesi		Paket Layanan	16		
					2	Jumlah Program Pengembangan Kompetensi		Paket Layanan	8		
			2	Terlaksananya Peningkatan tenaga kompetensi				Paket Layanan	0	5	
					3	Jumlah Program Layanan diklat		Paket Layanan		1	
					4	Jumlah Program Terlaksananya Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi TVRI.		Paket Layanan		1	
					5	Jumlah Program Terlaksananya Peningkatan Diklat berbasis Kompetensi Profesi		Paket Layanan		1	
					6	Jumlah Program Terlaksananya Jumlah pengembangan jaringan kerja sama dengan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri		Paket Layanan		1	
					7	Jumlah Program Studi Kalayakan Pusdiklat sebagai Center of Excellance (2021) BTO di Studio Alam		Paket Layanan		1	
	5	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan					Kepala Pusiitbang	Paket Layanan			

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
								Paket Layanan			
			1.3	TerlaksananyaPengkajian dan Penelitian efektif untuk meningkatkan daya saing TVRI				Paket Layanan	25	34	
					28	Jumlah wilayah Survei audince share diluar Nielsen		Paket Layanan	1	1	
					29	Program Langganan Data Nielsen		Paket Layanan	1	1	
					30	Indeks survei kepuasan mitra pada stasiun penyiaran		Paket Layanan	1	1	
					31	Indeks survei Kepuasan Pegawai pada stasiun penyiaran		Paket Layanan	1	1	
117					32	Jumlah survei teknik pada stasiun penyiaran		Paket Layanan	1	1	
					33	Jumlah Layanan Penelitian dan Pengembangan		Paket Layanan	10	13	
					34	Jumlah Layanan Survey Nielsen Full Package & Indels Perception di luar 11 Kota Survey Nielsen		Paket Layanan	0	1	
					35	Jumlah program layanan Konsultan Multipleksing		Paket Layanan	0	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
							(PIC)		2018	2019	
			1	Terlaksananya Layanan Penelitian dan Pengembangan				Paket Layanan	10	14	
					1	Jumlah Program Pelaksanaan penelitian		Paket Layanan	4	4	
					2	Jumlah Program Pelaksanaan Pengkajian		Paket Layanan	3	3	
					3	Jumlah Program Pelaksanaan Pengembangan		Paket Layanan	1	1	
					4	Jumlah Program penerapan Hasil Litbang survey performa siaran TVRI/hasil nielsen		Paket Layanan	2	2	
			2	Terlaksananya Layanan Survey Nielsen Full Package & Indeks Perception di luar 11 Kota Survey Nielsen				Paket Layanan	0	1	
					5	Jumlah Program Survey Nielsen dan Indeks Perception		Paket Layanan	0	1	
			3	Terlaksananya Konsultan Multipelksing				Paket Layanan	0	1	
117					6	Jumlah Program Kajian Konsultan Multipelksing		Paket Layanan	0	1	

KODE	NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	NO	INDIKATOR KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	TARGET OUTPUT		TOTAL ALOKASI 2018-2019 (Rp Miliar)
						(PIC)		2018	2019	
			4 Terlaksananya pengembangan Tenaga Fungsional Peneliti				Paket Layanan	0	0	
				7	Jumlah program tenaga fungsional peneliti		Paket Layanan	0	0	

